



PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI

LKIP

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 2025



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Suryakencana No. 24 Telepon (0266) 215136 Faks (0266) 221128 Kota Sukabumi 43111
Provinsi Jawa Barat, e-mail : inspektorat@sukabumikota.go.id
Website : <https://inspektorat.sukabumikota.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Sukabumi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sukabumi, ~~30~~ Maret 2026

INSPEKTUR DAERAH KOTA SUKABUMI

YUDI YUSTIAWAN, S.T., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 196810131998031001



IKHTISAR EKSKLUSIF



H. Ayep Zaki
Wali Kota Sukabumi

Dalam rangka mewujudkan ke pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi melaksanakan kewajiban tersebut dengan menyajikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2025

disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029. Pada Tahun 2025, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025, terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan 5 (Lima) indikator Tujuan RJMPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah

dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU pada aplikasi *e-performance* sebagai berikut :

TABEL
INTERPRETASI PENCAPAIAN KINERJA UTAMA

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	WARNA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Blue
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Green
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Yellow
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Red
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Grey

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Tahun 2025, rata-rata capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah **100,73%** atau dengan kata lain memiliki kinerja **SANGAT TINGGI** terhadap seluruh IKU **21 (dua puluh satu) IKU** yang **menembak 5 (lima) Tujuan** yang ada di RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

Untuk pencapaian IKU pada seluruh sasaran strategis yang ada dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, ditembak oleh 46 Program menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja **SANGAT TINGGI** yang didukung dengan sumber daya anggaran total alokasi anggaran sebesar **1,326,802,278,440** dan terdapat **efisiensi anggaran sebesar 37,7 Milyar** dari APBD II Kota Sukabumi Tahun 2025.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator sasaran strategis RJPMD Kota Sukabumi Tahun

2025-2029 yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025, dapat dipenuhi sesuai target dengan rata-rata tingkat capaian $\geq 91\%$ (lebih dari atau sama dengan Sembilan puluh satu) atau memiliki kinerja **Sangat Baik** Pemerintah Daerah Kota Sukabumi akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis, langkah-langkah inovatif dan sinergis seluruh sektor.

Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi **semakin meningkat** sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan reformasi birokrasi yang mendukung terwujudnya *Good Governance* di Kota Sukabumi.





KONTEN

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VIII

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

Puji dan syukur Kami panjatkan hanya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025”** ini. Penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025”** merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja.

“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025” disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024-2029 sebagaimana tertuang dalam



Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029. Secara substantif, **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025”** merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025”** ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wassalamualaikum warrahmatullaahi wabarakatuh

Sukabumi, 25 Maret 2026

WALIKOTA SUKABUMI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP.....	2
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.3.1. Aspek Geografis Kota Sukabumi	4
1.3.2. Aspek Demografis Kota Sukabumi	11
1.3.3. Aspek Daya Saing Daerah Kota Sukabumi.....	14
1.3.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	14
1.3.3.2 Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur	17
1.3.3.3 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).....	21
1.3.4. Aspek Pemerintahan Kota Sukabumi	23
1.4. ISU STRATEGIS	30
BAB II	32
2.1. RPJMD KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2029	32
2.1.1. Visi	35
2.1.2. Misi	38
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	53
BAB III	56
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	57



3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 59

3.2.1	Pencapaian IKU Tahun 2025	60
3.2.2	Perbandingan Capaian IKU 2025 dengan Target Tahun 2024	66
3.2.3	Perbandingan Capaian IKU 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2025-2029	71
3.2.4	Perbandingan Capaian IKU 2025 dengan Capaian Tingkat Provinsi & Nasional	76
3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 serta Solusi yang Telah dilakukan	81
3.2.5.1	Penjelasan Pencapaian IKU 1 : Indeks Pendidikan.....	82
3.2.5.2	Penjelasan Pencapaian IKU 2 : Usia Harapan Hidup .	88
3.2.5.3	Penjelasan Pencapaian IKU 3 : Tingkat Kemiskinan ..	94
3.2.5.4	Penjelasan Pencapaian IKU 4 : Tingkat Pengangguran Terbuka	98
3.2.5.5	Penjelasan Pencapaian IKU 6 : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas.....	104
3.2.5.6	Penjelasan Pencapaian IKU 7 : Indeks Warisan Budaya	109
3.2.5.7	Penjelasan Pencapaian IKU 8 : Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	113
3.2.5.8	Penjelasan Pencapaian IKU 9 : Indeks Kota Kreatif..	117
3.2.5.9	Penjelasan Pencapaian IKU 11 : Indeks Ketahanan Pangan.....	123



3.2.5.10	Penjelasan Pencapaian IKU 13 : Pertumbuhan Pendapat Asli Daerah (PAD)	130
3.2.5.11	Penjelasan Pencapaian IKU 14 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	135
3.2.5.12	Penjelasan Pencapaian IKU 15 : Indeks Risiko Bencana	145
3.2.5.13	Penjelasan Pencapaian IKU 16 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	154
3.2.5.14	Penjelasan Pencapaian IKU 17 & 18 : Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat.	158
3.2.5.15	Penjelasan Pencapaian IKU 19 : Indeks Inovasi Daerah	166
3.2.5.16	Penjelasan Pencapaian IKU 20 : Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General).....	173
3.2.5.17	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 serta Solusi yang Telah dilakukan.....	179
3.2.6	Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2025	190
3.2.7	Realisasi Anggaran Pemerintah Sukabumi Tahun 2025	195
BAB IV		202
4.1.	KESIMPULAN	202
4.2.	RENCANA TIDAK LANJUT	204



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Dataran Masing-masing Kecamatan di Daerah	4
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2025	12
Tabel 1.3	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2025	20
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi, per Desember 2025	28
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi, per Desember 2025	29
Tabel 2.1	Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2024-2029	42
Tabel 2.2	Logical Framework Pencapaian Tujuan Pertama ...	48
Tabel 2.3	Logical Framework Pencapaian Tujuan Kedua	49
Tabel 2.4	Logical Framework Pencapaian Tujuan Ketiga	50
Tabel 2.5	Logical Framework Pencapaian Tujuan Keempat ...	51
Tabel 2.6	Logical Framework Pencapaian Tujuan Kelima	52
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	55
Tabel 3.1	Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 (Awal Periode RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029)	62
Tabel 3.2	Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2024 .	67



Tabel 3.3	Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029)	73
Tabel 3.4	Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 serta Perbandingannya Terhadap Capaian Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2025	78
Tabel 3.5	Capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Sukabumi Tahun 2025	114
Tabel 3.6	Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi	124
Tabel 3.7	Capaian Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.	149
Tabel 3.8	Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	160
Tabel 3.9	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 serta Solusi yang Telah dilakukan	181
Tabel 3.10	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja Tahun 2025	183
Tabel 3.11	Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2025	192
Tabel 3.12	Analisis Realisasi Anggaran dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2025	196



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Luas Wilayah Daerah Menurut Kecamatan	5
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kota Sukabumi.....	6
Gambar 1.3	Peta Topografi Kota Sukabumi	7
Gambar 1.4	Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi	8
Gambar 1.5	Peta Geologi Kota Sukabumi	9
Gambar 1.6	Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Sukabumi	10
Gambar 1.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi	16
Gambar 1.8	Fasilitas Umum di Kota Sukabumi.....	19
Gambar 2.1	Sinkronisasi Misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi	40
Gambar 3.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2025	82
Gambar 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Usia Harapan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2025	88
Gambar 3.3	Grafik Angka Kematian Ibu di Kota Sukabumi tahun 2021 – 2025	92
Gambar 3.4	Grafik Angka Kematian Bayi di Kota Sukabumi tahun 2021 – 2025.....	93
Gambar 3.5	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Tingkat Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2025 .	94
Gambar 3.6	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 : Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sukabumi Tahun 2025	98



Gambar 3.7	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kota Sukabumi Tahun 2025	104
Gambar 3.8	Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPKKU) Kota Sukabumi Tahun 2025	105
Gambar 3.9	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 : Indeks Warisan Budaya Kota Sukabumi Tahun 2025.....	109
Gambar 3.10	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 : Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Sukabumi Tahun 2025	113
Gambar 3.11	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 : Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2025.....	117
Gambar 3.12	Nilai Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2025	119
Gambar 3.13	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 : Indeks Kota Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2025	123
Gambar 3.14	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 13 : Pertumbuhan Pendapatapan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi Tahun 2025	130
Gambar 3.15	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 : Pertumbuhan Pendapatapan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi Tahun 2025	135
Gambar 3.16	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 15 : Indeks Resiko Bencana Kota Sukabumi Tahun 2025	145
Gambar 3.17	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 16 : Indeks SPBE Kota Sukabumi Tahun 2025	154
Gambar 3.18	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Sukabumi yang Dirinci Berdasarkan Domain dan Aspek Penilaian Indeks SPBE	155
Gambar 3.19	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 : Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi Tahun 2025	158
Gambar 3.20	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 18 : Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2025	162



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Gambar 3.21 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 19 : Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025	167
Gambar 3.22 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 20 : Indeks Reformasi Birokrasi General Kota Sukabumi Tahun 2025	173
Gambar 3.23 Nilai Sementara Indeks RB General Kota Sukabumi Tahun 2025	175

LAMPIRAN





BAB I

Pendahuluan

KONTEN

BAB I	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP	2
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.4. ISU STRATEGIS	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, wajib menyelenggarakan ke pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan ke pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP di Kota Sukabumi didasarkan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).



Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Sukabumi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Kota Sukabumi Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP

Maksud dari penyusunan LKIP Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kota Sukabumi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sarana bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;



3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis; dan
5. Mendorong Pemerintah Kota Sukabumi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Gambaran umum organisasi yaitu dalam hal ini Kota Sukabumi dijelaskan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografis, aspek demografis, aspek daya saing daerah dan aspek pemerintahan, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek geografis menggambarkan luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan;
2. Aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu;
3. Aspek daya saing daerah menggambarkan potensi strategis yang dimiliki Kota Sukabumi; dan
4. Aspek pemerintahan menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi.



1.3.1. ASPEK GEOGRAFIS KOTA SUKABUMI

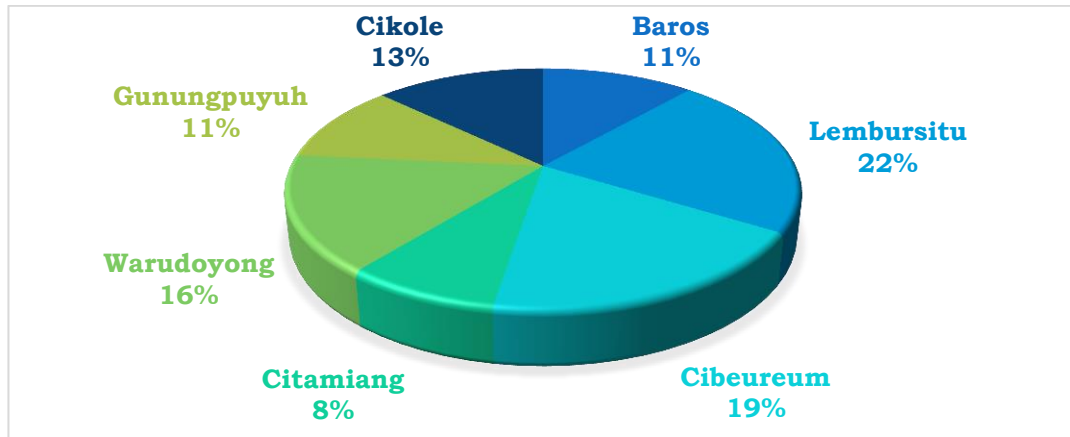
Wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum. Dengan demikian, wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 1.1 sedangkan persentase luas wilayah Daerah per kecamatan disajikan pada Gambar 1.1.

Tabel 1.1.
Luas Dataran Masing-masing Kecamatan di Daerah

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)
1	Baros	5,583
2	Lembursitu	10,692
3	Cibeureum	9,122
4	Citamiang	4,004
5	Warudoyong	7,563
6	Gunungpuyuh	5,151
7	Cikole	6,216
Luas Total		48,332

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2025, BPS





Gambar 1.1
Persentase Luas Wilayah Daerah Menurut Kecamatan
(Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2025, BPS)

Kota Sukabumi terletak pada posisi 106°45'50" Bujur Timur - 106°45'10" Bujur Timur dan 6°50'44" Lintang Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

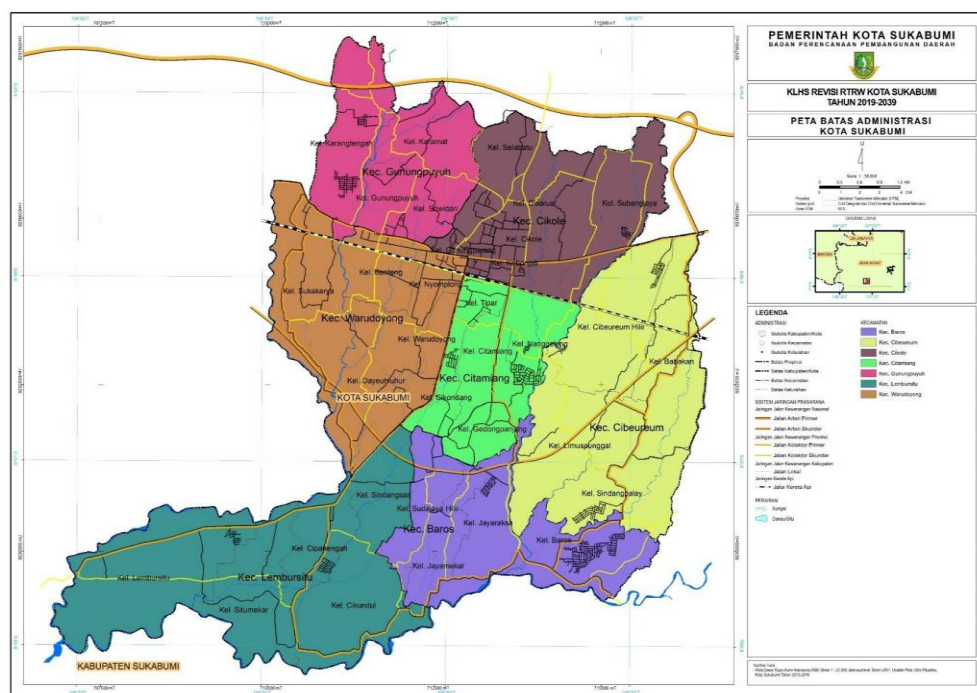
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi; dan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Jarak terjauh dari Balai Kota Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 (tujuh) kilometer.

Kota Sukabumi berjarak 120 (seratus dua puluh) kilometer dari Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta atau 96 (sembilan puluh enam) kilometer dari Ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung. **Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut.** Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibu Kota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai,



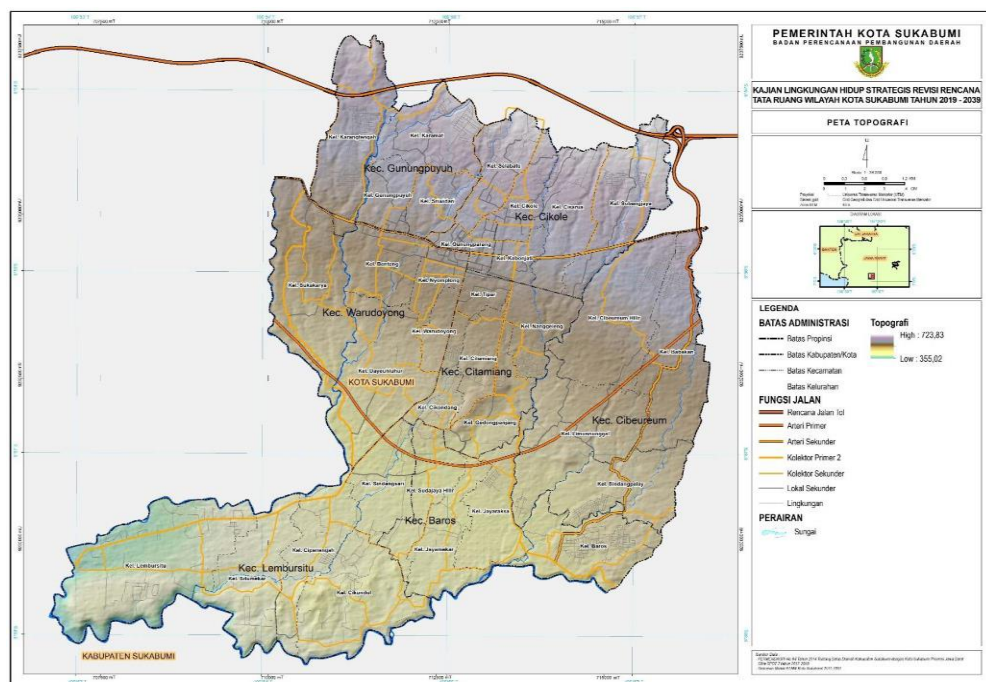
menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja. Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kota Sukabumi, karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik dari sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya. Peta administrasi wilayah Kota Sukabumi disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2
Peta Administrasi Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2025)

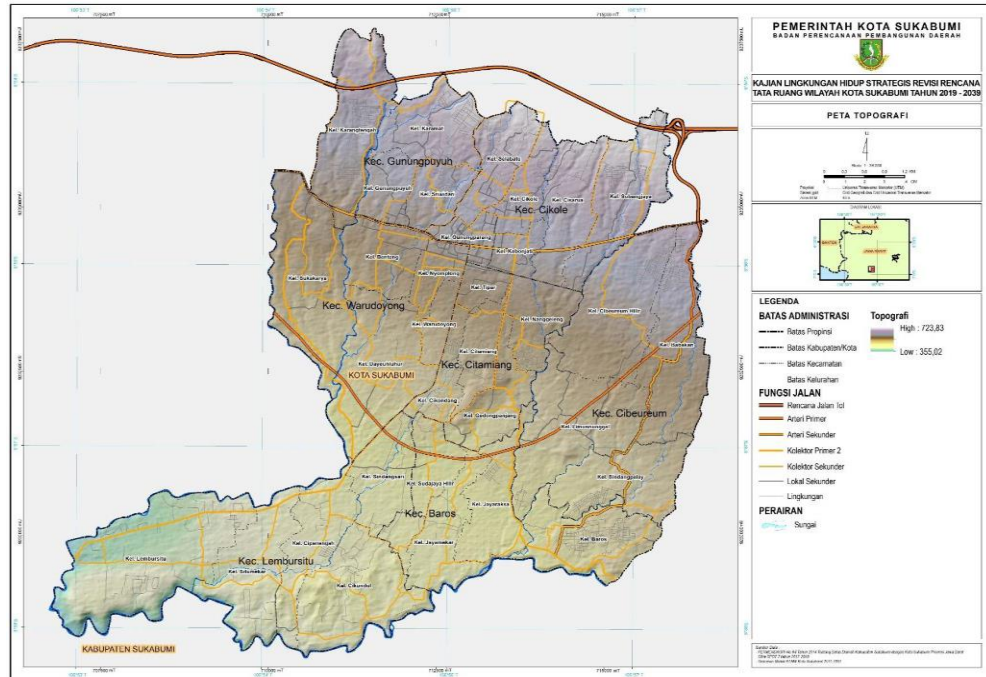
Kota Sukabumi merupakan dataran rendah yang terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter di atas permukaan laut dengan bentuk bentang alam yang relatif datar sampai bergelombang dengan kemiringan lahan (lereng) diperkirakan relatif beragam. Secara morfologi, Kota Sukabumi dapat dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi, yaitu morfologi

daratan dengan elevasi 385–600 mdpl, morfologi medan bergelombang dengan elevasi 350–975 mdpl, morfologi pegunungan ber-relief sedang dengan elevasi 375–975 mdpl, dan pegunungan ber-relief kasar dengan elevasi 375–900 mdpl. Dari kelima satuan tersebut, sebagian besar morfologi daerah Kota Sukabumi berupa **medan bergelombang**. Adapun kondisi topografi dan kemiringan lereng di wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4 berikut.



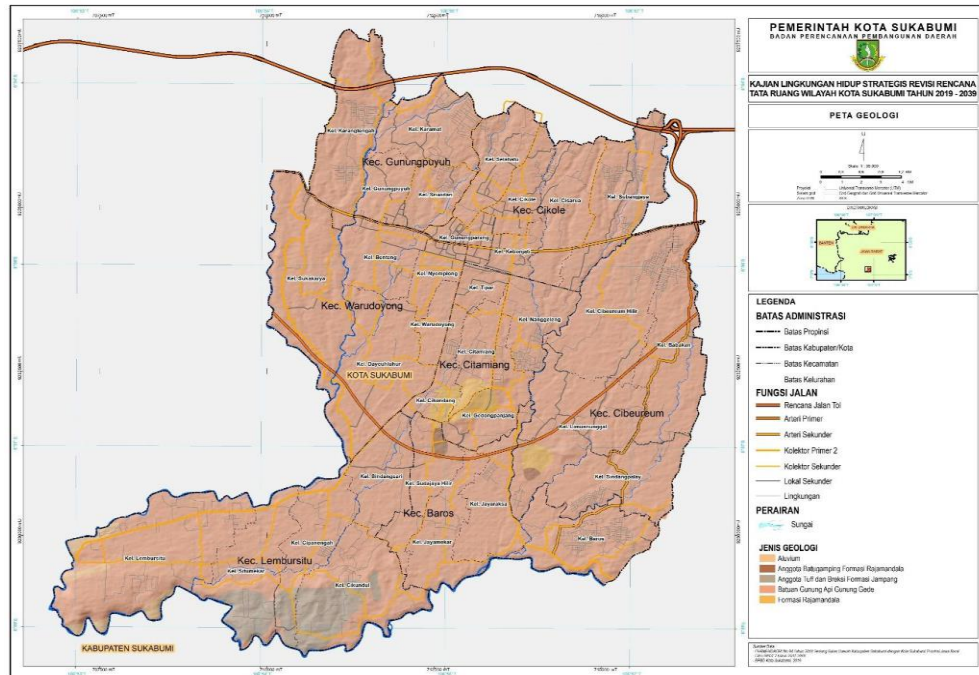
Gambar 1.3
Peta Topografi Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2025)





Gambar 1.4
Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2025)

Ditinjau dari aspek geologis, susunan litologi batuan di Kota Sukabumi dan sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari formasi walat berumur oligosen awal yang merupakan satuan tertua yang dapat dijumpai di daerah ini. Formasi walat ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari oligosen akhir sampai miosen awal. Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur miosen awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi. Adapun Peta Geologi Kota Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 1.5.

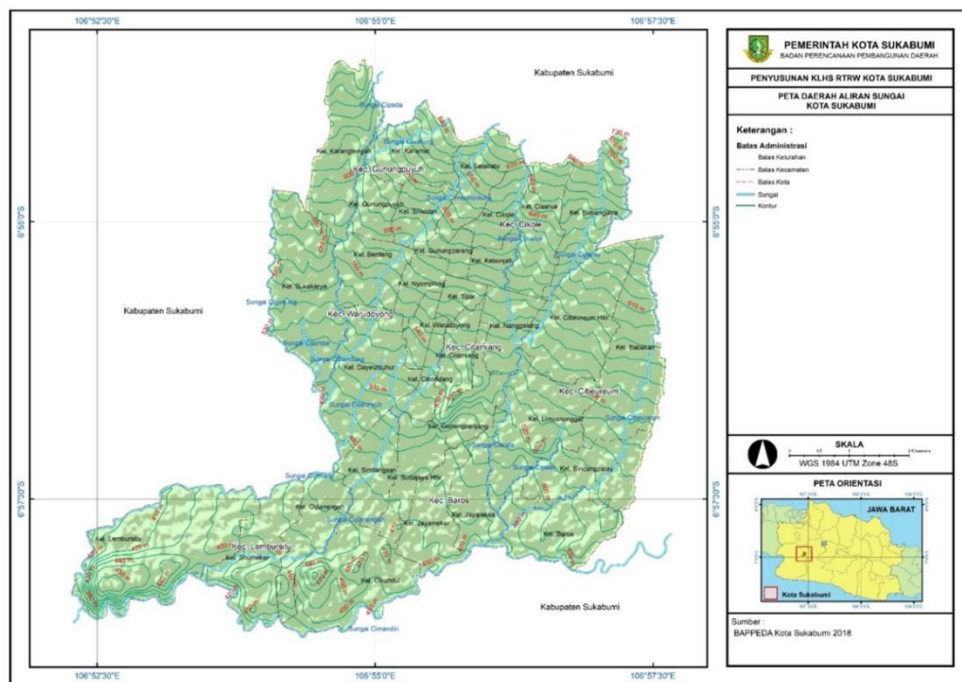


Gambar 1.5
Peta Geologi Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2025)

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, wilayah Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh **iklim tropika khatulistiwa**. Suhu udara rata-rata di wilayah Kota Sukabumi berkisar antara **26°C–28°C**. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Kota Sukabumi menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Nilai intensitas curah hujan harian maksimal sebesar 76 (tujuh puluh enam) mm dan curah hujan tahunan sebesar 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) mm. Jumlah bulan kering berkisar 1-2 bulan per tahun, namun mendapat pengaruh hujan orografis di sepanjang sungai merupakan perbukitan dan dataran bergelombang. Menurut *Schmidt Ferguson*, ciri-ciri iklim tersebut digolongkan sebagai iklim basah Tipe Af. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada musim bulan Agustus.



Sedangkan ditinjau dari sisi hidrologi, kondisi air permukaan maupun air tanah atau *groundwater* baik dari sisi pergerakan, distribusi, maupun kualitasnya di Kota Sukabumi sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sukabumi. Daerah Aliran Sungai atau DAS dan sungai-sungai yang melewati wilayah Kota Sukabumi disajikan pada Gambar 1.6 berikut ini.



Gambar 1.6
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2025)

Aspek Strategis : Secara administratif, wilayahnya relatif tidak begitu luas, iklim tropika khatulistiwa (26-28°C) dan jarak dengan pusat provinsi dan Ibu Kota Negara yang dekat membuat tingginya pergerakan barang dan orang disertai dengan desain wilayah bermedan yang tidak terlalu bergelombang cukup menjanjikan untuk menarik investor/modal.



Strategic Issued : peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada jenis layanan administrasi kewilayahan yang mendukung terhadap peningkatan akses kependudukan masyarakat yang masih perlu mendapatkan perhatian.

1.3.2. ASPEK DEMOGRAFIS KOTA SUKABUMI

Letak Kota Sukabumi sangat strategis karena berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, sehingga menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada semester 1 (satu) tahun 2025 adalah **373.189** (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan) jiwa yang terdiri atas **187.646** (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam) jiwa penduduk laki-laki atau sebesar **50,28%** (Lima Puluh koma Dua Delapan Persen) dan **185.543** (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) jiwa penduduk perempuan atau sebesar **49,72%** (Empat puluh Sembilan koma Tujuh Dua persen). Jumlah ini sebanding dengan luas wilayah yang telah disampaikan pada data geografis diatas, Kecamatan Lembursitu yang memiliki luas wilayah 10.692 (Sepuluh ribu enam ratus Sembilan puluh dua) Km² memiliki jumlah penduduk 44.626 (Empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam) jiwa berbanding terbalik dengan Kecamatan Citamiang dengan luas wilayah 4.004 (Empat ribu empat) Km² memiliki jumlah penduduk 56.784 (Lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) jiwa. Jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan tingkat kepadatan Penduduk



per Kecamatan di Kota Sukabumi tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2025

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribu)			Analisis Dasar		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	LPP	Kepadatan
1	Baros	20.706	20.285	40.991	102,08	0,25	7.342
2	Lembursitu	22.355	22.271	44.626	100,38	0.58	4.173
3	Cibeureum	24.222	23.663	47.885	102,36	0.43	5.429
4	Citamiang	28.473	28.311	56.784	100,57	0.30	14.181
5	Warudoyong	32.214	31.292	63.506	102,95	0.57	8.396
6	Gunungpuyuh	26.017	25.529	51.546	101,91	0.26	10.006
7	Cikole	33.659	34.192	67.851	98,44	0.49	10.915
Tahun 2025		187.646	185.543	373.189	101.13	0.42	7.721
Tahun 2024		183.757	181.978	365.735	101.98	1,46	7.570
Tahun 2023		183.332	181.580	364.912	100,96	1,69	7.550
Tahun 2022		180.141	178.713	358.854	100,80	1,48	7.425
Tahun 2021		177.449	176.182	353.631	100,72	1,21	7.317
Tahun 2020		176.539	174.920	351.459	100,93	1,44	7.114
Tahun 2019		175.391	173.554	348.945	101,06	0,73	6.929
Tahun 2018		173.376	171.421	344.797	101,14	0,77	6.919

*Sumber: Data Agregat Penduduk Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB)
Disdukcapil Kota Sukabumi, 2025*

Dari Tabel 1.2 diatas, berdasarkan data diatas tampak bahwa jumlah penduduk Kota Sukabumi mengalami **kenaikan 2,03% (7.454 jiwa)** pada semester 1 tahun 2025 dibandingkan dengan data tahun 2024 dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cikole yang berbanding lurus dengan rasio jenis kelamin dan LPP terkecil. Berbanding terbalik dengan Kecamatan Warudoyong yang menunjukkan tren kenaikan jumlah



penduduk dengan rasio jenis kelamin dan LPP terbesar di semester 1 tahun 2025. Hal ini terjadi karena adanya migrasi penduduk Kota Sukabumi yang mulai mengisi wilayah barat Sukabumi yakni Kecamatan Warudoyong.

Analisis kependudukan berdasarkan rasio jenis kelamin menunjukkan penurunan **0,85** dari tahun 2024 dengan angka **101,98** (dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan). Rasio tertinggi terdapat pada tahun 2024 dan terendah di tahun 2021. Kecamatan Cikole menunjukkan nilai terendah yakni 98,44 dan tertinggi di Kecamatan Warudoyong yakni 102.95. Data ini sejalan dengan analisis laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kota Sukabumi turun pada semester 1 tahun 2025 dan menunjukkan angka **0,42**. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Lembursitu yakni 0,58 dan terendah ada di Kecamatan Baros yakni **0,25**.

Efek lain penambahan jumlah penduduk adalah tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Kota Sukabumi Tahun 2025 mencapai **7,721 jiwa/km²** dan merupakan angka tertinggi sejak 2020. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Citamiang yakni 14.181 jiwa/km² dan terendah ada di Kecamatan Lembursitu yakni 4.173 jiwa/km². Hal ini sebanding dengan perbedaan luas wilayah kedua kecamatan tersebut, luas wilayah Kecamatan Lembursitu yang merupakan 2 kali lipat dari Kecamatan Citamiang.

Aspek Strategis : Secara administratif, wilayahnya relatif tidak begitu luas, iklim tropika khatulistiwa (26-28°C) dan jarak dengan pusat provinsi dan Ibu Kota Negara yang dekat membuat tingginya pergerakan barang dan orang disertai dengan desain wilayah bermedan yang tidak terlalu bergelombang cukup menjanjikan untuk menarik investor/modal.



Strategic Issued : peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada jenis layanan administrasi kewilayahan yang mendukung terhadap peningkatan akses kependudukan masyarakat yang masih perlu mendapatkan perhatian & Perbaikan Infrastruktur.

1.3.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH KOTA SUKABUMI

Aspek daya saing daerah kota Sukabumi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

1.3.3.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah (*region*) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (tahun dasar 2010).

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu



sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Berdasarkan data dari BPS Kota Sukabumi dalam Laporan **“Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2025”**, data PDRB Kota Sukabumi yang disajikan adalah PDRB dari sisi produksi atau juga dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha, yang diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah seluruh lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian. Berikut adalah data-data umum terkait PDRB Kota Sukabumi yang bisa dijadikan dasar analisis :

- ❖ Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2025 **tumbuh 5,32** (Lima Koma Tiga Puluh Dua Persen) dengan kontribusi kenaikan terbesar pada sektor transportasi dan pergudangan dengan andil 0,76%. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah merupakan penyumbang andil pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha.
- ❖ Pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar 0,55% (Nol koma lima lima) persen memberikan andil pertumbuhan paling dominan dari sisi pengeluaran tahun 2025.
- ❖ Perekonomian Kota Sukabumi Tahun 2025 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga yang berlaku



mencapai **17,66 Triliun Rupiah** dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai **10,30 Triliun Rupiah**, **PDRB Per Kapita (ADHB)** mencapai **44,76 Juta**.

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	3,43	3,46	3,56	3,62	3,69
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	5,04	4,96	4,90	4,87	4,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
F	Konstruksi/Construction	6,83	6,65	6,79	6,79	6,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	37,86	38,12	37,59	36,83	36,42
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	10,66	10,86	11,49	11,78	12,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	2,95	3,08	3,15	3,26	3,32
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	4,26	4,15	4,08	3,99	4,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	11,66	11,45	11,21	11,67	11,11
L	Real Estat/Real Estate Activities	1,17	1,19	1,17	1,18	1,18
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1,75	1,80	1,82	1,81	1,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	4,47	4,09	3,91	3,72	3,51
P	Jasa Pendidikan/Education	4,48	4,51	4,53	4,60	4,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,96	2,00	2,01	1,99	2,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	3,10	3,33	3,46	3,56	3,77
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 1.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi
(Sumber: BPS : Kota Sukabumi Dalam Angka 2025)



Aspek Strategis : Berdasarkan kemampuan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB Tahun 2025, didapatkan hasil yang sangat baik dibandingkan dengan tahun 2024, ada kenaikan pada PDRB dan laju pertumbuhannya terutama pada 3 sektor penting (perdagangan, jasa keuangan dan transportasi/pergudangan), maka hal ini menunjukkan Kota Sukabumi sangat strategis untuk menarik minat investor untuk membuka lahan pekerjaan baru.

Strategic Issued : sebagai upaya untuk meningkatkan PDRB yang berdampak terhadap Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi, maka harus mampu mempersiapkan Pendidikan yang berkualitas (terutama lama sekolah), penyediaan lahan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi berupa penanaman modal asing/lokal terutama pada 3 sektor utama (perdagangan, jasa keuangan dan transportasi/pergudangan) yang menunjukkan daya saing ekonomi Kota Sukabumi.

1.3.3.2 FASILITAS WILAYAH ATAU INFRASTRUKTUR

Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang sangat besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan ***tersedianya fasilitas jalan***. Terus membaiknya perekonomian, baik domestik maupun global, serta positifnya prospek perekonomian daerah ke depan, mendorong semakin besarnya peluang investasi yang dapat masuk ke Kota Sukabumi.

Namun demikian peluang tersebut harus didukung pula oleh penciptaan situasi dan kondisi Kota Sukabumi yang kondusif bagi investasi sebagai pendorong



pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi yang positif dapat dilihat dari **tingkat keamanan** dan ketertiban yang ada serta **kemudahan regulasi**. Tingkat keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari upaya penanggulangan pelanggaran perda dan unjuk rasa yang mencapai 100 % (seratus persen), artinya walaupun terdapat pelanggaran perda dan unjuk rasa, pemerintah Kota Sukabumi dapat menanggulangi sehingga kondusifitas tetap terjaga. Dari sisi regulasi, terdapat 8 (delapan) buah perda yang mendukung investasi serta tersedia 38 (tiga puluh delapan) layanan perizinan dan 3 (tiga) layanan non perizinan, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP.

Aspek penting lain yang menunjukkan daya saing suatu daerah adalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkotaan karena infrastruktur adalah suatu sarana yang mendukung perkembangan suatu kota, baik perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Salah satu manfaat infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian suatu kota. Kota yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur agar ekonomi daerah tersebut berkembang. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan. Panjang jalan dapat



menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan. Berikut ini adalah data umum infrastruktur di Kota Sukabumi :

- ❖ Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan negara di Kota Sukabumi pada tahun 2023 mencapai 8,80 Km, panjang jalan provinsi mencapai 37,74 Km, sementara panjang jalan Kota Sukabumi mencapai **115,74 Km**.
- ❖ Rincian kondisi jalan di Kota Sukabumi : sepanjang 36,99 Km memiliki kondisi jalan baik, sepanjang 60,86 Km memiliki kondisi jalan sedang, sepanjang 12,88 Km memiliki kondisi jalan rusak serta sepanjang 5,03 Km memiliki kondisi jalan rusak berat.





Gambar 1.8
Fasilitas Umum di Kota Sukabumi
(Sumber: BPS : Kota Sukabumi Dalam Angka 2025)

Aspek Strategis : secara kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada di Kota Sukabumi telah sangat baik dan lengkap. Dengan melihat Panjang jalan yang masih tinggi, tentu masih memerlukan pengembangan, perbaikan dan pengelolaan agar tetap terjaga kualitasnya untuk mendukung pembangunan di Kota Sukabumi.

Strategic Issued : peningkatan dukungan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan di Kota Sukabumi.

1.3.3.3 KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Salah satu kunci utama dalam menciptakan daya saing daerah adalah kualitas Sumber Daya Manusia atau SDM yang dapat dilihat dari indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 (enam puluh lima) tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kota Sukabumi Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Sukabumi
Tahun 2018 – 2025

No.	Tahun	Nilai Rasio Ketergantungan
1	2018	45,95
2	2019	48,16
3	2020	46,53
4	2021	46,40
5	2022	44,93
6	2023	47,00
7	2024	46,15
8	2025	44,96

Sumber: Data Agregat Penduduk Berdasarkan DKB 2018-2025, Disdukcapil diolah, 2025



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Sukabumi paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dimana rasio ketergantungan penduduk mencapai 48,16 (empat puluh delapan koma enam belas) dan terendah pada tahun 2024 dengan mencapai **46,15** (Empat puluh Enam koma lima belas) yang artinya setiap 100 (seratus) orang produktif menanggung 46-47 (empat puluh enam sampai empat puluh tujuh) orang yang tidak produktif. Data Kualitas SDM lainnya di antaranya :

- ❖ **98,21%** penduduk Kota Sukabumi yang Wajib KTP telah memiliki KTP.
- ❖ **99,20%** angka melek huruf pada usia diatas 45 tahun.
- ❖ Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang Pendidikan SD/MI 99,98%, SMP/MTS 82,96% dan SMA/MA 72,50% mengalami kenaikan rata-rata **1,5-2,0%**.
- ❖ Angka partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang Pendidikan SD/MI 105,05%, SMP/MTS 87,65% dan SMA/MA 72,50% mengalami kenaikan rata-rata **1,10-1,58%**.
- ❖ Sebaran agama di Kota Sukabumi : **Islam 96,55%**, Kristen Protestan 1,95%, Kristen Katolik 0,85%, Hindu 0,008%, Budha 0,64%, Konghucu 0,001% dan Aliran Kepercayaan 0,002%.
- ❖ Sebaran usia yang telah selesai menempuh jenjang Pendidikan di Kota Sukabumi, SD/MI 19,47%, SMP/MTs 14,44%, **SMA/MA 25,77%**, D3 2,09% dan S1 5,66%.
- ❖ Sebaran jenis pekerjaan aktif di Kota Sukabumi, **karyawan swasta 11,24%**, Buruh Harian Lepas 10,58%,



PNS/TNI/Polri/Pensiunan 3,75% dan Petani/ternak 0,36%.

Aspek Strategis : dengan rasio ketergantungan penduduk diangka 44,96, maka setiap 100 orang produktif menanggung 45 orang. Potensi SDM yang ada cukup beragam dengan sebaran pada karyawan swasta, lulusan SMA, beragama Islam dan mampu membaca menulis dengan baik.

Strategic Issued : Peningkatan kualitas SDM, ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan/kesejahteraan masyarakat terlebih dalam masa pemulihan sosial ekonomi, agar sektor usaha industri, pertokoan, jasa wisata, hotel dan kuliner bisa menyerap kembali potensi sebaran tenaga kerja yang ada.

1.3.4. ASPEK PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kota Sukabumi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan wajib, baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar, serta urusan pilihan.

Urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi terdiri dari **6 (enam)** urusan yaitu:

1. Urusan pendidikan;
2. Urusan kesehatan;
3. Urusan pekerjaan umum dan tata ruang;



4. Urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Urusan sosial.

Sedangkan **urusan wajib non pelayanan dasar** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi terdiri dari **17** (tujuh belas) urusan yaitu:

1. Urusan lingkungan hidup;
2. Urusan kepemudaan dan olah raga;
3. Urusan penanaman modal;
4. Urusan koperasi dan UKM;
5. Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
6. Urusan tenaga kerja;
7. Urusan pangan;
8. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau KB;
10. Urusan perhubungan;
11. Urusan komunikasi dan informatika;
12. Urusan pertanahan;
13. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Urusan budaya;
15. Urusan statistik;
16. Urusan kearsipan; dan
17. Urusan perpustakaan.

Adapun **urusan pilihan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, terdapat **6** (enam) urusan, yaitu:

1. Kelautan dan Perikanan,
2. Pariwisata,
3. Pertanian,
4. Perdagangan,



5. Perindustrian, dan
6. Transmigrasi.

Sehingga total terdapat **29 (dua puluh sembilan) urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dibentuk perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD tipe B;
3. Inspektorat tipe B;
4. Dinas, terdiri dari:
 - a. Dinas tipe A, yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - 3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
 - b. Dinas tipe B, yaitu:
 - 1) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk



- dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - 4) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - 5) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 8) Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
 - 9) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

c. Dinas tipe C, yaitu:



- 1) Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 2) Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 3) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - 4) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
5. Badan, terdiri dari :
- a. Badan tipe A, yaitu:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - b. Badan tipe B, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan bencana;
 - c. Badan tipe C, yaitu:
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 2 (dua) bidang, yaitu badan kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Kecamatan terdiri dari :
- a. kecamatan tipe A, yaitu Kecamatan Cikole.
 - b. kecamatan tipe B, yaitu :



- 1) Kecamatan Warudoyong;
- 2) Kecamatan Lembursitu;
- 3) Kecamatan Gunung Puyuh;
- 4) Kecamatan Citamiang;
- 5) Kecamatan Baros; dan
- 6) Kecamatan Cibeureum.

Salah satu hal mendasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, sampai dengan Bulan Desember tahun 2025 dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi, per Desember 2025

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional	762	1.573	2.335
Pelaksana	490	282	772
Struktural			
Eselon V	0	0	0
Eselon IV	205	163	368
Eselon III	82	37	119
Eselon II	23	6	29
Eselon I	0	0	0
Jumlah	1.562	2.061	3.623

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, diolah 2025



Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan
Jenis Kelamin di Kota Sukabumi, per Desember 2025

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	25	1	26
SMP/Sederajat	21	3	24
SMA/Sederajat	179	49	228
Diploma I, II/Akta I, II	8	3	12
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	125	291	416
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D.	1.202	1.713	2.915
Jumlah	1.562	2.061	3.623

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, diolah 2025

Tabel 1.6
Perbandingan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di
Kota Sukabumi, dengan tahun sebelumnya

Jabatan	2025	2024
Fungsional	2.335	2.382
Pelaksana	772	761
Eselon V	0	0
Eselon IV	368	147
Eselon III	119	34
Eselon II	29	6
Eselon I	0	0
Jumlah	3.623	3.639

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, diolah 2025



- ❖ Terdapat 2.770 orang PNS dan 853 orang PPPK sehingga total ada **3.623** orang ASN di Pemerintah Kota Sukabumi.
- ❖ Jumlah PNS Kota Sukabumi tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak **0.43% (16 orang)** dibandingkan dengan tahun 2024, hal tersebut disebabkan karena jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding dengan penerimaan CASN.
- ❖ Sebaran PNS berdasarkan tingkat kepangkatan menunjukkan data Golongan I (0,21%), Golongan II (9,15%), Golongan III (67,10%) dan Golongan IV (23,18%).
- ❖ Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melaksanakan 29 urusan pemerintahan : 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan yang dikerjakan oleh 31 perangkat daerah yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, 1 Inspektorat, 3 Dinas Tipe A, 9 Dinas Tipe B, 4 Dinas tipe C, 2 Badan Tipe A, 1 Badan Tipe B, 3 Badan Tipe C dan 7 Kecamatan.

Aspek Strategis : dengan potensi organisasi dan SDM PNS yang ada, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi memiliki potensi SDM PNS yang berkualitas dengan sebaran tingkat kepangkatan pada golongan III dan jenjang Pendidikan di level Sarjana. Hal ini menjadi kekuatan internal yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Strategic Issued : Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di Kota Sukabumi dengan adanya peningkatan kinerja, pelayanan publik dan pengembangan kesempatan inovasi. Sedangkan dari aspek SDM adalah efek penyederhanaan organisasi dan perubahan jabatan fungsional yang berdampak pada mutasi dan rotasi pegawai, serta kebijakan CPNS/PPPK/PPPK Paruh Waktu bagi tenaga THL/TKS.



1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau **kejadian penting** atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah, dan KLHS. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan **akseptabilitas prioritas** pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan aspek strategis dan *Strategic Issued* yang telah diuraikan diatas yang dikombinasikan dengan perumusan isu strategis yang telah dilaksanakan dan dimuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) isu strategis Daerah yang teridentifikasi, yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi;
2. Masyarakat inklusif, berbudaya, dan religius;



3. Ekonomi kreatif dan perluasan lapangan kerja;
4. Lingkungan dan infrastruktur perkotaan; dan
5. Tata kelola pemerintahan berkualitas.





BAB II

Perencanaan Kinerja

KONTEN

- | | | |
|------|-----------------------------------|------------------------------|
| 2.1. | RPD KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026 | 32 |
| 2.2. | PERJANJIAN KINERJA | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RJMD KOTA SUKABUMI TAHUN 2025-2029

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem perencanaan pembangunan nasional itu sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai



tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, visi dan misi Wali Kota terpilih harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah masa bakti 2025-2029 yaitu **Bpk. Ayep Zaki** dan **Bpk. Bobby Maulana** yang dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Sukabumi pada tanggal 20 Februari 2025. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 yang saat ini memasuki fase pertama, memperhatikan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan Daerah yang harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, *top down*, dan *bottom up* secara holistik-tematik, integratif serta memperhatikan aspek spasial. Selain itu penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara kolaborasi antara pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan



Pentahelix – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*) dan kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Dana Masyarakat atau Umat, dan CSR.

Alur penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. penjabaran pelaksanaan RPJPD periode atau tahap pertama;
3. perwujudan dari rencana tata ruang wilayah Daerah tahun 2011-2031;
4. pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah;
5. pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
6. instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Wali Kota dan kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
7. instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.



Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi.

2.1.1 VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Sukabumi. Visi pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan Kota Sukabumi dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Sukabumi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi, adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang
Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis”**

Penjelasan visi diatas adalah sebagai berikut:

1. Inovatif

menekankan pentingnya kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- Terintegrasikannya teknologi terbaru dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik;
- Diadopsinya metode baru untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan;



- Berkembangnya ide-ide baru dari semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat untuk solusi yang lebih baik;
- Tersedianya pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam teknologi dan inovasi;
- Terciptanya lingkungan yang mendukung pengembangan produk, layanan, atau teknologi baru yang inovatif dan usaha kecil dengan berbagai akses ke sumber daya dan teknologi; dan
- Terjalinnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian dalam pengembangan solusi baru untuk masalah lokal.

2. Mandiri

berfokus pada kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- Meningkatnya kewirausahaan lokal dan ekonomi kreatif;
- Terkelolanya sumber daya alam dan manusia secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang tanpa mengandalkan bantuan eksternal;
- Tersedianya pelatihan keterampilan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah secara mandiri; dan
- Terfasilitasnya masyarakat untuk mengatasi tantangan secara efektif tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

3. Agamis

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Kondisi ini akan tergambar dengan:



- Disusunnya berbagai kebijakan yang sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat;
- Diterapkannya prinsip-prinsip etika dan moral yang diambil dari ajaran agama dalam tindakan dan keputusan pemerintah;
- Dijaminnya kebebasan beragama dan terjaganya kerukunan antar umat beragama;
- Terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas ibadah serta terdukungnya kegiatan keagamaan yang positif; dan
- Berkembangnya perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dalam interaksi sosial dan pelayanan publik.

4. Nasionalis

berfokus pada cinta tanah air dan kepentingan nasional. Kondisi ini tergambar dengan:

- Ditematkannya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- Tergalangnya semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat untuk memperkuat identitas nasional;
- Dipertahankannya dan dipromosikannya budaya serta tradisi lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional; dan
- Teredukasinya masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Korelasi antara Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi dengan Visi Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 terletak pada masing-masing aspek yang saling melengkapi dan memperkuat. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota **“Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis”** mendukung pencapaian visi jangka panjang **“Kota Sukabumi Kreatif, Unggul, Berbudaya, dan Berkelanjutan”**.



2.1.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi untuk mencapai Visi **“Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis”** adalah:

1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi bertujuan untuk mempersiapkan warga kota dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mempromosikan kesempatan kerja yang lebih baik. Adapun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga kota mendapatkan akses yang efektif, efisien, dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.

2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum

Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan penuh rasa saling menghargai. Sikap saling menghargai dengan mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat tersebut akan memperkuat kohesi dan integrasi sosial. Hal ini didukung dengan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menjaga kondusif kota dan juga untuk menjaga iklim investasi.



3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata

Pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk memanfaatkan potensi kreativitas dan inovasi dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing kota. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari pengembangan pariwisata yang lebih diarahkan pada industri MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions*).

4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik

Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditujukan agar prinsip keberlanjutan menjadi arus utama dalam pembangunan mengingat ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin nyata terjadi. Sementara itu, pengembangan infrastruktur ditujukan agar masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan dasar serta peluang untuk pengembangan kehidupan yang lebih baik.

5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas

Penguatan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan didukung aparatur yang profesional, birokrasi yang transparan dan akuntabel, sistem pemerintahan berbasis digital, dan tata kelola yang inovatif.

Kelima misi di atas adalah rumusan upaya yang akan dijalankan dalam mencapai Visi RPJMD. Misi RPJMD tersebut juga mempunyai korelasi dengan misi RPJPD yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian maka sebenarnya seluruh upaya yang nantinya akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai keselarasan dan keterhubungan sehingga diharapkan dapat saling mendukung dalam mewujudkan



Visi RPJPD maupun RPJMD. Keselarasan misi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1

Sinkronisasi Misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota kemudian dijabarkan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta isu-isu strategis pembangunan daerah. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang



diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang akan dicapai atau diubah dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, penjabaran visi dan misi Perubahan RPJMD terdiri dari 5 (lima) tujuan dengan 5 (lima) indikator tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini :



Tabel 2.1

Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA SUKABUMI YANG INOVATIF, MANDIRI, AGAMIS, DAN NASIONALIS										
1	MISI 1 : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETERAMPILAN MASYARAKAT BERBASIS VOKASI SERTA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT									
1.1	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,69	78,19	78,31	79,82	80,58	81,36	82,17
1.1.1	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Indeks Pendidikan	Poin	72,43	73,63	74,41	75,19	75,98	76,76	77,54
1.1.2	Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,11	75,31	75,52	75,73	75,94	76,15	76,36



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

1.1.3	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,20	6,36 - 7,02	5,99 - 6,40	5,19 - 5,87	4,23 - 5,06	3,11 - 4,19	2,72 - 3,72
1.1.4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,34	7,84 - 8,54	8	7,11 - 7,63	7,05 - 7,67	6,98 - 7,71	6,88 - 7,37
2	MISI 2 : PENGAMALAN NILAI NILAI AGAMA, SOSIAL, BUDAYA, DAN MEMPERKUAT TOLERANSI, KETENTERAMAN SERTA KETERTIBAN UMUM									
2.1	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif	Indeks Rasa Aman	Poin	75,40	77,43	77,98	78,53	79,08	79,63	80,18
2.1.1	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78,16	79,00	79,27	79,55	79,82	80,09	80,36
2.1.2	Terwujudnya masyarakat kota	Indeks Penyelenggaraan	Poin	75	76	77	78	79	80	81



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	yang tertanam dan tertib	Trantibumlinmas								
2.1.3	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya	Poin	38,85	38,85	38,95	39,05	39,15	39,25	39,35
2.1.4	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	56,5	60,1	61,5	62,8	64,1	65,3	66,4
3	MISI 3 : PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA									
3.1	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	PDRB Per Kapita	Juta Rp	44,76	45,29 - 45,65	50,38 - 51,02	54,02 - 55,77	57,92 - 60,72	62,09 - 66,24	66,78 - 72,99
3.1.1	Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Indeks Kota Kreatif	Poin	87,86	87,86	88,53	89,21	89,88	90,56	91,23
	Berkembangnya industri pariwisata MICE (Meeting, Incentives, Conventions,	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,26	3,29	3,36	3,44	3,53	3,61	3,70



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	Exhibitions)									
	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,90	81	81,25	81,50	81,75	82	82,25
	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Persen	0	0	25	30	35	40	50
	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	2,47	10	12	14	16	18	20
4	MISI 4 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR PUBLIK									
4.1	Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Poin	65,74	66,75	67,74	68,75	69,74	70,75	71,74
4.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	87,37	88,37	88,4	88,43	88,48	88,53	88,58



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	lingkungan hidup kota									
4.1.2	Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Skor	77,56	75,56	73,56	71,55	70,53	69,51	68,50
5	MISI 5 : PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
5.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A	A
5.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,79	3,83	3,87	3,90	3,94	3,97	4,00
4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,18	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45	4,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,20	87,50	88,00	88,30	88,50	89,00	90,00
4.1.3	Meningkatnya	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	inovasi kota dalam pembangunan			Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
4.1.4	Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	Poin	76,36	78	80	81	82	83	84
4.1.5	Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Indeks Sistem Merit	Poin	0,78	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (diolah)



Tabel 2.2
Logical Framework Pencapaian Tujuan Pertama

TUJUAN	TUJUAN										
	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter										
	INDIKATOR TUJUAN										
Indeks Pembangunan Manusia											
SASARAN	SASARAN										
	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata			Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas				Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota		
	INDIKATOR SASARAN										
	Indeks Pendidikan			Usia Harapan Hidup				Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka		
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES										
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Dasar	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pencegahan penyakit	Meningkatnya kualitas layanan primer, rujukan dan laboratorium kesehatan	Meningkatnya kualitas perbekalan kesehatan dan pembiayaan kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja
	INDIKATOR OUTCOMES										
	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	1. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2. Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	Prevalensi Stunting	Angka Keberhasilan pengobatan TB	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persentase Kelurahan dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensinya	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan
	PROGRAM										
	Program Pengelolaan Pendidikan		Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
INDIKATOR PROGRAM											
Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	1. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2. Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	Prevalensi Stunting	Angka Keberhasilan pengobatan TB	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persentase Kelurahan dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensinya	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	
PD	Urusan Pendidikan		Urusan Perpustakaan	Urusan Kesehatan			Urusan Kesehatan	Urusan Sosial	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029



Tabel 2.3
Logical Framework Pencapaian Tujuan Kedua

TUJUAN	TUJUAN							
	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif							
	INDIKATOR TUJUAN							
	Indeks Rasa Aman							
SASARAN	SASARAN							
	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran		Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif			
	INDIKATOR SASARAN							
	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Indeks Penyelenggaraan	Indeks Warisan Budaya	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)			
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES							
	Meningkatnya kualitas masyarakat kota yang agamis	Meningkatnya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya	Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibumlinmas di Kota Sukabumi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Meningkatnya daya saing kepemudaan
	INDIKATOR OUTCOMES							
	Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi	Persentase konflik antar inter umat beragama yang diantisipasi	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang terselesaikan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Rasio Wirausaha Pemuda
	PROGRAM							
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	INDIKATOR PROGRAM							
	Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi	Persentase konflik antar inter umat beragama yang diantisipasi	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang terselesaikan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Rasio Wirausaha Pemuda
PD	Urusan Sekretariat Daerah	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Kebudayaan	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (diolah)



Tabel 2.4

Logical Framework Pencapaian Tujuan Ketiga

TUJUAN	TUJUAN						
	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif						
	INDIKATOR TUJUAN						
	PDRB Per Kapita						
SASARAN	SASARAN						
	Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Berkembangnya industri pariwisata MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions)	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan		
	INDIKATOR SASARAN						
	Indeks Kota Kreatif	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Indeks Ketahanan Pangan	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Pertumbuhan PAD		
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES						
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Meningkatnya daya saing UMKM	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya investasi	Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah
	INDIKATOR OUTCOMES						
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase UMKM Menjalin Kemitraan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Skor Pola Pangan Harapan	Persentase pangan segar yang memenuhi pesyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase peningkatan nilai investasi	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
	PROGRAM						
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan UMKM	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
PD	INDIKATOR PROGRAM						
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase UMKM Menjalin Kemitraan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Skor Pola Pangan Harapan	Persentase pangan segar yang memenuhi pesyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase peningkatan nilai investasi	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
	Urusan Pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Urusan Pariwisata	Urusan Pangan	Urusan Pangan	Urusan Penanaman Modal	Urusan Keuangan

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (diolah)



Tabel 2.5

Logical Framework Pencapaian Tujuan Keempat

TUJUAN	TUJUAN										
	Terwujudnya infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan										
SASARAN	INDIKATOR TUJUAN										
	Indeks Kota Layak Huni										
SASARAN	SASARAN										
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kota										
SASARAN	INDIKATOR SASARAN										
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur										
SASARAN	INDIKATOR SASARAN										
	Indeks Risiko Bencana										
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES										
	Meningkatnya kualitas jalan jembatan	Meningkatnya Keterseediaan fasilitas kelengkapan jalan	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan sistem air minum	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas ruang publik	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Meningkatnya kualitas layanan persampahan	Meningkatnya kualitas layanan air limbah	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya pengurangan emisi GRK
OUTCOMES - PROGRAM	INDIKATOR OUTCOMES										
	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persentase Keterseediaan penerangan jalan umum yang terpelihara dan memenuhi standar	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam kondisi baik	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana	Persentase penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran sesuai standar pelayanan	Emisi Co2 Equivalen
OUTCOMES - PROGRAM	PROGRAM										
	Program penyelenggaraan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Program kawasan permukiman	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Program pengelolaan persampahan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Program Penanggulangan Bencana	Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
OUTCOMES - PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM										
	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persentase Keterseediaan penerangan jalan umum yang terpelihara dan memenuhi standar	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam kondisi baik	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana	Persentase penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran sesuai standar pelayanan	Emisi Co2 Equivalen
PD	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Perhubungan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Lingkungan Hidup	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Lingkungan Hidup

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (diolah)



Tabel 2.6

Logical Framework Pencapaian Tujuan Kelima

TUJUAN	TUJUAN												
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif												
	INDIKATOR TUJUAN												
Indeks Reformasi Birokrasi													
SASARAN	SASARAN												
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota					Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel				Terwujudnya ASN yang Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi	
	INDIKATOR SASARAN												
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	* Indeks Pelayanan Publik * Indeks kepuasan Masyarakat Tingkat Kota					Indeks Inovasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) Kota Sukabumi				Indeks Sistem Merit		
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES												
	Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas peraturan daerah yang ditetapkan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya pendayagunaan inovasi	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN
	INDIKATOR OUTCOMES												
	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase prole gda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Indeks tata kelola pengadaan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	* Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD * Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	Nilai rata-rata RB Perangkat Daerah yang melakukan pengukuran IRB-PD	Nilai laporan keuangan	Persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya
	PROGRAM												
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Arsip	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ProgramDukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kepegawaian Daerah	
PD	INDIKATOR PROGRAM												
	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase prole gda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Indeks tata kelola pengadaan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	* Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD * Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	Nilai rata-rata RB Perangkat Daerah yang melakukan pengukuran IRB-PD	Nilai laporan keuangan	Persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengembangan Karir ASN
PD	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Perpustakaan	Urusan Sekretariat Daerah	Urusan Sekretariat DPRD	Urusan Sekretariat Daerah	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Kecamatan	Urusan Penelitian	Urusan Perencanaan	Urusan Sekretariat Daerah	Urusan Keuangan	Urusan Inspektorat Daerah	Urusan Kepegawaian Daerah

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (diolah)



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan ***kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur*** tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Sukabumi Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025. Pada Tahun 2024, dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja sebagai akibat adanya *Refocussing* Anggaran pada Perubahan Parsial APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025.



Perjanjian Kinerja Kota Sukabumi Tahun 2025 sebagai dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2025 disajikan pada Lampiran II.

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	1) Indeks Pendidikan	Poin	73,63
2.	Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	2) Usia Harapan Hidup	Tahun	75,31
3.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	3) Tingkat Kemiskinan	Persen	6,36 - 7,02
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	4) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,84 - 8,54
5.	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	5) Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	79,00
6.	Terwujudnya masyarakat kota yang tentram dan tertib	6) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	76
7.	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	7) Indeks Warisan Budaya	Poin	38,85
8.	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	8) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	60,1
9.	Meningkatnya ekonomi kreatif kota	9) Indeks Kota Kreatif	Poin	87,86
10.	Berkembangnya industri pariwisata MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions)	10) Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,29



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

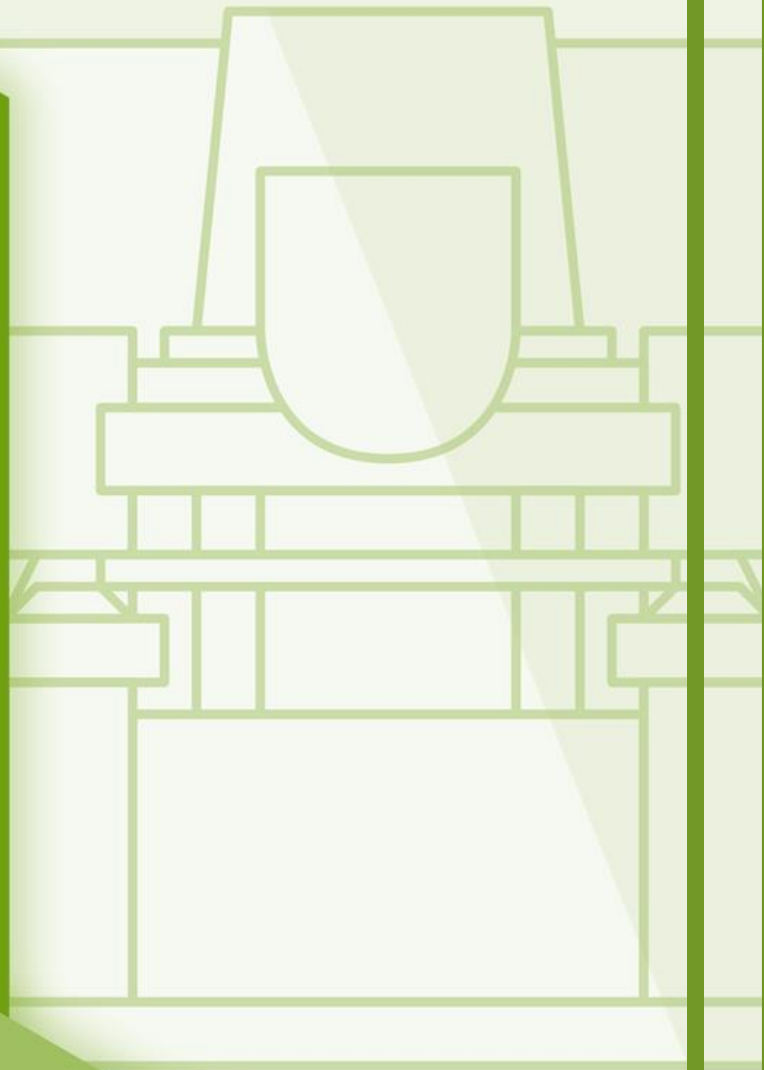
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
11.	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	11)Indeks Ketahanan Pangan	Poin	81
12.	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	12)Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Persen	0
13.	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	13)Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	10
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	14)Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	88,37
15.	Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	15)Indeks Risiko Bencana	Skor	75,56
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	16)Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,83
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	17)Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,25
		18) Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,50
18.	Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	19)Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif
19.	Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	20)Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	Poin	78
20.	Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	21)Indeks Sistem Merit	Poin	0,80

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi - Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



DAFTAR ISI

- 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 60
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 59

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan kinerja. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi melaksanakan kewajiban akuntabilitas dengan menyajikannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta mengacu pada RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029,

Rencana Kerja Kota Sukabumi Tahun 2025 dan APBD Kota Sukabumi Tahun 2025. Secara substantif, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur realisasinya berdasarkan tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 dan mekanismenya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dan sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerjanya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat

realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Tingkat Capaian Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Tingkat Capaian Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana ditampilkan di bawah ini :

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	WARNA
1	91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI	
2	76% ≤ 90%	TINGGI	
3	66% ≤ 75%	SEDANG	
4	51% ≤ 65%	RENDAH	

5 ≤ 50% SANGAT RENDAH

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan penilaian pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat diketahui IKU yang tercapai maupun yang tidak tercapai, selanjutnya disajikan pula data peningkatan atau penurunan realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2025 di tingkat provinsi maupun nasional, dilakukan perbandingan capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2025 dengan capaian indikator tersebut di Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Adapun rumus perhitungan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Indikator Positif

$$X = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - (n-1)}{\text{Realisasi Tahun } (n-1)} \times 100\%$$

b. Indikator Negatif

$$X = \frac{\text{Realisasi Tahun } (n-1) - n}{\text{Realisasi Tahun } (n-1)} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dalam hal ini Pemerintah Kota Sukabumi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pada Tahun 2025, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025, terdapat **21 (Dua Puluh Satu) IKU** yang merupakan

indikator sasaran strategis RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Berikut ini adalah analisis pencapaian IKU berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis pelaporan kinerja instansi pemerintah, maka diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Pencapaian IKU Tahun 2025

Merujuk pada pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan itu tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian *outcome* dan *output* saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan baik internal dan eksternal. Penetapan IKU yang dijabarkan dalam bentuk target setiap tahun akan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, dalam penentuan target IKU Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 tetap memperhatikan capaian target

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

IKU pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/*trend* di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU tersebut. Berikut ini adalah capaian IKU tahun 2025 yang disajikan dalam Tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 (Awal Periode RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi IKU Tahun 2025	Capaian IKU 2025 (%)	Interpretasi
<i>A</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1.	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Indeks Pendidikan	Poin	73,63	72,49	98,45	SANGAT TINGGI
2.	Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,31	75,45	100.19	SANGAT TINGGI
3.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,36 – 7,02	6,9	100	SANGAT TINGGI
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,84 – 8,54	8,19	100	SANGAT TINGGI
5.	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	79,00	N/A	N/A	-
6.	Terwujudnya masyarakat kota yang tentram dan tertib	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	76	68,53	90,17	SANGAT TINGGI
7.	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya	Poin	38,85	32,46	84	TINGGI
8.	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan	Poin	60,1	55,5	92,34	SANGAT TINGGI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

		Berwawasan Kependudukan					
9.	Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Indeks Kota Kreatif	Poin	87,86	88	100,15	SANGAT TINGGI
10.	Berkembangnya industri pariwisata MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions)	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,29	N/A	N/A	-
11.	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	81	78,91	97,41	SANGAT TINGGI
12.	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Ekonomi Baru	Persen	0	0	-	-
13.	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	10	12,47	124,7	SANGAT TINGGI
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	88,37	88,37	100	SANGAT TINGGI
15.	Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Skor	75,56	61,11	119,12	SANGAT TINGGI
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,83	3,79	98,95	SANGAT TINGGI
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,25	4,5	105,88	SANGAT TINGGI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

18.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,50	87,29	99,76	SANGAT TINGGI
19.	Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	SANGAT TINGGI
20.	Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	Poin	78	78,31	100,40	SANGAT TINGGI
21.	Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Indeks Sistem Merit	Poin	0,80	N/A	N/A	-
Rata - rata Capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2025						100,73	SANGAT TINGGI

Sumber Data : Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, terdapat **21 (Dua Puluh Satu)** Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana ada 11 indikator IKU yang mencapai target Tahun 2025, 7 indikator IKU yang tidak tercapai dan 3 indikator IKU yang belum diketahui realisasi capaiannya. Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi secara **rata-rata capaian IKU** adalah **100,73%**. Rata-rata Indikator kinerja Utama (IKU), memiliki tingkat capaian kinerja **91%≤** (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh satu persen) sehingga diinterpretasikan ke dalam kategori kinerja **SANGAT TINGGI**. Berikut ini adalah analisis umum dari capaian IKU Tahun 2025 :

- ✓ Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan capaian *tertinggi* yakni **124,7%** dan merupakan indikator sasaran utama pencapaian tujuan 3 (Dua) mengenai Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif.
- ✓ Indeks Warisan Budaya menunjukkan capaian *terendah* yakni **84%** dan merupakan indikator sasaran utama pencapaian tujuan 2 (Dua) mengenai Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif.
- ✓ Kontribusi IKU terhadap capaian Indikator Tujuan yang lain diantaranya Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai **100,05%** dengan capaian 78,23 poin, Indeks Kota Layak Huni yang mencapai **101,15%** dengan capaian 67,52 poin dan Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai **100%** dengan capaian 88,80 poin (Nilai Sementara)
- ✓ Adapun 3 (Tiga) indikator yang belum diketahui nilai capaiannya samapai dengan penyusunan laporan yaitu Indeks Kerukunan Beragama, Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dan Indeks Sistem Merit.

- ✓ Sementara itu ada 2 (Dua) indikator tujuan yang belum diketahui nilainya, yaitu Indeks Rasa Aman dan PDRB Per Kapita.

3.2.2 Perbandingan Capaian IKU 2025 dengan Target Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan makro daerah untuk jangka 5 tahun. RPJMD memiliki peran sentra sebagai kompas pembangunan daerah selama lima tahun masa jabatan kepala daerah. Dokumen ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan janji politik bertransformasi menjadi kebijakan nyata.

Berdasarkan regulasi perencanaan nasional, RPJMD berfungsi sebagai Penjabaran Visi-Misi, Mengonversi janji kampanye kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang terukur. Selain itu RPJMD juga berfungsi untuk Menjadi acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) agar semua instansi bergerak searah.

Dengan telah ditetapkan RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025-2029 maka RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 selama masa transisi pemerintahan sudah tidak digunakan lagi. Hal ini berpengaruh terhadap adanya beberapa perbedaan antara IKU tahun 2025 dengan tahun 2024. Berikut ini adalah perbandingan capaian IKU Tahun 2025 dengan Tahun 2024 :

Tabel 3.2
Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi IKU Tahun 2025	Capaian IKU 2025 (%)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1.	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Indeks Pendidikan	73,63	72,49	98,45	71,58	72,43	101,19
2.	Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup	75,31	74,45	98,86	75,11	74,15	98,72
3.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Tingkat Kemiskinan	6,36 – 7,02	6,9	100	N/A	7,20	N/A
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,84 – 8,54	8,19	100	N/A	8,34	N/A
5.	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,00	N/A	N/A	N/A	78,16	N/A
6.	Terwujudnya masyarakat kota yang tentram dan tertib	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	76	68,53	90,17	N/A	75	N/A
7.	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya	38,85	32,46	84	N/A	38,85	N/A
8.	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	60,1	55,5	92,34	N/A	56,5	N/A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

9.	Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Indeks Kota Kreatif	87,86	88	100,5	90	96	106,67
10.	Berkembangnya industri pariwisata MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions)	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	3,29	N/A	N/A	N/A	3,26	N/A
11.	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan	81	78,91	97,74	N/A	80,90	N/A
12.	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Ekonomi Baru	0	0	-	N/A	N/A	N/A
13.	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10	12,47	124,7	N/A	2,47	N/A
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	88,37	88,37	100	86	80,23	93,29
15.	Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	75,56	61,11	119,12	N/A	77,56	N/A
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,83	3,79	98,95	N/A	3,79	N/A
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,5	100	N/A	4,18	N/A
18.		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50	87,29	99,76	N/A	87,20	N/A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

19.	Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100
20.	Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	78	78,31	100,40	N/A	76,36	N/A
21.	Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Indeks Sistem Merit	0,80	N/A	N/A	N/A	0,78	N/A

Sumber Data : Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, terdapat beberapa IKU Tahun 2025 yang tidak terdapat di tahun 2024 namun angka capaiannya bisa diperoleh yakni Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Indeks Warisan Budaya, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Rasio Terbentuknya Pusat Ekonomi Baru, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Risiko Bencana, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) dan Indeks Sistem Merit. Perbedaan indikator yang cukup banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan selesainya masa transisi pemerintahan dimana pada tahun 2024 dasar penentuan indikator berdasarkan RPD Kota Sukabumi tahun 2023-2026 sedangkan untuk tahun 2025 menggunakan RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025-2029. Berikut ini adalah analisis umum dari capaian IKU Tahun 2025 dibandingkan dengan IKU Tahun 2024 :

- ✓ Pada Tahun 2025, terdapat 10 dari 21 IKU yang mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat 7 dari 8 IKU yang mencapai target yang telah ditentukan.
- ✓ Kendatipun target yang ditentukan pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan pada tahun 2024, namun rata-rata tingkat ketercapaiannya menunjukkan kategori SANGAT TINGGI.
- ✓ Rata-rata capaian IKU Tahun 2025 sebesar 100,73% sedangkan rata-rata capaian IKU Tahun 2024 sebesar 101,83%.

3.2.3 Perbandingan Capaian IKU 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2025-2029

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD harus berpedoman pada RPJMD yang artinya harus selaras dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sebagaimana yang tersajikan dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, maksud penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2024-2029 adalah memberikan panduan perencanaan pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2024-2029 adalah :

1. Mengoptimalkan potensi dan peluang Daerah sebagai modalitas dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2025-2029;
2. Mengoperasionalkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali sesuai dengan kaidah perencanaan;
3. Menjamin keselarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
4. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
5. Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2026 hingga Tahun 2030.

Oleh karena itu capaian dari tahun per tahun dalam RPJMD sangatlah dibutuhkan untuk sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut adalah perbandinganya yang tersaji dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi IKU Tahun 2025	Capaian IKU 2025 (%)	Target Tahun 2029	Capaian (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>j</i>
1.	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Indeks Pendidikan	73,63	72,49	98,45	77,54	93,48
2.	Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup	75,31	74,45	98,86	76,36	97,49
3.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Tingkat Kemiskinan	6,36 – 7,02	6,9	100	2,72 – 3,72	53,91
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,84 – 8,54	8,19	100	6,88 – 7,37	89,98
5.	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,00	N/A	N/A	80,36	-
6.	Terwujudnya masyarakat kota yang tentram dan tertib	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	76	68,56	90,17	81	84,64
7.	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya	38,85	32,46	84	39,35	82,49
8.	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan	60,1	55,5	92,34	66,40	83,58

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

		Berwawasan Kependudukan					
9.	Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Indeks Kota Kreatif	87,86	88	101,15	91,23	96,45
10.	Berkembangnya industri pariwisata MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions)	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	3,29	N/A	N/A	3,70	-
11.	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan	81	78,91	97,41	82,25	95,93
12.	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Ekonomi Baru	0	0	-	50	-
13.	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10	12,47	124,7	20	62,35
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	88,37	88,37	100	88,58	99,76
15.	Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	75,56	61,11	119,12	68,50	112,09
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,83	3,79	98,95	4,00	94,75
17.	Meningkatnya kualitas	Indeks Pelayanan	4,25	4,5	106	4,50	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	pelayanan publik kota	Publik					
18.		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50	87,29	99,76	90,00	96.98
19.	Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	100
20.	Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	78	78,31	100,40	84	93,22
21.	Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Indeks Sistem Merit	0,80	N/A	N/A	0,85	-

Sumber Data : Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, terdapat **3 (Tiga)** IKU Tahun 2025 sudah mencapai target akhir RPJMD Tahun 2029 yakni Indeks Risiko Bencana **(119,12%)**, Indeks Pelayanan Publik **(100%)** dan Indeks Inovasi Daerah yang sudah memperoleh Kota Sangat Inovatif. Artinya pada tahun 2026 selanjutnya harus dilakukan penajaman target terhadap *baseline* yang telah diperoleh pada capaian tahun 2025. Sehingga kedepan target yang ditentukan bisa lebih SMART. Berikut ini adalah analisis umum dari capaian IKU Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 :

- ✓ *Gap Analysis* tertinggi berada pada pencapaian IKU 3 : Tingkat Kemiskinan yang baru mencapai **53,91%** dari target yang ditentukan tahun 2029 yakni sebesar 2,27-2,37.
- ✓ Indeks Risiko Bencana telah melampaui target tahun 2029 yakni 61,11 poin, sedangkan Usia Harapan Hidup sudah mendekati capaian target tahun 2029 yakni 97,49% dari target Tahun 2029.

3.2.4 Perbandingan Capaian IKU 2025 dengan Capaian Tingkat Provinsi & Nasional

Perbandingan capaian IKU dengan tingkat provinsi dan nasional berguna untuk melihat adanya permasalahan pembangunan yang teratasi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan **“gap expectation”** antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Perbandingan capaian Kota Sukabumi, Provinsi dan nasional ini juga berfungsi untuk melihat adanya permasalahan pembangunan yang berada di setiap level pemerintah daerah, diantaranya :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berdaya saing tinggi berlandaskan agama, budaya dan intelektualitas.
2. Permukiman kumuh, penataan lingkungan hidup dan pencegahan kebencanaan.
3. Perbaikan ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa.
4. Kemiskinan Ekstrem dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
5. Ketahanan pangan dan energi serta optimalisasi upaya penanganan *Stunting*.
6. Perbaikan reformasi birokrasi yang berdampak.

Berdasarkan kesamaan permasalahan diatas, maka IKU Kota Sukabumi Tahun 2025 telah menunjukkan ***kontribusi langsung*** terhadap penyelesaian permasalahan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Bahkan capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2024 telah melampaui capaian tingkat provinsi Jawa Barat maupun nasional. Berikut ini adalah data yang bisa disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 serta Perbandingannya Terhadap
Capaian Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi IKU Tahun 2025	Capaian IKU 2025 (%)	Realisasi Jawa Barat	Realisasi Nasional	Capaian IKU 2025 P/N (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>H</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1.	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Indeks Pendidikan	73,63	72,49	98,45	N/A	N/A	-
2.	Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup	75,31	75,45	100,19	75,53	74,47	98,57 99,97
3.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Tingkat Kemiskinan	6,36 – 7,02	6,9	100	7,02	8,25	101.73 119.56
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,84 – 8,54	8,19	100	6,77	4,74	82.66 57.87
5.	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,00	N/A	N/A	N/A	N/A	-
6.	Terwujudnya masyarakat kota yang tentram dan tertib	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	76	68,53	90,17	76,40	N/A	-
7.	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya	38,85	32,46	84	N/A	N/A	-
8.	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	60,1	55,5	92,34	59,5	63,7	93.27 87.12
9.	Meningkatnya ekonomi kreatif	Indeks Kota	87,86	88	100,15	N/A	N/A	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	kota	Kreatif						
10.	Berkembangnya industri pariwisata MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions)	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	3,29	N/A	N/A	N/A	N/A	-
11.	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan	81	78,91	97,41	N/A	73	108.09
12.	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Ekonomi Baru	0	0	-	N/A	N/A	-
13.	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10	12,47	124,7	N/A	N/A	-
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	88,37	88,37	100	N/A	N/A	-
15.	Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	75,56	61,11	119,12	106,02	N/A	-
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,83	3,79	98,95	4,73	3,23	80.12 117.33
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,5	106	N/A	N/A	-
18.		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50	87,29	99,76	N/A	N/A	-
19.	Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	N/A	N/A
20.	Terwujudnya birokrasi	Indeks Reformasi	78	78,31	100,40	N/A	N/A	N/A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Birokrasi General (IRB General)						
21.	Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Indeks Sistem Merit	0,80	N/A	N/A	N/A	N/A	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2025

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 serta Solusi yang Telah dilakukan

Pelaporan kinerja adalah rangkuman kerja yang menjelaskan capaian kinerja suatu instansi atau perorangan. Laporan ini disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pelaporan kinerja adalah :

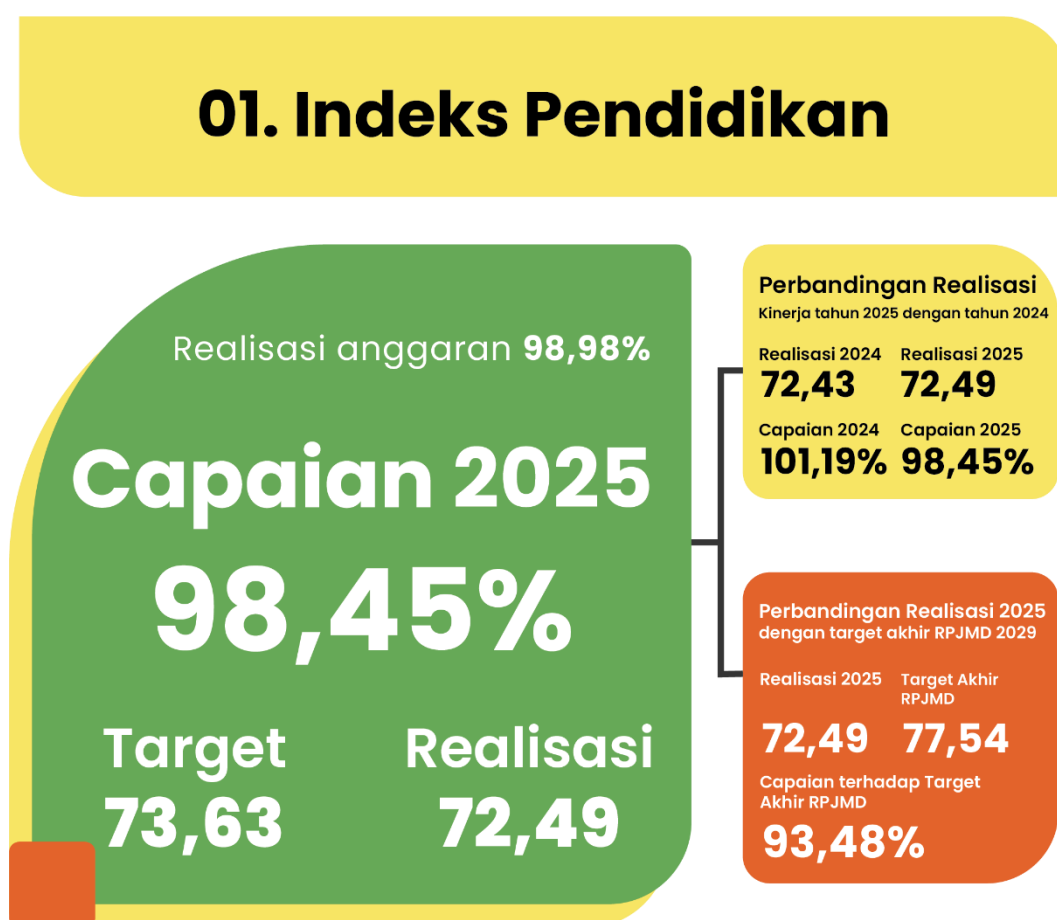
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat;
2. Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan suatu tugas; dan
3. Sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran pada tahun mendatang

Maka penyusunan LKIP harus mampu memenuhi 3 (Tiga) tujuan diatas. Selain itu LKIP juga diharapkan bisa mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu penyusunan laporan harus memperhatikan prinsip-prinsip lain agar kualitas laporan menjadi baik yaitu :

1. Prinsip Lingkungan : menjelaskan bahwa LKIP memiliki pertanggungjawaban Isi laporan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, dan memuat **keberhasilan maupun kegagalan**.
2. Prinsip Prioritas : Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan dan upaya-upaya tindak lanjutnya.
3. Prinsip Manfaat : Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Oleh karena itu, sebagai komitmen menjaga prinsip-prinsip penyusunan LKIP diatas, berikut ini kami uraikan analisis secara lebih mendalam per IKU dari 21 (Dua Puluh Satu) IKU yang ada dengan program pendukungnya, agar bisa memetakan penyebab kegagalan/keberhasilan dari pencapaian IKU tersebut serta dapat menjadi patokan dalam menyusun Rencana Tindak Lanjut untuk dilaksanakan di tahun yang akan datang.

3.2.5.1 Penjelasan Pencapaian IKU 1 : Indeks Pendidikan



Gambar 3.1
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 :
Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2025**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa atau negara, tanpa pendidikan di dalam sebuah bangsa maka dirasa bangsa tersebut akan tertinggal oleh bangsa lain. Pendidikan adalah upaya yang terorganisir, berencana dan berkelanjutan (terus menerus sepanjang hayat) dengan tujuan dan arah untuk membina manusia/anak didik menjadi individu yang lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupannya dimana kehidupan seseorang meliputi kedewasaan dan berbudaya (civilized). Oleh karena itu, pendidikan menjadi hal yang penting dalam pembangunan suatu daerah dan menjadi salah satu tolok ukur pembangunan manusia. Hasil dari pembangunan pendidikan tercermin dari Indeks Pendidikan. Untuk mengetahui hasil dari pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi, dilakukan pengukuran Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pendidikan terdiri dari Komponen indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah.

Dilihat dari Gambar 3.1 tersebut, realisasi Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah 72,49 dengan tingkat capaian sebesar 98,45% dari target yang telah ditetapkan yaitu 73,63. Indeks pendidikan terdiri dari dua indikator perhitungan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Selama kurun waktu 2020-2025, Indeks Pendidikan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah.

1. *Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)*

RLS adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu

wilayah. indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah diselesaikan atau ditamatkan. Rata-rata Lama Sekolah Kota Sukabumi Tahun 2022-2025 terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 menurut data BPS, RLS Kota Sukabumi 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) atau **meningkat sebesar 0,01 poin** lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat (9,14) dan Nasional (9,07). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas jika di rata-ratakan sudah sampai bangku kelas 1 SMA **(sudah melebihi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun)**.

2. *Harapan Lama Sekolah (HLS)*

HLS adalah perkiraan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani oleh anak yang berumur 7 (tujuh) tahun. HLS dihitung berdasarkan penduduk usia 7 (tujuh) tahun ke atas agar konsisten dengan referensi umur pada program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan perhitungan HPS ini ditujukan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Menurut Data BPS, Harapan Lama Sekolah Kota Sukabumi tahun 2025 adalah 13,63 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 13,62 (tiga belas koma enam dua) tahun pada tahun 2024 atau meningkat 0,01 (nol koma nol satu), lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat (13,02) dan Nasional (13,30). Angka ini menunjukkan bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas dimasa mendatang adalah selama 13,98 tahun atau setara Diploma I.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Wilayah Kota (Total)	[Komponen IPM] Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sukabumi	
	2025	
Kota Sukabumi		10,39

Wilayah Kota (Total)	[Komponen IPM] Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sukabumi	
	2025	
Kota Sukabumi		10,39

Keterangan Data :
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Keberhasilan Peningkatan Rata-rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal dimana salah satu solusi atau upayanya adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan melalui :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar maupun pendidikan nonformal/kesetaraan;
2. Pemberian bantuan kepada siswa-siswi baik pada satuan Pendidikan formal maupun pendidikan non formal/kesetaraan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan
3. Pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis kemasyarakatan untuk melayani penduduk di luar usia sekolah yang ingin menyelesaikan pendidikannya baik pada jenjang Paket A setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA.
4. Terwujudnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan yang Berkualitas, melalui :
 - a. Melakukan Verval ATS US sebagai dasar untuk merumuskan intervensi yang tepat;
 - b. Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan;
 - c. Melakukan perhitungan dan pemetaan kebutuhan guru sebagai dasar pengusulan pemenuhan sesuai kebutuhan;

- d. Melakukan peningkatan kompetensi guru melalui program Guru Penggerak.

Berdasarkan Logical Frame Work pencapaian tujuan pertama yakni terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter terutama pada sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ditunjang oleh indikator indeks pendidikan diampu oleh 2 (dua) program utama yakni pengelolaan pendidikan dengan indikator pencapaian SPM Pendidikan dan program pembinaan perpustakaan dengan indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Untuk indeks pencapaian SPM pendidikan, dibangun berdasarkan pemenuhan indikator sarana & prasarana, tingkat partisipasi dan rata kemampuan numerasi serta literasi peserta didik. Berikut ini adalah capaian program SPM Bidang pendidikan tahun 2025 :

Capaian Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, dan Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2025 sebesar 96,27 dan 95,01 Adapun program dan kegiatan yang menunjang capaian tersebut melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar yang dijabarkan didalam Program Pengelolaan Pendidikan dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang meliputi:

- a. Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
- b. Pengadaan Mebel Sekolah;
- c. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar;
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
- e. Workshop Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar;
- f. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;
- g. Pembangunan Ruang Kelas Baru;

- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- i. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.

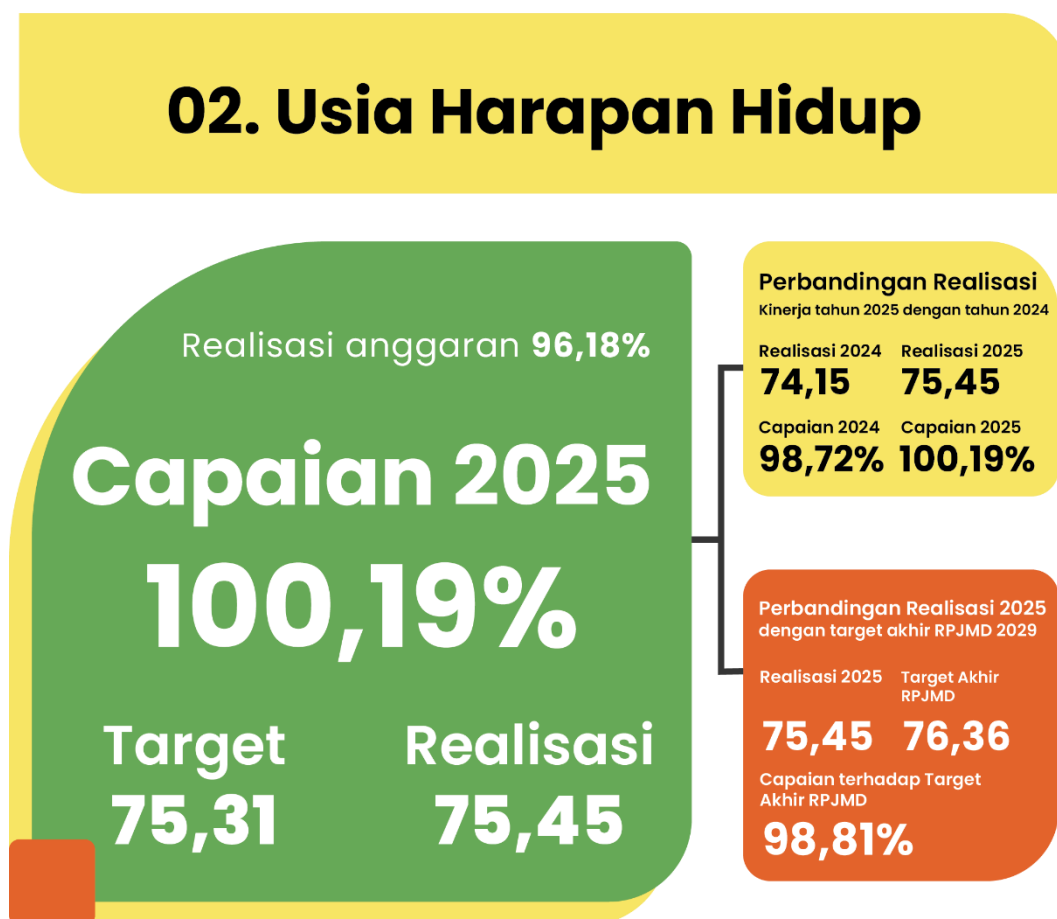
Capaian Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, dan Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2025 sebesar 98,60 dan 97,78 Adapun program dan kegiatan yang menunjang capaian tersebut melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah Pertama yang dijabarkan didalam Program Pengelolaan Pendidikan dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi:

- a. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- b. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- c. Pengadaan Mebel Sekolah
- d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- e. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- f. Workshop pemutakhiran data pokok Pendidikan sekolah menengah pertama
- g. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Untuk Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yang telah diukur oleh Perpustakaan Nasional melalui kegiatan Kajian Perpustakaan Nasional yang dilaksanakan serentak untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, nilai yang dihasilkan adalah sebesar 60,74 atau sebesar 87,55%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 69,37 adanya penurunan dan tidak tercapainya target nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat hal tersebut dikarenakan adanya perubahan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025.

Perubahan ini berdampak terjadinya ketidak sesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) berfokus pada Dimensi Pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 Persen, dan Dimensi pasca membaca 35 Persen. Berdasarkan hal tersebut hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perpektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan.

3.2.5.2 Penjelasan Pencapaian IKU 2 : Usia Harapan Hidup



Gambar 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 :
Usia Harapan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2025

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Sasaran Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas diampu oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas dilihat dari pencapaian indikatornya yaitu Usia Harapan Hidup. Usia Harapan Hidup merupakan capaian salah satu fokus pembangunan di bidang kesehatan, adapun indikator pendukung Usia Harapan Hidup dapat dijabarkan melalui indikator teknis dan faktor pendukung strategis berikut:

1. Indikator Keberhasilan (Output Medis & Sosial). Keberhasilan ini diukur dari beberapa parameter kesehatan masyarakat yang menunjukkan tren positif;
 - a. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Balita (AKABA). Usia Harapan Hidup sangat sensitif terhadap kematian di usia dini. Dimana capaian Angka Kematian Bayi di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 yaitu 9,67 dengan capaian realisasi sebesar 130,51%. Angka tersebut menunjukkan tren positif dimana pada tahun 2024 capaian realisasinya 107,07%;
 - b. Efektivitas intervensi gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Sukabumi berhasil menekan risiko kematian bayi secara signifikan;
 - c. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM): Meningkatnya angka harapan hidup menunjukkan bahwa penduduk usia dewasa mampu bertahan lebih lama dari risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes melalui deteksi dini di Posbindu. Persentase capaian Persentase pengendalian dan pencegahan penyakit yaitu sebesar 102.29% atau 70,1 dari target 68,53;
 - d. Capaian Universal Health Coverage (UHC): Dengan kepesertaan JKN yang mencapai angka 98%, akses

penduduk terhadap layanan kuratif (pengobatan) menjadi tanpa hambatan finansial.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan;

a. Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (*Health Resilience*).

Pemerintah Kota Sukabumi melakukan transformasi layanan dasar yang lebih dekat dengan warga melalui Optimalisasi Puskesmas & Klinik. Peningkatan status akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama memastikan standar pelayanan yang bermutu. Inovasi Layanan Jemput Bola, program seperti layanan kesehatan ke rumah (*Home Care*) untuk lansia memastikan kelompok rentan tetap terpantau kesehatannya tanpa harus bepergian jauh.

b. Keberhasilan Program Penurunan Stunting.

Pada akhir 2025, Kota Sukabumi mendapatkan apresiasi nasional (Insentif Fiskal sebesar Rp. 5,5 milyar) atas performa penurunan stunting. . Melalui kolaborasi TP3S, posyandu aktif, dan intervensi spesifik, angka stunting berhasil diturunkan menjadi 19,2%. Pemkot menargetkan penurunan lebih lanjut menuju target nasional. Korelasi dengan Usia Harapan Hidup yakni anak yang bebas stunting memiliki sistem imun dan kualitas kesehatan yang lebih baik, yang menjadi modal dasar untuk mencapai usia tua yang sehat.

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sanitasi

Kesehatan lingkungan berkontribusi besar terhadap pencegahan penyakit menular. Perluasan akses sanitasi layak dan air minum bersih di pemukiman padat perkotaan mengurangi kasus diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya. Selain itu Revitalisasi

kawasan pedestrian dan taman kota (seperti Lapangan Merdeka dan Alun-alun) mendorong gaya hidup aktif (olahraga) di masyarakat.

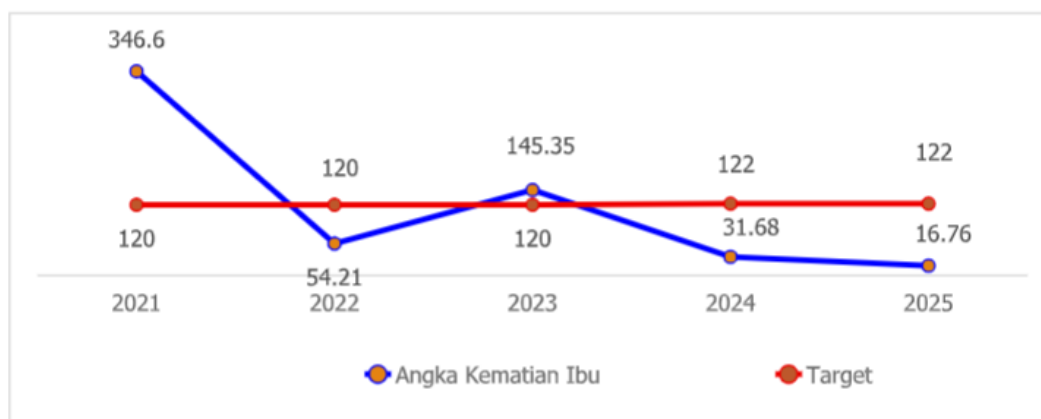
d. Faktor Ekonomi dan Daya Beli

Usia Harapan Hidup memiliki korelasi kuat dengan kemampuan masyarakat membeli nutrisi dan layanan kesehatan. Kemampuan Pemerintah Kota Sukabumi menjaga inflasi daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memastikan keterjangkauan pangan bergizi bagi keluarga prasejahtera. Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita menunjukkan perbaikan kesejahteraan yang berbanding lurus dengan peningkatan usia hidup.

Berdasarkan analisis diatas capaian Usia Harapan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebesar 75,45 dari target yang ditetapkan 75,31 atau dengan kata lain memiliki tingkat capaian 100,19%. Peningkatan capaian Usia Harapan Hidup sebagai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat oleh perangkat daerah pengampu dalam hal ini Dinas Kesehatan. Pencapaian Usia Harapan Hidup Kota Sukabumi tahun 2025 ini didukung oleh banyak sektor antara lain diantaranya koordinasi lintas program dan kolaborasi semua unsur masyarakat yang berjalan dengan baik dan dikuatkan dengan peran Puskesmas Se-Kota Sukabumi agar tercipta komitmen yang berkesinambungan. Keberhasilan melampaui target Usia Harapan Hidup ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan manusia di Kota Sukabumi tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan sistem ketahanan kesehatan berbasis komunitas. Sinergi antara jaminan kesehatan (UHC), inovasi kesehatan mental, dan penurunan stunting menjadi kunci utama.

Berdasarkan Logical Frame Work pencapaian tujuan pertama yakni terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter terutama pada sasaran Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas ditunjang oleh indikator Usia Harapan Hidup diampu oleh 2 (dua) program utama yakni Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Untuk kedua program tersebut, dibangun berdasarkan pemenuhan indikator Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak. Berikut ini adalah capaian Indikator Usia Harapan Hidup:

Angka Kematian Ibu di Kota Sukabumi dari tahun 2021 – 2025 mengalami tren penurunan, meskipun pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 145,35 per 100.000 KH serta diatas target yang ditetapkan, akan menurun kembali sampai dengan tahun 2025 diperoleh angka kematian ibu sebesar 16,67 per 100.000 KH, seperti tercantum pada grafik dibawah ini :



Gambar 3.3

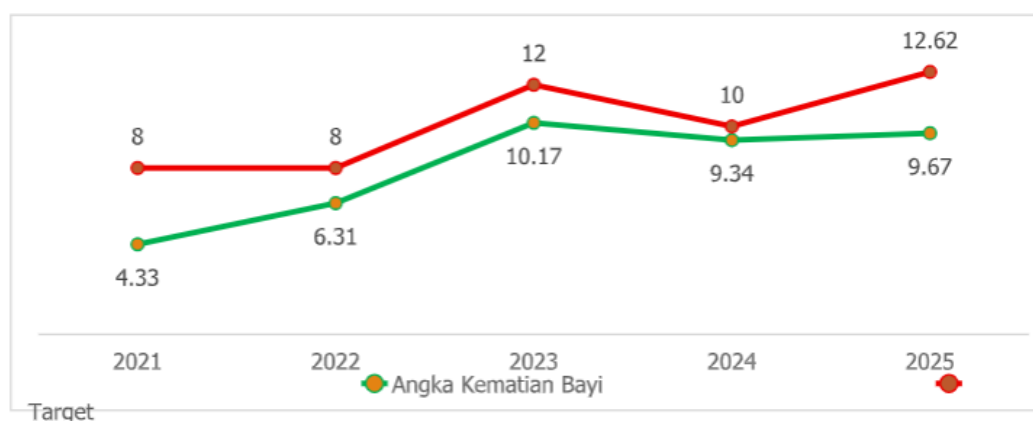
**Grafik Angka Kematian Ibu di Kota Sukabumi
tahun 2021 – 2025**

Jumlah kematian di Kota Sukabumi pada tahun 2025 sebanyak 1 kasus dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.308. Penyebab kematian ibu karena Komplikasi Non-Obstetri atau adanya masalah kesehatan ibu hamil yang terjadi pada masa

kehamilan. Upaya yang dilakukan dalam menurunkan kematian ibu di Kota Sukabumi dilakukan inovasi antara lain :

- Pendampingan ibu hamil resiko tinggi, aman dan responsive (PINTAR)
- Sistem rujukan maternal dan neonatal terintegrasi (SIRAMAN)
- Sinergitas upaya penurunan angka kematian anak dan ibu (SERIBU).

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Sukabumi dari tahun 2021 – 2025 mengalami tren peningkatan, meskipun dibawah target yang ditetapkan, capaian AKB tahun 2025 sebesar 9,67 per 1000 KH masih dibawah target meskipun terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 9,34 per 1000 KH, seperti tercantum pada grafik dibawah ini :



Gambar 3.4

**Grafik Angka Kematian Bayi di Kota Sukabumi
tahun 2021 – 2025**

Upaya yang dilakukan dalam menurunkan kematian bayi di Kota Sukabumi dilakukan inovasi antara lain :

- Sistem rujukan maternal dan neonatal terintegrasi (SIRAMAN)
- Sinergitas upaya penurunan angka kematian anak dan ibu (SERIBU).

3.2.5.3 Penjelasan Pencapaian IKU 3 : Tingkat Kemiskinan



Gambar 3.5
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 :
Tingkat Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2025

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Indikator tingkat kemiskinan memiliki fungsi sebagai alat ukur, alat perencanaan, pemantauan (monitoring), dan evaluasi efektivitas program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Indikator ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik penduduk miskin, serta menggambarkan ketimpangan pengeluaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi indikator tingkat kemiskinan meliputi rendahnya

kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan/angka harapan hidup), tingkat pengangguran tinggi, terbatasnya lapangan kerja, inflasi tinggi, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor lain termasuk pertumbuhan penduduk yang cepat, kurangnya infrastruktur, dan kebijakan pemerintah (subsidi).

Jika dilihat pada gambar 3.5 bahwa capaian realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Sukabumi berada pada 6,9% dari target sebesar 6,36 – 7,02%, dengan persentase capaian realisasi sebesar 100%. Pencapaian angka kemiskinan sebesar 6,9% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Kota Sukabumi berhasil menjaga performa ekonominya tetap berada dalam koridor target rencana strategis (6,36-7,02%). Angka ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga kelompok rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan sekaligus mengangkat sebagian warga keluar dari zona kemiskinan. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian angka tersebut yakni:

1. Ketepatan Sasaran

Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dan optimalisasi data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) di Kota Sukabumi memungkinkan penyaluran bantuan sosial (seperti Program Keluarga Harapan Daerah atau bantuan pangan) menjadi lebih akurat. Hal ini meminimalisir warga miskin yang tidak terdata dan warga mampu yang menerima bantuan.

2. Operasi Pasar Murah

Pada awal 2025 terdapat operasi pasar murah bersubsidi menjadi intervensi kebijakan yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, diselenggarakan di 7 kecamatan Kota Sukabumi.

3. Bantuan Listrik Gratis

Program Bantuan Listrik Gratis dari Pemerintah Jawa Barat juga menjadi faktor penting karena langsung mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin di Kota Sukabumi. Program ini sudah berjalan sejak Mei 2025 ditargetkan Desember 2025 rampung.

4. Pengendalian Inflasi Daerah yang Stabil

Melalui kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kota Sukabumi berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Mengingat garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh harga pangan (beras, telur, cabai). Meskipun terjadi fluktuasi, intervensi seperti pangan murah yang selisih harganya signifikan membantu daya beli masyarakat. Stabilitas harga ini menjaga daya beli masyarakat kelompok rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan

5. Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat

Program-program pendukung seperti Universal Health Coverage (UHC) dan subsidi pendidikan memastikan bahwa pendapatan yang dimiliki warga miskin tidak habis untuk biaya kesehatan atau sekolah, melainkan dapat dialokasikan untuk pemenuhan gizi dan modal usaha kecil.

Berdasarkan Logical Frame Work pencapaian tujuan pertama yakni terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter terutama pada sasaran Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota ditunjang oleh indikator Tingkat Kemiskinan. indikator Tingkat Kemiskinan, dibangun berdasarkan pemenuhan indikator Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan. Program dan kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian

Indikator Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kota Sukabumi pada tahun 2025 memperkuat jaminan sosial dengan menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,90 persen Fokus utama meliputi perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan/sektor informal dan penyaluran bantuan sosial bagi lansia. Program ini didukung data akurat untuk efektivitas intervensi. Poin Penting Perlindungan Sosial Kota Sukabumi 2025:

1. Peningkatan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen perluas cakupan kepesertaan untuk pekerja rentan (ojek online, pedagang, petani, tukang becak/delman)
2. Peluncuran program perlindungan jaminan sosial bagi 3.382 tenaga kerja rentan pada September 2025.
3. Bantuan Lansia. Pemerintah Kota Sukabumi menyerahkan bantuan sosial (bansos) khusus untuk lansia jompo

Integrasi Data. Penggunaan teknologi oleh Bappeda untuk mengintegrasikan data kelompok rentan guna memaksimalkan akurasi penyaluran bantuan





3.2.5.4 Penjelasan Pencapaian IKU 4 : Tingkat Pengangguran Terbuka

04. Tingkat Pengangguran Terbuka



Gambar 3.6
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 :
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sukabumi Tahun 2025**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Barat pada Agustus 2025 berdasarkan penimbang hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020 diperroyeksikan sebanyak 50,76 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26,19 juta orang merupakan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2025 sebesar 66,99 persen, mengalami penurunan sebesar 0,72 persen poin dibandingkan keadaan Agustus 2024 (67,71 persen).

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/Economically active	115.609	70.537	186.146
1. Bekerja/Working	106.055	64.850	170.095
2. Pengangguran terbuka/Unemployment	9.554	5.687	15.241
II. Bukan angkatan kerja/Not economically active	25.659	71.398	97.057
1. Sekolah/Attending school	10.236	8.783	19.019
2. Mengurus rumah tangga/Housekeeping	3.843	57.247	61.090
3. Lainnya/Others	11.580	5.368	16.948
Jumlah/Total	141.268	141.935	283.203
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ Economically Active Participation Rate	81,84	49,70	65,73
Tingkat Pengangguran/Unemployment Rate	8,26	8,06	8,19

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebesar 24,51 juta jiwa, bertambah sekitar 0,09 juta jiwa jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2024 (24,42 juta jiwa). Sedangkan jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2025 mencapai 6,77 persen, angka tersebut menunjukkan sedikit keniakan dibandingkan dengan tahun 2024 (6,75 persen). TPT Kota Sukabumi adalah 8,19%, lebih rendah dari TPT tertinggi terjadi di

Kota Cimahi sebesar 10,52 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Pangandaran sebesar 1,52 persen.

Pada Agustus 2025 perkembangan penduduk Kota Sukabumi usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja meningkat signifikan menjadi 186.150 orang, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2024 yakni sebanyak 158.828 orang atau naik 11,7%. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2025 sebesar 29.871 orang, meningkat dari tahun 2024 dengan angka 14.547 orang. Dengan data twalaupun terjadi kenaikan angka pengangguran tetapi jika dilihat dari total penduduk yang bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sukabumi Tahun 2025 mencapai angka 8,19 persen atau, turun dibandingkan dengan tahun 2024 (8,34 persen). Angka 8,19 persen menunjukkan ketercapaian target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yakni 7,54-8,21 persen. Meskipun angka tesebut terlihat cukup tinggi secara nominal, namun keberhasilan menjaganya tetap sesuai target (7,54-8,21 persen) menunjukkan bahwa strategi pemulihan pasar kerja di sektor jasa dan perdagangan pasca-pandemi serta adaptasi ekonomi digital berjalan dengan baik.

Keberhasilan ini diukur melalui beberapa faktor, yaitu:

1. Peningkatan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK).
Terjadi kenaikan jumlah penduduk yang aktif masuk ke pasar kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja yaitu sebesar 65,73 persen, naik 3,15 persen poin dibandingkan tahun 2024 (62,58 persen);
2. Pergeseran Sektor Lapangan Usaha.
Dominasi penyerapan tenaga kerja di Kota Sukabumi bergeser ke sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) serta Sektor Jasa, yang menyerap lebih dari 40% angkatan kerja lokal;

3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terpelajar.

Adanya penurunan rasio lulusan SMK/Diploma yang menganggur berkat sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri digital. Berdasarkan data Agustus 2025 Tingkat Pengangguran Terpelajar mengalami penurunan sebanyak 4,36 ribu orang.

4. Revitalisasi Pusat Ekonomi dan Pariwisata Kota.

Pembangunan infrastruktur perkotaan (seperti pedestrian dan kawasan kuliner) telah menstimulus tumbuhnya usaha-usaha baru. Selain itu, peningkatan kunjungan ke Kota Sukabumi pasca-beroperasinya Tol Bocimi Seksi 2 dan 3 meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di sektor perhotelan, UMKM, dan transportasi.

5. Program Pencetakan Wirausaha Baru (WUB)

Pemerintah Kota Sukabumi secara konsisten menjalankan program pelatihan kewirausahaan. Kemandirian ekonomi juga menjadi salah satu factor, tidak hanya mencari kerja (*job seeker*), banyak angkatan kerja muda didorong menjadi pencipta kerja (*job creator*) di bidang ekonomi kreatif dan startup lokal.

6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM

Pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan di Kota Sukabumi pada tahun 2025 memberikan peluang kerja bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kota Sukabumi sebagai kota jasa dan perdagangan berfokus pada penguatan sektor mikro seperti pelatihan Wirausaha Baru (WUB). Program pencetakan wirausaha baru memberikan alternatif pendapatan bagi keluarga prasejahtera agar tidak bergantung selamanya pada bantuan sosial. Berikut adalah detail pelatihan WUB Kota Sukabumi 2025:

- a. Pelatihan Vokasi (Angkatan ke-4): Fokus pada pengolahan pangan, public speaking, dan live selling

untuk membangun mindset wirausaha yang kreatif dan berani mengambil risiko;

- b. Program "UMKM Naik Kelas" 2025: Diluncurkan pada Juli 2025 untuk mendampingi pelaku usaha dalam efisiensi biaya produksi, kualitas produk, dan strategi pemasaran;
- c. Pelatihan Kewirausahaan II 2025: Fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- d. Pelatihan Perkoperasian & Literasi Keuangan: Ditujukan untuk penguatan kapasitas pelaku UMKM.

Berdasarkan Logical Frame Work pencapaian tujuan pertama yakni terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter terutama pada sasaran Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota ditunjang oleh indikator Tingkat Pengangguran Terbuka diampu oleh 2 (dua) program utama yakni Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sukabumi tahun 2025 difokuskan pada penurunan angka pengangguran terbuka (8,3% pada 2024) melalui bimtek produktivitas, aktivasi BLK, dan kolaborasi dengan LPK untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan UMKM dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing. Adapun fokus utama pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yaitu:

- 1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Produktivitas
Fokus pada peningkatkan keahlian tenaga kerja perusahaan untuk efisiensi dan peningkatan daya saing



2. Optimalisasi BLK (Balai Latihan Kerja)

Pengaktifan kembali BLK untuk pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar.



3. Pelatihan Kewirausahaan UMKM

Pelatihan bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan profesionalisme, tata kelola, dan permodalan, termasuk program dana bergulir.

4. Program Pemagangan dan Kerja Luar Negeri

Kerja sama dengan LPK untuk memfasilitasi pencari kerja ke luar negeri.

5. Career Day 2025

Diselenggarakan pada November 2025 di Politeknik Sukabumi untuk membuka akses lowongan kerja



**3.2.5.5 Penjelasan Pencapaian IKU 6 : Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas**



Gambar 3.7
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 :
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kota Sukabumi
Tahun 2025**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPKKU) merupakan alat ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan trantibumlinmas. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penegakan Perda, serta menjadi dasar perencanaan program dan penguatan kapasitas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPKKU) sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, efektivitas pelayanan dasar, serta kebutuhan nyata dalam perencanaan program dan anggaran. Hal ini juga membantu memetakan kualitas penegakan Perda, manajemen SDM/sarana, dan akuntabilitas. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPKKU) mencerminkan kinerja pelayanan pemerintah daerah yang baik, efektif, dan akuntabel dalam menegakkan peraturan daerah, menciptakan stabilitas sosial, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

No	Wilayah	Subdimensi							Dimensi			IPKKU	Kategori
		Strategi		SDM		Sistem							
		Penegakkan Perda	Penyelenggaraan Trantibum	Pemberdayaan SDM	Peningkatan Kapasitas SDM	Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Anggaran	Akuntabilitas	Strategi	SDM	Sistem		
21	Kota Sukabumi	60.45	76.57	83.78	33.33	80.23	84.91	79.96	71.20	58.55	82.50	68.53	Baik

Gambar 3.8

Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPKKU) Kota Sukabumi Tahun 2025

*Sumber : Surat Hasil IPKKU Nomor : 300.5.6/e.70/BAK Kemeterian Dalam Negeri,
2026*

Dengan realisasi target sebesar 90,17 persen atau 68,53 poin dari target 76 poin termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas kota sudah berjalan pada jalur yang benar, namun masih terdapat ruang perbaikan pada sub-dimensi tertentu (terutama sub-dimensi peningkatan kapasitas SDM) untuk mencapai kesempurnaan target. Indeks ini tidak berdiri sendiri, melainkan gabungan dari beberapa parameter kunci yang dikelola oleh Satpol PP dan Pamdam Kebakaran dan instansi terkait.

Keberhasilan mencapai angka 68,53 poin didukung oleh faktor-faktor strategis berikut:

1. Respons Cepat

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran memiliki inovasi Pelayanan Cepat Tanggap (SATPOLDAM) yaitu Sistem layanan terpadu yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons terhadap aduan masyarakat.

2. Optimalisasi Patroli Gabungan (Sinergitas TNI/Polri)

Kerja sama yang solid antara Pemerintah Kota Sukabumi melalui Satpol PP dengan Unsur Forkopimda (Polres Sukabumi Kota dan Kodim 0607) dalam patroli rutin "Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan" (KRYD) berhasil menekan angka gangguan keamanan di malam hari. Selain itu Inovasi SIKOPPDA (Strategi Kolaborasi Penegakan Perda/Perkada) juga mendukung kolaborasi antara Satpol PP dan DAMkar dan Perangkat Daerah lain untuk memastikan penegakan peraturan berjalan efektif.



3. Pendekatan Humanis dalam Penertiban

Keberhasilan dalam menata kawasan publik (seperti pedestrian Ahmad Yani) dengan pendekatan persuasif kepada PKL meminimalisir konflik fisik. Hal ini berdampak positif pada penilaian indeks dari sisi stabilitas sosial.

4. Penguatan Peran Linmas Kelurahan

Revitalisasi peran Linmas sebagai garda terdepan di 33 kelurahan membantu deteksi dini potensi gangguan keamanan sebelum menjadi skala besar, terutama dalam menghadapi dinamika pasca-pemilu atau acara besar di tahun 2025.

Realisasi target sebesar 90,17 persen juga dapat menggambarkan bahwa perlunya beberapa perbaikan pada beberapa sub-dimensi yang mendukung pencapaian IPKKU terutama pada sub-dimensi Peningkatan kapasitas SDM dimana pada hasil evaluasi memiliki nilai terendah yakni 33,33 poin. Peningkatan kapasitas SDM merupakan komponen krusial dalam IPKKU. Dimensi ini sering menjadi area perbaikan untuk menguatkan kinerja Satpol PP dan profesionalisme. Aspek kunci yang perlu perbaikan dalam sub-dimensi Peningkatan kapasitas SDM adalah Peningkatan Kualitas Personel dan Penguatan SDM Trantibumlinmas.

Berdasarkan Logical Frame Work pencapaian tujuan kedua yakni terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif terutama pada sasaran Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib ditunjang oleh indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas diampu oleh program utama yakni peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk indeks peningkatan ketentraman dan

ketertiban umum, dibangun berdasarkan pemenuhan indikator Presentas gangguan trantibumlinmas yang terselesaikan. Berikut ini adalah capaian program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2025 :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100%	100%	100%

Sumber : di olah oleh Satpol PP dan Damkar

Capaian indikator ini di dapat dari perhitungan jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 27 laporan pengaduan di bagi target jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk sebanyak 27 laporan maka capaian dari indikator tersebut yaitu 100%.

2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	$\frac{\text{Perda atau perkada yang di tegakan}}{\text{Target perda atau perkada yang di tetapkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%

Sumber : di olah oleh Satpol PP dan Damkar

Capaian indikator ini di dapat dari perhitungan jumlah pelanggar Perda atau Perkada yang di tegakan sebanyak 10 pelanggaran di bagi target pelanggaran perda/perkada

sebanyak 10 Pelanggaran maka hasil capaian kinerja indikator ini yaitu 100%.

3.2.5.6 Penjelasan Pencapaian IKU 7 : Indeks Warisan Budaya



Gambar 3.9
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 :
Indeks Warisan Budaya Kota Sukabumi Tahun 2025**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Indeks Warisan Budaya merupakan alat ukur strategis yang objektif dan berkelanjutan untuk mengukur capaian kinerja pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Indeks ini berfungsi sebagai basis formulasi kebijakan, memantau partisipasi publik, dan mengevaluasi strategi pemajuan kebudayaan.

Pengukuran Indeks Warisan Budaya sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pembangunan kebudayaan, efektivitas pelestarian, serta kualitas pengelolaan aset warisan budaya. Data ini membantu merumuskan kebijakan berbasis bukti, memantau keragaman budaya, dan memastikan pembangunan sektor budaya berjalan seimbang. Indeks ini dihitung berdasarkan beberapa parameter kunci yang mencakup aspek benda maupun tak benda.

Pada tahun 2025, Kota Sukabumi mencatatkan skor 32,46 poin untuk Indeks Warisan Budaya. Jika dibandingkan dengan target rencana strategis sebesar 38,85 poin, maka rasio ketercapaian realisasinya adalah 84%. Dalam evaluasi kinerja pembangunan kebudayaan, angka 84% dapat diinterpretasikan sebagai capaian yang "Tinggi". Meskipun belum menyentuh angka 100% dari target, nilai ini menunjukkan adanya progres dalam upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di tengah tantangan modernisasi kota. Pencapaian 32,46 poin didukung oleh beberapa faktor strategis, diantaranya:

1. Penetapan Objek Cagar Budaya Baru

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) terus melakukan verifikasi dan sidang penetapan terhadap bangunan-bangunan bersejarah era kolonial (seperti rumah pengasingan Hatta-Syahrir, Gereja Sidang Kristus, dan Balai Kota Sukabumi) untuk masuk ke dalam register resmi.

2. Aktivasi Ruang Budaya dan Festival

Penyelenggaraan event berkala seperti Sukabumi Fashion & Culinary Night atau festival seni tradisional membantu menjaga eksistensi Warisan Budaya Tak Benda. Hal ini meningkatkan poin pada indikator "Pemanfaatan Budaya".

3. Digitalisasi Inventarisasi Budaya

Penggunaan platform digital untuk mendata cagar budaya mempermudah akses informasi bagi peneliti dan masyarakat, yang secara teknis meningkatkan transparansi data dalam penilaian indeks kebudayaan.

4. Sinergi dengan Komunitas Lokal

Keterlibatan aktif komunitas sejarah (seperti Yayasan Dapuran Kipahare) dalam memberikan masukan dan edukasi kepada masyarakat menjadi katalisator dalam upaya penyelamatan objek diduga cagar budaya (ODCB).

Kesenjangan terhadap realisasi yang belum menyentuh target 38,85 poin (selisih 16% dari 100%) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kepemilikan privat dimana bangunan bersejarah yang dimiliki oleh pihak swasta/perorangan, sehingga pemerintah terkendala dalam melakukan intervensi fisik atau pemugaran. Anggaran pemeliharaan atau alokasi dana untuk kompensasi pemilik cagar budaya atau biaya restorasi yang cukup tinggi belum sepenuhnya mencukupi seluruh daftar prioritas dan tantangan dalam menjaga keaslian (otentisitas) bangunan ditengah desakan pembangunan ekonomi dan komersialisasi pusat kota.

Capaian 84% menunjukkan komitmen yang kuat namun memerlukan akselerasi. Strategi ke depan harus lebih fokus pada insentif bagi pemilik bangunan cagar budaya dan penguatan narasi sejarah agar warisan budaya memiliki nilai ekonomi (melalui heritage tourism) sehingga pelestariannya bersifat mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan Logical Frame Work pencapaian tujuan kedua yakni terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif terutama pada sasaran Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya ditunjang oleh indikator Indeks Warisan Budaya diampu oleh program utama

yakni Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator Persentase Warisan Budaya yang ditetapkan. Berikut ini adalah capaian program Pengembangan Kebudayaan tahun 2025 :

1. Program Pengembangan Kebudayaan yang meliputi Rapat Teknis dan Lokakarya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan OPK dan Pembuatan Film Dokumenter WBTB.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang meliputi Peningkatan Kompetensi SDM Kesenian Melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian dan Bimtek/Workshop Tata Kelola Lembaga Kesenian dan Roadshow peningkatan kreatifitas dan pengalaman dalam pengelolaan komunitas seni dan kualitas pementasan seni.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya yang meliputi Pendaftaran /Pencatatan dan Verifikasi Cagar Budaya, Rekomendasi dan Penetapan Cagar Budaya, dan Pelaksanaan Kajian Terhadap Objek diduga Cagar Budaya.
4. Program Pengelolaan Permuseuman yang meliputi Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum.
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra yang meliputi Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kab/Kota melalui Lomba Festival Bahasa Ibu.

3.2.5.7 Penjelasan Pencapaian IKU 8 : Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan



Gambar 3.10
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 :
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan**
Kota Sukabumi Tahun 2025

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Sasaran terwujudnya Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif diampu oleh pengampu utama (*leading sector*) yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sukabumi. Pencapaian sasaran masyarakat kota yang inklusif dilihat dari pencapaian indikatornya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan alat ukur komposit yang digunakan oleh BKKBN untuk menilai sejauh mana aspek kependudukan diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah. IPBK mengkaji keberhasilan proses pembangunan dalam meningkatkan kualitas SDM dan menempatkan penduduk sebagai pusat pembangunan. IPBK menjadi alat ukur komposit untuk mengukur kondisi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) melalui berbagai dimensi indikator. IPBK menjadi indikator kunci untuk memastikan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak positif pada kualitas hidup penduduk secara berkelanjutan

Tahun 2025, Kota Sukabumi mencatatkan skor 55,5 poin untuk IPBK. Jika dibandingkan dengan target rencana strategis sebesar 60,1 poin, maka rasio ketercapaian realisasinya adalah 92.34%. Dalam evaluasi kinerja, angka 92.34% dapat diinterpretasikan sebagai capaian yang "Sangat Tinggi". Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah mengintegrasikan variabel kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dengan sangat baik, meskipun terdapat selisih (gap) sebesar 4,6 poin untuk mencapai target ideal.

Tabel 3.5
Capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Kota Sukabumi Tahun 2025

No	Indeks Dimensi	Poin
1	Partisipasi	71,3
2	Keberlanjutan	43,4
3	Inklusivitas	48,8
4	Holistik Integraf	56,6

5	Kesetaraan	61,6
	IPBK	55,5
	Status IPBK	2

Sumber : Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas IPBK disusun berdasarkan lima dimensi utama dengan indikator spesifik yang diatur oleh BKKBN. Capaian poin tertinggi ada pada dimensi Partisipasi sedangkan yang terkecil ada dimensi Keberlanjutan. Meskipun mencapai realisasi 92,34%, terdapat selisih 4,6 poin dari target 60,1 yang disebabkan oleh ketimpangan kepadatan dimana konsentrasi penduduk masih terpusat di beberapa kecamatan tengah kota, sementara wilayah pinggiran masih memiliki ruang yang cukup luas, yang mempengaruhi penilaian pilar persebaran dan seiring meningkatnya Usia Harapan Hidup (75,45 tahun), tantangan dalam menyediakan fasilitas ramah lansia menjadi variabel baru yang harus ditingkatkan untuk mencapai skor IPBK maksimal. Meskipun capaian realisasi belum sesuai dengan target strategis, namun ada beberapa faktor yang mendorong realisasi ketercapaian sebesar 92,34 persen diantaranya yaitu :

1. Keberhasilan Program Bangga Kencana
Integrasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kota Sukabumi berjalan efektif. Penguatan peran Kampung KB di setiap kelurahan menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga.
2. Akurasi Data dan Digitalisasi Layanan Adminduk
Pemerintah Kota Sukabumi berhasil meningkatkan kualitas data kependudukan. Dengan data yang akurat (Satu Data Indonesia), perencanaan pembangunan di

sektor kesehatan (stunting) dan pendidikan menjadi lebih tepat sasaran, yang secara otomatis meningkatkan skor IPBK

3. Penurunan Angka Stunting yang Signifikan

Sebagai salah satu pilar kualitas penduduk, keberhasilan Kota Sukabumi menekan angka stunting hingga mendapatkan insentif fiskal nasional pada akhir 2025 memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan poin indeks ini.

4. Keselarasan Kebijakan

Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RKPD) telah menggunakan analisis profil kependudukan sebagai basis utama. Hal ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur maupun sosial di Sukabumi selaras dengan dinamika struktur umur penduduk (Bonus Demografi).

Berdasarkan Logical Frame Work pencapaian tujuan kedua yakni terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif terutama pada sasaran Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif ditunjang oleh indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan diampu oleh program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dengan indikator persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda. Untuk indikator tersebut hanya dua indikator yang sudah ada angka realisasinya yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG)

sebesar 105 persen dan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda sebesar 100 persen.

3.2.5.8 Penjelasan Pencapaian IKU 9 : Indeks Kota Kreatif



Gambar 3.11
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 :
Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2025**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Sasaran terwujudnya masyarakat yang kreatif dan berbudaya diampu oleh pengampu utama (leading sector) yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya masyarakat yang kreatif dan berbudaya dilihat dari pencapaian indikatornya yaitu Indeks Kota Kreatif.

Kota kreatif ditandai sebagai kota yang memiliki identitas kuat yang mengakar kepada keunikan karakter. Para pemangku kepentingan di kota tersebut memiliki pemahaman tentang apa yang menjadi kekuatan yang akan menjadikan kota mereka berbeda dibandingkan kota-kota lainnya. Namun secara umum kota kreatif ditandai dengan karakter yang terbuka, memiliki jejaring yang luas, masyarakat yang cair dan dinamis, selalu terbuka dengan hal-hal yang baru serta mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide kontemporer. Kota kreatif adalah salah satu strategi baru di mana orang-orang di dalam kota dapat berpikir, berencana, dan bertindak melalui cara-cara yang kreatif. Gelar kota kreatif yang telah diberikan kepada beberapa kota, salah satunya seperti Kota Sukabumi, telah menjadi bukti bahwa pemerintah telah memberikan perhatian kepada potensi kota yang bersangkutan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

INDIKATOR	POIN STANDAR	POIN PENCAPAIAN	KETERANGAN
Dokumen 1. Indikator Budaya, Rekreasi, dan Pariwisata (BRP)	10	10	
1.1. Ketersediaan tempat wisata (wisata alam, budaya, buatan)	4	4	
1.1.1. Tabel tempat objek wisata	1	1	Buku Sukabumi Destinasi Wisata Juara
1.1.2. Peraturan/dokumen resmi	1	1	Ripanda
1.1.3. Peta persebaran tempat wisata	1	1	Buku Sukabumi Destinasi Wisata Juara
1.1.4. Publikasi tempat wisata	1	1	Somed, Buku Sukabumi Destinasi Wisata Juara
1.2. Jumlah pengunjung lokasi pariwisata	2	2	
1.2.1. Tabel pengunjung lokasi pariwisata tahun 2024 dan 2025	1	1	Laporan Kunjungan Wisatawan 2024 dan 2025
1.2.2. Bagikan grafik pengunjung lokasi pariwisata dari tahun 2024 ke 2025	1	1	Laporan Kunjungan Wisatawan 2024 dan 2025
1.3. Integrasi tempat wisata dengan industri kreatif di sekitarnya	2	2	
1.3.1. Data/foto dari jenis produk/jasa kreatif yang ditampilkan/dipasarkan di Tempat	1	1	produk ekraf al fath
1.3.2. Penjelasan mengenai identitas atau budaya lokal atau produk kreatif di Tempat	1	1	produk ekraf al fath
1.4. Keunggulan	1	1	1.1. Ketersediaan tempat wisata (wisata alam, budaya, buatan)
1.5. Tantangan	1	1	1.1. Ketersediaan tempat wisata (wisata alam, budaya, buatan)
Dokumen 2. Indikator Luaran dan Pekerja Kreatif (LPK)	6	6	
2.1. Fasilitas Pemerintah Kota/Kabupaten terhadap pekerja kreatif	6	6	
2.1.1. Fasilitas (Pemerintah Kota/Kabupaten) terhadap HKI (paten, hak cipta, ds)	3	3	laporan hki, tata cara dan manfaat hki
2.1.2. Fasilitas (Pemerintah Kota/Kabupaten) terhadap dan Legalitas Usaha Ekonomi Kreatif	3	3	dokumentasi di dpmptsp
2.2. Keunggulan	1	1	Pemerintah Kota Sukabumi berperan dalam memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif
2.3. Tantangan	1	1	Fasilitas yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan ekonomi
Dokumen 3. Indikator Tempat, Fasilitas, dan Sumber Daya (TFS)	12	12	
3.1. Infrastruktur Fisik Pendukung Ekonomi Kreatif	5	5	
3.1.1. Coworking Space dari Pemerintah Provinsi - Kota/Kabupaten atau Swasta	1	1	Aula Kantor Komite Ekonomi Kreatif
3.1.2. Pusat Kreasi Rumah Kreatif	1	1	Galeri Batik Fractal, Roemah Keboren, Aula Kantor Komite Ekonomi Kreatif, sentra penjualan ekraf (Galeri Dekranasda Kota)
3.1.3. Pasar Berizin dengan/tanpa Bangunan Permanen	1	1	
3.1.4. Pasar Kreatif Berizin dalam acara atau pada fasilitas akomodasi lokasi	1	1	
3.1.5. Museum Pendukung Ekonomi Kreatif atau Balai Pertunjukan atau Gedung	5	1	Museum Pegadalan, Museum Tonghwa, Plaza Gedung Joeang
3.1.6. Restoran/Tempat Makan/Pusat Oleh-Oleh Pendukung Ekonomi Kreatif	1	1	Pusat oleh-oleh mochi, Galeri Dekranasda
3.1.7. Taman Pendukung Ekonomi Kreatif	1	1	Taman Nobar
3.1.8. Infrastruktur Pengolahan limbah (IPAL Komunal) Pendukung Ekonomi Kreatif	1	1	Batik fractal, Batik Lokatmala
3.2. Sumber Daya Alam Bahan Baku	5	5	
3.2.1. Supply bahan baku dapat dipenuhi oleh kabupaten/kota tersebut	3	3	kerajinan bambu batik lokatmala
3.2.2. Supply bahan baku domestik lainnya (kota/kabupaten/provinsi)	1	1	
3.2.3. Supply bahan baku impor	1	1	Cariknya Bahan Baku Impor
3.3. Keunggulan	1	1	3.1. Infrastruktur Fisik Pendukung Ekonomi Kreatif
3.4. Tantangan	1	1	3.1. Infrastruktur Fisik Pendukung Ekonomi Kreatif
Dokumen 4. Indikator SDM, Talenta & Pendidikan (STP)	6	5	
4.1. Pendidikan Formal Ekonomi Kreatif	2	2	
4.1.1. Sekolah dengan jurusan subsektor Ekonomi Kreatif	2	2	SMK 3
4.1.2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) dengan fokus Pelatihan Ekonomi Kreatif	1	1	Bumi Kreatif Institut
4.1.3. Contoh Lembaga Keterampilan Subsektor Ekraf	1	1	Lawungkala
4.2. Pendidikan Non-Formal Ekonomi Kreatif	2	1	
4.2.1. Pelatihan, Pembimbingan Teknis, dan Pendampingan berbasis Komunitas	1	1	
4.2.2. Pelatihan ekonomi kreatif berbasis daring	1	1	• Terdapat berbagai pelatihan ekonomi kreatif yang diinisiasi oleh berbagai dinas
4.3. Keunggulan	1	1	• Kuasar sumber daya manusia di Kota Sukabumi masih belum merata sehingga
4.4. Tantangan	1	1	
Dokumen 5. Indikator Pemerintah & Regulasi (PR)	10	17	
5.1. Kelembagaan Khusus Ekraf Dalam Institusi Pemerintahan Tingkat	2	2	
5.1.1. Kota/kabupaten memiliki Kelembagaan Khusus Ekraf dalam institusi Pemerintahan Tingkat Daerah	2	2	SK Komite Ekraf
5.2. Rencana Pembangunan Daerah Terkait Ekonomi Kreatif	4	4	
5.2.1. Peta Jalan (Roadmap) Ekonomi Kreatif Kota/Kabupaten	1	1	Roadmap Komite Ekraf
5.2.2. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota/Kabupaten yang memuat rencana ekonomi kreatif	1	1	RPJPD
5.2.3. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota/Kabupaten yang memuat rencana ekonomi kreatif	1	1	RPJMD
5.2.4. Rencana Kerja (Renja) Kota/Kabupaten yang memuat rencana ekonomi kreatif	1	1	RKPD
5.3. Peraturan terkait Ekonomi Kreatif	1	1	
5.3.1. Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwal) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang memuat ketentuan tentang ekonomi kreatif kota/kabupaten	1	1	RPJMD
5.4. Fasilitas Pembiayaan terkait Ekonomi Kreatif	2	2	
5.4.1. Pembentukan Badan Layanan Umum yang menyediakan fasilitas pembiayaan khusus perhal ekonomi kreatif	1	1	
5.4.2. Fasilitas Pengembangan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual	1	1	Fasilitas pembiayaan dikumindag melalui pelatihan, KUR BJB, Qordus Hasan
5.5. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan	2	1	Fasilitas Pendaftaran HKI
5.5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten yang memuat anggaran ekonomi kreatif	1	1	DPA 2025
5.5.2. Sumber Pendapatan Lain yang Sah	1	0	-
5.6. Program Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19	2	2	
5.6.1. Program subsidi bunga/ subsidi margin untuk pelaku ekonomi kreatif	1	1	Fasilitas HKI Gratis (Dokumentasi, Surat, dll)
5.6.2. Program lainnya yang mendukung ketahanan pelaku ekonomi kreatif pasca pandemi Covid-19	1	1	sve, ssm, lawungkala, pakansi
5.7. Rencana Tata Ruang Daerah yang Memuat Ekonomi Kreatif	2	2	
5.7.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kab (RDTRK) yang sudah direalisasi	2	2	
5.8. Fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB)	1	1	
5.8.1. Kota/kabupaten memberikan fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB)	1	1	data di dpmptsp
5.9. Keunggulan	1	1	5.1. Kelembagaan Khusus Ekraf Dalam Institusi Pemerintahan Tingkat Daerah
5.10. Tantangan	1	1	5.1. Kelembagaan Khusus Ekraf Dalam Institusi Pemerintahan Tingkat Daerah
Dokumen 6. Indikator Fasilitas Non-Infrastruktur (Digitalisasi & TI) (DTI)	10	10	
6.1. Fasilitas Pengembangan Teknologi Dunia Usaha	1	1	
6.1.1. Dukungan fasilitas untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha	1	1	Lawungkala
6.2. Fasilitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	7	7	
6.2.1. Platform website komunitas dinas yang membawahi ekonomi kreatif	1	1	disporapar, dekranasda, KEK
6.2.2. Database pelaku kreatif	1	1	
6.2.3. Cakupan internet	1	1	ss google
6.2.4. Dinas/Komite Ekonomi Kreatif/Pemerintah memanfaatkan online marketing platform untuk mempromosikan output kegiatan kreatif	1	1	instagram : disporapar, KEK, Dekranasda, dapur ngukir
6.2.5. Pelaku ekonomi kreatif memiliki website	1	1	lokatmala, point trash, dekranasda
6.2.6. Pelaku ekonomi kreatif memiliki media sosial	1	1	ss ig
6.2.7. Pelaku ekonomi kreatif menggunakan marketplace	1	1	ss marketplace
6.3. Keunggulan	1	1	6.1. Fasilitas Pengembangan Teknologi di Dunia Usaha
6.4. Tantangan	1	1	6.1. Fasilitas Pengembangan Teknologi di Dunia Usaha
Dokumen 7. Indikator Modal & Partisipasi Budaya (MPB)	10	10	
7.1. Resiliensi Komunitas Kreatif	1	1	
7.1.1. Pelaksanaan kegiatan komunitas kreatif pasca pandemi	1	1	ssm, sve, lawungkala, pakansi, motor fest
7.2. Ketersediaan Komunitas Kreatif	2	2	
7.2.1. Jumlah komunitas kreatif di kabupaten/kota beserta dengan variasinya	2	2	list data komunitas di kota sukabumi
7.3. Alokasi Anggaran Ekonomi Kreatif	2	2	
7.3.1. Alokasi anggaran dari dinas terkait untuk sektor ekonomi kreatif di kota/kabupaten	2	2	DPA 2025
7.4. Partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif	2	2	
7.4.1. Keterlibatan pelaku-pelaku kreatif dalam musrembang/diskusi antar stakeholder	1	1	Dokumentasi Kegiatan, List yang hadir
7.4.2. Partisipasi pelaku-pelaku kreatif dalam kegiatan komunitas ekonomi kreatif	1	1	Dokumentasi Kegiatan, List yang hadir Lawungkala, pakansi
7.4.3. Partisipasi pelaku-pelaku kreatif dengan Asosiasi Dinas/ Komite/ Institut	1	1	7.1. Resiliensi Komunitas Kreatif
7.5. Keunggulan	1	1	7.1. Resiliensi Komunitas Kreatif
7.6. Tantangan	1	1	
Dokumen 8. Indikator kewirausahaan (K)	12	10	
8.1. Tingkat Inovasi Pelaku Ekonomi Kreatif	2	0	
8.2. Indikator Bisnis	2	2	
8.2.1. Jangkauan Pasar	3	3	Dokumentasi Kegiatan Bumi Institut
8.2.2. Badan Hukum	3	3	Database ekraf tambahkan list jangkauan pasarnya
8.3. Keunggulan	1	1	List Dari Bu Dinar
8.4. Tantangan	1	1	8.1. Tingkat Inovasi Pelaku Ekonomi Kreatif
8.5. Tantangan	1	1	8.1. Tingkat Inovasi Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen 9. Indikator Aktivitas Bisnis & Ekonomi (ABE)	4	4	
9.1. Standardisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi	1	1	DPMPTSP
9.2. Subsektor Ekonomi Kreatif Unggulan	1	1	
9.3. Keunggulan	1	1	9.1. Standardisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi
9.4. Tantangan	1	1	9.1. Standardisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi
Dokumen 10. Indikator Transportasi & Aksesibilitas (TA)	10	2	
10.1. Aksesibilitas ke Daerah Pariwisata Kreatif	6	0	bisa dijelaskan hubungan antara peta transportasi dengan destinasi pariwisata/
10.2. Integrasi Moda Transportasi	2	1	
10.3. Keunggulan	1	1	Kota Sukabumi memiliki akses transportasi yang mampu mencapai Bandara baik di
10.4. Tantangan	1	1	Belum tersedia fasilitas transportasi berstandar nasional & internasional
Total Poin	100	88	

Gambar 3.12

Nilai Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2025

(Sumber: Disporapar Kota Sukabumi, 2025)

Pada Tahun 2025, Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi adalah 88 poin dengan tingkat capaian sebesar 100,15 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu 87,86. Capaian melampaui 100% ini menandakan bahwa ekosistem ekonomi kreatif di Kota

Sukabumi tidak hanya tumbuh secara alami, tetapi juga didorong oleh kebijakan pemerintah yang efektif. Skor 88 berada pada kategori **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan bahwa Kota Sukabumi telah berhasil mengintegrasikan kreativitas ke dalam pilar pembangunan ekonomi daerah. Pencapaian di atas 100% ini mengukuhkan posisi Kota Sukabumi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi kreatif (Ekraf) di Sukabumi telah bergerak dari fase inisiasi menuju fase akselerasi yang berkelanjutan.

Sukabumi merupakan kota yang memiliki potensi dalam menjalankan industri kreatif. Pelaku ekraf di Kota Sukabumi didominasi dari sub sektor kriya, fashion dan kuliner. Keberhasilan melampaui target ini didorong oleh beberapa faktor strategis yang saling terintegrasi:

1. Optimalisasi Ruang Kreatif (Creative Hub)

Pemerintah Kota Sukabumi sukses mengaktivasi ruang-ruang publik dan gedung bersejarah sebagai pusat kreativitas. Pemanfaatan pusat kreatif sebagai wadah kolaborasi antar-komunitas seni dan UMKM terbukti meningkatkan nilai tambah produk lokal.

2. Konektivitas Infrastruktur (Tol Bocimi)

Beroperasinya Tol Bocimi secara penuh di tahun 2025 memberikan dampak instan pada sektor Kuliner dan Kriya. Akses yang lebih cepat dari Jakarta dan Bandung meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang secara langsung meningkatkan volume konsumsi produk kreatif lokal.

3. Digitalisasi Pemasaran dan Ekonomi Inklusif

Banyak pelaku Ekraf Sukabumi yang telah bermigrasi ke ekosistem digital. Dukungan pemerintah dalam memfasilitasi onboarding UMKM kreatif ke platform e-

commerce dan penggunaan sistem pembayaran nontunai (QRIS) mempercepat perputaran ekonomi kreatif di tingkat akar rumput. Masifnya digitalisasi pemasaran bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal, sehingga pasar produk Sukabumi menjangkau luar daerah.

4. Keberhasilan Event Tematik (City Branding)

Penyelenggaraan event berkala seperti Jemari “Sukabumi Menyala” Expo, Pekan kreatif, Pameran Seni LawungKala, Pekan Kopi Sukabumi, dll. yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan perputaran uang di sektor kreatif.



5. Sinergi Pentahelix

Kerja sama yang solid antara pemerintah (Disporapar), komunitas (Sukabumi Creative Hub), dan akademisi dalam memetakan serta membina potensi kreatif

Selain itu adapun faktor lain yang mendukung dalam pencapaian indeks ekonomi kreatif yaitu program Program Pengembangan UMKM. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan secara terarah, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 telah memberikan fondasi kuat berupa peningkatan kapasitas, legalitas,

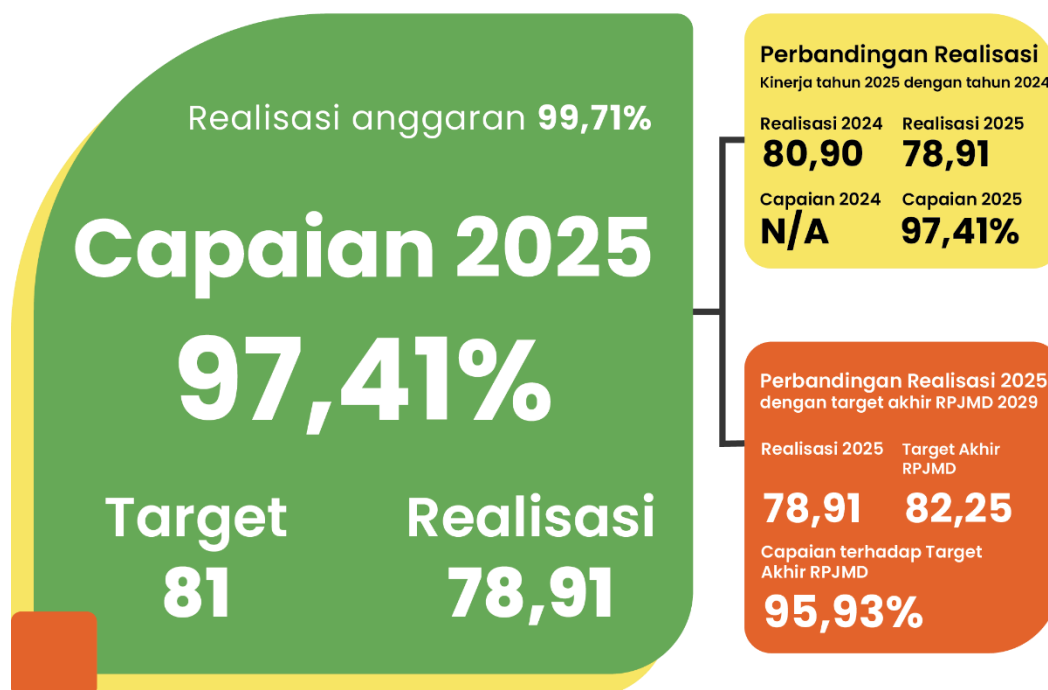
dan akses pasar yang berpotensi meningkatkan persentase UMKM naik kelas pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan capaian indikator ini, direncanakan:

1. Penguatan pendampingan pasca pelatihan
2. Seleksi UMKM potensial berbasis database
3. Integrasi program kemitraan dengan pembiayaan
4. Monitoring perkembangan omzet dan legalitas secara berkala



3.2.5.9 Penjelasan Pencapaian IKU 11 : Indeks Ketahanan Pangan

11. Indeks Ketahanan Pangan



Gambar 3.13
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 :
Indeks Kota Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2025**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Sasaran Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota diampu oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi sebagai pengampu utama (leading sector). Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota ditentukan oleh Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan

pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk mengetahui capaian kinerja ketahanan pangan dan gizi, memetakan wilayah rentan rawan pangan, serta menentukan prioritas intervensi program secara tepat sasaran. IKP membantu pemerintah kota mengukur ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Tabel 3.6

Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi

No	Indeks	Poin
1.	Indeks Ketersediaan	70,41
2.	Indeks Keterjangkauan	86,87
3.	Indeks Pemanfaatan	79,57
Total (Indeks Komposit)		78,91
Prioritas Komposit		4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Sukabumi tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik secara administratif, meskipun secara angka nominal belum menyentuh target absolut yang ditetapkan. Capaian sebesar **97,41 persen** dikategorikan sebagai kinerja yang **Sangat Tinggi**. Meskipun secara angka absolut belum menyentuh target 81 poin, skor 78,91 secara nasional menduduki peringkat 73 dan juga menunjukkan bahwa Kota Sukabumi berada pada zona **Agak Tahan Pangan (Prioritas Komposit 4)**. Selisih sebesar 2,59% biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan musiman dan ketergantungan pasokan dari luar daerah karena keterbatasan lahan pertanian perkotaan. Pada Kota Sukabumi bobot indikator IKP bertumpu pada pilar

ketersediaan, sejauh mana lahan pertanian di wilayah Cibeureum atau Baros mampu menyuplai kebutuhan kota dan ketersediaan stok beras yang dikelola pemerintah kota untuk kondisi darurat. Pilar keterjangkauan dimana Kemampuan masyarakat mengakses pasar tanpa tekanan inflasi yang dan kelancaran akses jalan dan fungsi pasar tradisional dalam menyalurkan komoditas dari luar daerah. Pilar Pemanfaatan, persentase rumah tangga dengan akses air layak dan kualitas konsumsi masyarakat yang tercermin pada status kesehatan balita.

Capaian realisasi sebesar 97,41 persen didorong oleh beberapa faktor di tahun 2025:

1. Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Meskipun Kota Sukabumi adalah daerah urban, perlindungan terhadap sisa lahan pertanian di pinggiran kota menjaga kontribusi produksi lokal. Langkah ini krusial untuk mengatasi alih fungsi lahan, menjaga produktivitas lokal, serta memitigasi dampak perubahan iklim dan inflasi pangan

2. Efektivitas Operasi Pasar

Langkah proaktif Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) dalam melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) saat terjadi lonjakan harga. Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah yang terjadwal efektif menekan laju inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

3. Konektivitas Wilayah

Sebagai kota pusat pelayanan, akses fisik masyarakat menuju pasar tradisional maupun modern di Sukabumi sangat baik, sehingga distribusi pangan tidak terhambat. Selain itu, kedekatan geografis dengan daerah produsen

(Kabupaten Sukabumi dan Cianjur) memudahkan mobilisasi pangan sehingga stok selalu terjaga.

4. Sinergi Program Stunting

Integrasi antara intervensi gizi dan ketahanan pangan keluarga (seperti program Pangan Lestari) memperkuat pilar pemanfaatan. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Sukabumi pada 2025 difokuskan sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan dan penurunan stunting, terutama melalui program PALING KURINDU (Penurunan Angka Prevalensi Stunting Melalui Pengembangan Kawasan Urban Farming Pangan Terpadu dan P2L) yang diluncurkan oleh DKP3. Program ini menekankan pada budidaya sayuran dan protein hewani untuk gizi keluarga.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang mendukung capaian realisasi indeks ketahanan pangan diantaranya:

1. Gerakan Pangan Murah (GPM)

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui DKP3 Kota Sukabumi pada tahun 2025 telah menyelenggarakan Gelar Pangan Murah (GPM) sebanyak 30 kali yang dilaksanakan di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi.



2. Pemantauan Stabilitas Pasokan dan Ketersediaan Pangan

Pemantauan stabilitas pasokan dan ketersediaan pangan dilakukan dalam upaya memastikan kelancaran distribusi beras, telur, daging, minyak, dan komoditas lainnya di Kota Sukabumi. Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait baik internal maupun eksternal melakukan pemantauan di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Sukabumi terutama pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti menjelang Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Natal serta Tahun baru.

3. Bantuan Pangan

Pada tahun 2025, terdapat 100 paket bantuan pangan yang disalurkan kepada 100 orang masyarakat Kota Sukabumi yang berpotensi stunting sesuai dengan peta kehatanan dan kerentanan pangan. Disamping itu, dilaksanakan juga kegiatan Gemarikan (Gemar Makan Ikan) untuk sekitar 300 orang siswa SD di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

4. Produktifitas Pertanian

Produktivitas pertanian (GKP) pada tahun 2025 sudah cukup baik. Produktivitas pertanian (GKP) pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100,59%. Pencapaian produktivitas pertanian ini dipengaruhi oleh luas lahan pertanian yang mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), produksi padi, luas panen padi dan lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian.

5. Pengawasan Keamanan Pangan



Kondisi keamanan pangan di Kota Sukabumi tahun 2025

terbilang cukup aman. Persentase keamanan pangan tahun 2025 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 107,74%.

Pada aspek realisasi, persentase keamanan pangan ini tahun 2025 mengalami kenaikan 0,25% dari tahun 2024. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 96,97% sedangkan pada tahun 2024 tercapai 96,72%. Peningkatan persentase keamanan pangan pada tahun 2025 didukung oleh kondisi keamanan pangan segar asal tumbuhan dan pangan asal hewan termasuk ikan serta kualitas pengawasan keamanan yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2025, jumlah sampel pangan yang diperiksa sebanyak adalah 132 (seratus tiga puluh dua) sampel terdiri dari 85 sampel sayur dan buah, dan 44 sampel pangan asal ikan serta sampel pangan peternakan sebanyak 3 sampel. Lokasi pengambilan sampel yaitu Pasar Pelita, Pasar Tipar Gede, Pasar Degung, Pasar Pasundan, Yogya Dept. Store, 11 kantin sekolah di Kota Sukabumi, SPPG Anisa, SPPG Karangtengah, SPPG Gunung Puyuh, SPPG Warudoyong Bulog, SPPG Kari Am, dan SPPG Baros. Dari 132 jenis sampel yang dianalisa

tersebut, terdapat 4 sampel pangan yang terindikasi tidak aman yaitu 3 sampel pangan sayuran dan 1 sampel pangan asal ikan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh optimalnya penyelenggaraan pengawasan keamanan kepada masyarakat dalam mengedukasi mengenai keamanan pangan, memberikan penyuluhan, pelatihan dan lain-lain dalam rangka memberikan kesadaran kepada para produsen pangan baik pangan sayuran maupun pangan asal ikan dalam penggunaan bahan-bahan kimia baik dalam budidaya maupun pada proses olahannya sehingga penggunaan bahan-bahan kimia itu pada saat diuji laboratorium diketahui terdeteksi menggunakan bahan kimia melebihi ambang batas yang diijinkan.

**3.2.5.10 Penjelasan Pencapaian IKU 13 : Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)**



Gambar 3.14
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 13 :
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Kota Sukabumi Tahun 2025

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator kinerja keuangan yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari potensi lokal (pajak, retribusi, BUMD) dari tahun ke tahun untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Pertumbuhan PAD yang positif dan signifikan sangat penting

untuk membiayai belanja operasional dan pembangunan daerah secara mandiri.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dan melampaui target secara signifikan. Pada akhir tahun 2025 capaian pertumbuhan PAD Kota Sukabumi menyentuh angka 12,47 persen, dengan target 10 persen maka capaian realisasi pertumbuhan PAD mencapai angka 124,7 persen. Capaian ini mengindikasikan efektivitas reformasi birokrasi dan kemandirian fiskal daerah yang semakin menguat. Dengan melampaui target pertumbuhan sebesar 2,47% poin di tengah dinamika ekonomi menunjukkan bahwa basis pemungutan pajak dan retribusi di Kota Sukabumi telah mengalami perluasan atau intensifikasi yang sangat efektif.

Secara kuantitatif, pertumbuhan PAD Kota Sukabumi berada pada posisi *over-target*, keberhasilan pertumbuhan 12,47% ini didorong oleh empat indikator utama sesuai regulasi keuangan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah.

Pada indikator Pajak Daerah yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti hotel, restoran, hiburan, serta PBB-P2 dan BPHTB yang menjadi tulang punggung pertumbuhan PAD tahun 2025. Ketercapaian target untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 106,3 persen, sedangkan PBB-P2 sebesar 107,3 persen dan BPHTB sebesar 103,3 persen. Capaian tersebut, menunjukkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta efektivitas strategi pengelolaan pajak daerah.

Untuk indikator retribusi daerah yang meliputi Penerimaan dari layanan pasar, parkir tepi jalan umum, serta layanan kesehatan, capaian realisasinya sebesar 87,84 persen. Indikator ketiga yang meliputi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

mencapai 100 persen, dan lain-lain PAD yang sah berada di angka 90,27 persen. Capaian tersebut juga menunjukkan solidnya kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

Keberhasilan realisasi pertumbuhan melampaui target dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, yaitu:

1. Digitalisasi dan Elektronifikasi (ETPD)

Implementasi sistem pembayaran non-tunai (QRIS dan Online Banking) untuk pajak dan retribusi secara masif di Kota Sukabumi berhasil menekan kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi.

2. Optimalisasi Sektor Jasa dan Perdagangan

Sebagai kota transit dan pusat jasa, pertumbuhan pusat perbelanjaan dan kafe/restoran di wilayah seperti Jl. Ahmad Yani dan Jl. Bhayangkara memberikan kontribusi besar pada PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).

3. Intensifikasi Melalui Door-to-Door

Upaya BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah) dalam melakukan penagihan aktif dan pemutakhiran data objek pajak (khususnya PBB-P2) memastikan potensi yang selama ini tersembunyi dapat terdata kembali.

4. Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak

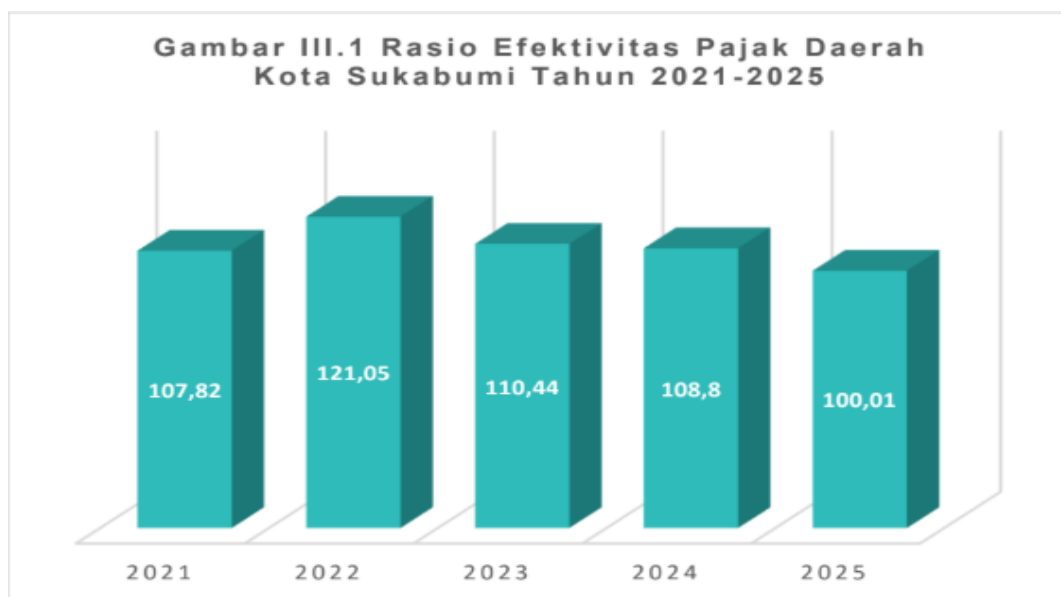
Melalui *tim 10* atau tim intensifikasi BPKPD, dilakukan pendataan ulang bangunan (PBB) dan izin usaha yang selama ini belum optimal.

5. Faktor Eksternal (Mobilitas)

Peningkatan kunjungan wisatawan atau pelintas jalan (terutama dengan adanya progres tol Bocimi) yang berdampak langsung pada pajak restoran dan hotel di dalam kota.

Ketercapaian realisasi pertumbuhan PAD tidak lepas dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta efektivitas strategi pengelolaan pajak daerah, oleh karena itu pada Desember 2025 Kota Sukabumi mengapresiasi kepada para wajib pajak yang taat dengan menggelar penganugerahan penghargaan di ajang Pajak Daerah Award 2025. Dalam ajang itu, Pemerintah Kota Sukabumi memberikan apresiasi kepada berbagai pihak seperti Perangkat Daerah pengelola retribusi, penghargaan wajib pajak, penghargaan WP PBB-P2, dan penghargaan lainnya.

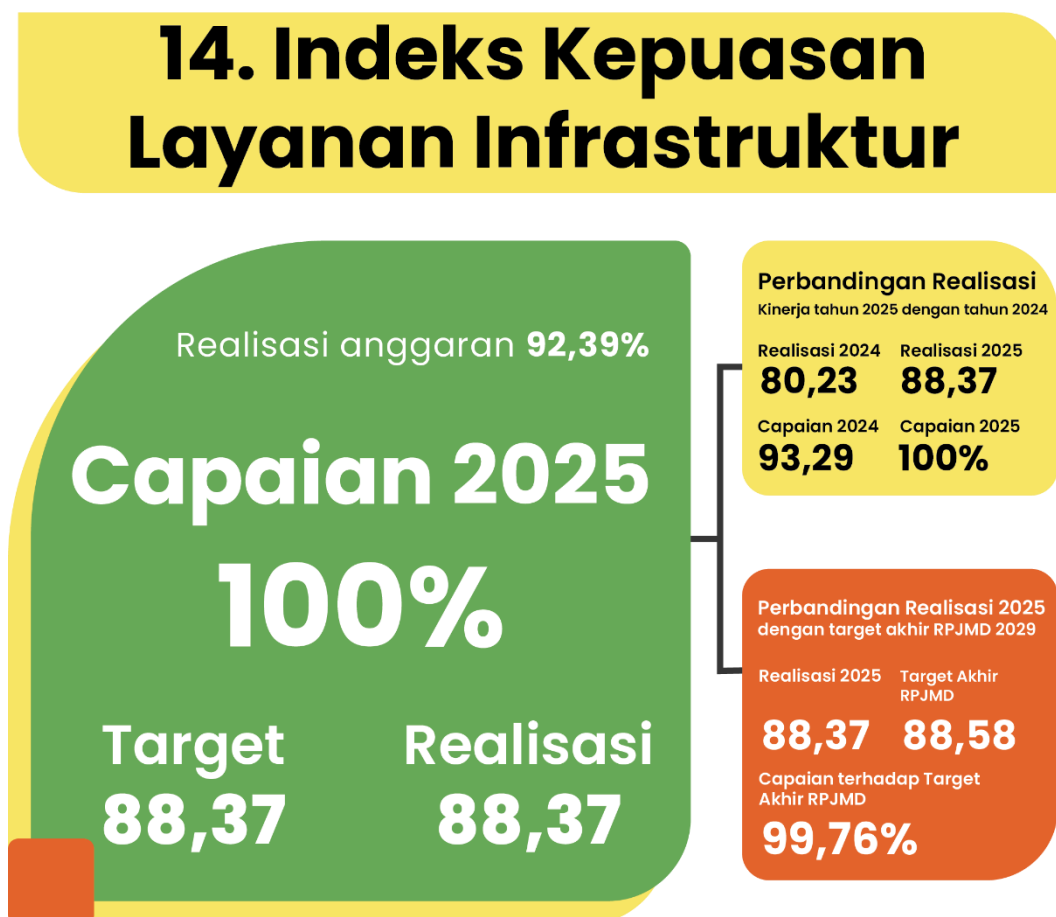
Ketercapaian realisasi pertumbuhan PAD juga tidak lepas dari program pendukungnya yaitu program pengelolaan pendapatan daerah yang memiliki indikator rasio efektivitas pajak daerah dengan capaian 100,08 persen. Rasio Efektivitas Pajak Daerah yaitu ukuran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pagu penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan pagu yang ditetapkan, kemudian dikalikan 100%. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajaknya.



Berdasarkan di atas, Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Sukabumi selama periode 2021–2025 menunjukkan capaian yang konsisten berada di atas 100%. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021–2025 menunjukkan kinerja yang konsisten efektif. Selama lima tahun berturut-turut, realisasi pajak daerah selalu memenuhi bahkan melampaui target. Meskipun terdapat tren penurunan sejak 2022, kondisi tersebut tidak mencerminkan penurunan kinerja, melainkan menunjukkan semakin optimalnya perencanaan target yang realistis serta stabilitas penerimaan pajak daerah. Dengan capaian 100,01 persen.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal sebagai hasil dari implementasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi. Keberhasilan tersebut didukung oleh empat pilar utama, yaitu digitalisasi pelayanan, penggalan potensi, penguatan data, dan pengawasan yang lebih intensif. Melalui digitalisasi pelayanan, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengoptimalkan penggunaan Aplikasi PANTAS sebagai sarana pembayaran pajak secara online yang terintegrasi dengan QRIS, Virtual Account, dan ATM. Kemudahan akses pembayaran ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat proses transaksi, serta meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan.

**3.2.5.11 Penjelasan Pencapaian IKU 14 : Indeks Kepuasan
Layanan Infrastruktur**



Gambar 3.15
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 :
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Kota Sukabumi Tahun 2025

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan, ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. IKLI diharapkan menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur sangat penting bagi Pemerintah Kota Sukabumi selaku penyedia layanan publik untuk mengetahui umpan balik berupa indeks kepuasan masyarakat atas penyediaan layanan infrastruktur. Indeks yang tinggi mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari penyediaan layanan infrastruktur, begitu sebaliknya. Selain mengukur kepuasan masyarakat, indeks kepuasan layanan infrastruktur juga menginventarisasi keinginan serta harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih baik. Kinerja saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan merupakan feedback yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian IKU 7 tentang IKLI ini adalah Kota Sukabumi telah mempersiapkan dokumen pendukung dalam Pembangunan IKLI. Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan) dan pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan. Untuk unsur kedua ini, Kota Sukabumi memiliki persepsi masyarakat yang baik tentang Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan. Unsur kepuasan pelanggan seharusnya menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah). Pemerintah Kota Sukabumi telah menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah dengan diraihnya opini “Kualitas Tinggi” pada pelayanan publik dari Ombudsman Tahun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

2025. Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, memberikan arah terjadinya perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma rule government bergeser menjadi paradigma good governance dengan menggunakan variable infrastruktur sebagai berikut :

No	Indikator	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
A	Infrastruktur Dasar				
I	Jalan dan Jembatan	3,53	88,32	A	Sangat Baik
1	Jalan Kota	3,53	88,36	A	Sangat Baik
2	Jembatan	3,53	88,28	B	Baik
II	Transportasi	3,54	88,54	A	Sangat Baik
1	Terminal	3,53	88,26	B	Baik
2	Stasiun	3,56	88,99	A	Sangat Baik
3	Angkutan Umum Dalam Kota	3,54	88,39	A	Sangat Baik
4	Angkutan Umum Antar Kota	3,53	88,28	B	Baik
5	Kereta Api	3,56	88,99	A	Sangat Baik
6	Transportasi Angkutan Paratransit	3,55	88,74	A	Sangat Baik
7	Perlengkapan Jalan (Rambu dll)	3,52	88,11	B	Baik
III	Persampahan	3,50	87,51	B	Baik
1	Sarana Persampahan (Tempat Sampah)	3,50	87,41	B	Baik
2	Sarana Pengangkutan Sampah	3,50	87,61	B	Baik
IV	Ruang Publik	3,53	88,16	B	Baik
1	Drainase	3,51	87,77	B	Baik
2	Trotoar	3,54	88,44	A	Sangat Baik
3	RTH/ Taman	3,52	88,01	B	Baik
4	Lapangan olahraga	3,54	88,41	A	Sangat Baik
V	Komunikasi dan Informasi	3,54	88,48	A	Sangat Baik
1	Jaringan internet	3,54	88,58	A	Sangat Baik
2	Pelayanan Publik Berbasis Sistem	3,54	88,38	A	Sangat Baik
VI	Energi	3,56	89,09	A	Sangat Baik
1	Listrik	3,57	89,24	A	Sangat Baik
2	Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)	3,56	88,94	A	Sangat Baik
VII	Irigasi dan Pengendali Banjir	3,47	86,80	B	Baik
1	Jaringan Irigasi	3,48	87,06	B	Baik
2	Bangunan Pengendali Banjir	3,46	86,54	B	Baik
VIII	Perumahan	3,52	88,10	B	Baik
1	Septictank	3,50	87,61	B	Baik
2	Sumber Air Bersih	3,54	88,49	A	Sangat Baik
3	PDAM	3,51	87,86	B	Baik
4	Jalan Lingkungan	3,54	88,43	A	Sangat Baik
B	Infrastruktur Sosial				
IX	Bangunan Kantor Pemerintahan	3,55	88,69	A	Sangat Baik
1	Bangunan Kantor Pemerintahan	3,55	88,69	A	Sangat Baik
X	Pendidikan	3,56	88,96	A	Sangat Baik
1	Pendidikan	3,56	88,96	A	Sangat Baik
XI	Kesehatan	3,56	88,91	A	Sangat Baik
1	Kesehatan	3,56	88,91	A	Sangat Baik
XII	Pasar	3,55	88,81	A	Sangat Baik
1	Pasar	3,55	88,81	A	Sangat Baik
XIII	Pariwisata	3,53	88,33	A	Sangat Baik
1	Fasilitas tempat wisata	3,53	88,33	A	Sangat Baik
XIV	Hotel/Penginapan	3,54	88,58	A	Sangat Baik
1	Penginapan/hotel	3,54	88,58	A	Sangat Baik
XV	Penjualan Oleh-Oleh	3,53	88,28	B	Baik
1	Sarana penjualan oleh-oleh / souvenir	3,53	88,28	B	Baik
INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR		3,53	88,37	A	Sangat Baik

Sumber : Hasil Analisis 2025

Sumber: BAPPEDA Kota Sukabumi, 2025

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur di Kota Sukabumi termasuk dalam kondisi yang Baik. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang ada di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada aspek energi yaitu kelistrikan dengan nilai 89,54. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan listrik di Kota Sukabumi sudah baik. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada aspek irigasi dan pengendali banjir dengan nilai sebesar 86,80 namun masih dalam koridor klasifikasi B dan menunjukkan kinerja yang baik.

Capaian 100% dengan nilai 88,37 menunjukkan bahwa pemerintah kota berhasil memenuhi janji layanan infrastrukturnya secara eksak. Angka di atas 80 umumnya menandakan bahwa infrastruktur dasar tidak hanya tersedia, tetapi juga berfungsi dengan kualitas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Sukabumi. Faktor Pendukung Ketercapaian target presisi ini didorong oleh strategi berikut:

1. Sinkronisasi Perencanaan

Adanya keselarasan antara program Bappeda Kota Sukabumi dengan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrenbang.

2. Program "Quick Response" Infrastruktur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sukabumi kemungkinan besar mengoptimalkan tim unit reaksi cepat untuk menangani kerusakan kecil sebelum menjadi keluhan besar di media sosial, sehingga menjaga persepsi publik tetap positif.

3. Penataan Kawasan Pedestrian (Pedestrianisasi)

Kelanjutan penataan trotoar di jalan-jalan protokol (seperti area Ahmad Yani atau Veteran) yang ramah

disabilitas dan estetis meningkatkan kepuasan visual dan fungsional masyarakat secara signifikan.

4. Transparansi dan Partisipasi Publik

Penggunaan aplikasi pengaduan (seperti SUPER) memudahkan warga melaporkan kerusakan infrastruktur. Kecepatan tindak lanjut pemerintah atas laporan tersebut berkontribusi langsung pada tingginya angka indeks kepuasan.

5. Sinkronisasi Pembangunan Kewilayahan

Program P2RW (Program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat) yang menyentuh level RT/RW memastikan infrastruktur skala kecil (gang, selokan lingkungan) juga tertangani, bukan hanya jalan besar saja.

Dalam mendukung ketercapaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang diampu oleh Dinas PUTR sebagai leading sector selain Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup, ketiga dinas tersebut telah melakukan beberapa program dan kegiatan, diantaranya yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur SDA, capaian indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Ruang Publik tahun 2025 sebesar 98,62%. Capaian ini didukung dengan adanya ketersediaan anggaran pengendali banjir seperti 35 unit rehabilitasi pintu air di sejumlah titik di kota sukabumi serta sepanjang 0,62 Km D.I jaringan irigasi yang di pelihara dan 5 bendung yang di pelihara serta adanya Kegiatan Strategis Pemerintah Kota Sukabumi Pembangunan Check Dam Cipelang Herang 1 Unit.



2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Terwujudnya Infrastruktur Sistem Air Minum yang Layak dan Aman bagi Masyarakat, capaian indikator Indeks kualitas Layanan Infrastruktur air Minum memperoleh capaian sebesar 98,61%. Capaian ini Adanya ketersediaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum melalui kegiatan Perluasan Jaringan SPAM Sebanyak 460 SR Terdiri dari:

- 1) Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum sebanyak 300 Sambungan Rumah (SR);
- 2) Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang sebanyak 100 Sambungan Rumah (SR); dan
- 3) Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh sebanyak 60 Sambungan Rumah (SR).

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Terwujudnya Infrastruktur Sistem Air Limbah yang Aman bagi Masyarakat, capaian indikator Indeks kualitas Layanan Infrastruktur air limbah memperoleh capaian sebesar 98,12%. Capaian ini Adanya ketersediaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi melalui kegiatan Pembangunan IPAL Komunal sebanyak 60 Sambungan Rumah (SR) dan 1 Unit Peningkatan / Rehabilitasi TPS3R di Kelurahan Karang Tengah

Kecamatan Gunungpuyuh. Serta di dukung juga oleh APBD kota Sukabumi melalui kegiatan Rehabilitasi MCK/SAB sebanyak 16 Unit dan Pembangunan IPAL Individu 42 Sambungan Rumah (SR).



4. Program Penyelenggaraan Jalan

Terwujudnya Jalan Kota yang Berkualitas, capaian indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan memperoleh capaian sebesar 97,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran ini sangat baik, ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur. Pencapaian pada tahun 2025 sebesar 104,454 Km dicapai melalui kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dengan keluaran (output) 117.796 Km tingkat kemantapan jalan di kota sukabumi 104,454 Km atau 88,67% pada tahun 2025.

5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Terwujudnya Bangunan Pemerintahan yang Berkualitas, capaian indikator Indeks kualitas Layanan Infrastruktur Bangunan Pemerintahan memperoleh capaian sebesar 0,00%. Hal ini dikarenakan adanya Perhitungan Indeks kualitas Layanan Infrastruktur Bangunan Pemerintahan pada tahun 2025 belum ada penilaian sehingga akan dihitung dalam tahun berjalan bulan April 2026 oleh

Bappeda Kota Sukabumi. Namun Ada beberapa kegiatan yang mendukung sasaran Terwujudnya Bangunan Pemerintahan yang Berkualitas diantaranya:

1. Pembangunan Gapura Tugu Batas Kota 1 Unit;
2. Pembangunan Gedung Dekranasda 1 Unit;
3. Pembangunan Tugu Cagar Budaya 3 Lokasi; dan
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung 15 Gedung.

PEMBANGUNAN GEDUNG DEKRANASDA



PEMBANGUNAN GAPURA TUGU BATAS KOTA



6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Salah satu program pendukung dari IKLI yaitu kontribusi dari program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Program ini mempunyai indikator Persentase ruas jalan kota yang memenuhi standar PJU dengan capaian di tahun 2025 yaitu 98,55 persen.

7. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Timbulan sampah di Kota Sukabumi merujuk pada jumlah atau volume sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia dan aktivitas di wilayah tersebut, yang mencakup berbagai jenis sampah seperti sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

industri, sampah fasilitas umum, dan sebagainya. Timbulan sampah di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 mencapai 69.469 ton.

	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan	
		Ton/tahun	Ton/tahun	Tahun 2025 – Tahun 2024	
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	67.895,42	69.469,13	1.573,71	2,32
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	127,75	0,00	-127,75	-100,00
	Persentase pengurangan sampah	0,19	0,00		
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	6.662,56	17.892,30	11.229,74	168,55
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	127,75	0,00	-127,75	-100,00
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	0,00	0,00	0,00	-
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	60.558,21	1.377,57	-59.180,64	-97,73
	Persentase penanganan sampah	89,19	1,98		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	12.220,40	1.377,57	-10.842,83	-88,73
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	12.220,40	1.377,57	-10.842,83	-88,73
	Jumlah sampah dimanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	0,00	0,00	-
g	Pemrosesan Akhir	48.337,82	48.125,00	-212,82	-0,44
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	48.337,82	48.125,00	-212,82	-0,44
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	60.685,96	1.377,57	-59.308,40	-97,73
	Persentase sampah terkelola	89,38	1,98		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I – IV)	7.209,46	68.091,56	60.882,11	844,48
	Persentase sampah tidak terkelola	10,62	98,02		

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Berdasarkan data perbandingan capaian pengelolaan sampah antar tahun 2024 dan 2025, jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 69.469,13 ton/tahun, meningkat 1.573,71 ton (2,32%) dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 67.895,42 ton/tahun. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada peningkatan volume sampah. Pada aspek pengurangan sampah, tahun 2025 tidak tercatat adanya pengurangan dalam sistem SIPSN, sehingga jumlah pengurangan sampah menjadi 0 ton atau mengalami penurunan 100% disbanding Tahun 2024 (127,75 ton). Kondisi ini terjadi karena pada Tahun 2025 input data pengurangan sampah di SIPSN masuk dalam kategori penanganan dan sampah yang ditangani, sehingga secara administrasi tidak tercatat sebagai pengurangan. Hal ini menyebabkan

persentase pengurangan sampah turun dari 0,19% menjadi 0,00%. Sementara itu, pada komponen penanganan sampah tercatat sebesar 1.377,57 ton/tahun atau 1,98%, turun signifikan dibanding Tahun 2024 yang mencapai 60.558,21 ton/tahun (89,19%). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh perubahan pola pencatatan pada SIPSN Tahun 2025. Selain itu, sampah yang ditangani pada Tahun 2025 sebagian besar tercatat masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping, sehingga secara sistem dikategorikan sebagai penanganan dan sampah terproses di TPA. Pada komponen pengolahan, terjadi penurunan dari 12.220,40 ton pada Tahun 2024 menjadi 1.377,57 ton pada Tahun 2025 (turun 88,73%). Sedangkan jumlah sampah yang diproses di TPA relatif stabil, yaitu 48.337,82 ton pada Tahun 2024 menjadi 48.125,00 ton pada Tahun 2025 (turun 0,44%). Akibat perubahan pencatatan tersebut, jumlah sampah terkelola (pengurangan + penanganan) pada Tahun 2025 tercatat hanya 1.377,57 ton (1,98%), turun drastis dibanding Tahun 2024 sebesar 60.685,96 ton (89,38%). Sebaliknya, sampah tidak terkelola meningkat signifikan menjadi 68.091,56 ton (98,02%), dibanding Tahun 2024 sebesar 7.209,46 ton (10,62%). Dengan demikian, secara substantif tidak seluruhnya mencerminkan penurunan kinerja pengelolaan sampah, melainkan lebih dipengaruhi oleh perubahan mekanisme input dan klasifikasi data pada SIPSN Tahun 2025, di mana pengurangan sampah tercatat sebagai penanganan dan sampah yang ditangani masuk ke TPA dengan sistem open dumping.

3.2.5.12 Penjelasan Pencapaian IKU 15 : Indeks Risiko Bencana



Gambar 3.16
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 15 :
Indeks Resiko Bencana Kota Sukabumi Tahun 2025**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Keberhasilan sasaran Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim dapat dilihat dari pencapaian indikatornya yaitu Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana (IRB) berfungsi untuk mengukur tingkat potensi dampak negatif (jiwa, fisik, ekonomi) akibat ancaman bencana di suatu wilayah. IRB digunakan pemerintah untuk memetakan bahaya, menilai kerentanan, dan mengevaluasi kapasitas guna merencanakan strategi mitigasi, pengurangan risiko, serta penanggulangan bencana yang tepat sasaran. IRB dihasilkan dari interaksi antara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

tingkat bahaya yang ada, kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta kapasitas ketangguhan suatu daerah.

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Bandung	0,69	112,32
Bandung Barat	0,51	124,45
Bekasi	0,67	105,45
Bogor	0,56	122,64
Ciamis	0,69	85,52
Cianjur	0,74	136,31
Cirebon	0,66	109,72
Garut	0,75	133,79
Indramayu	0,83	83,90
Karawang	0,55	147,42
Kota Bandung	0,63	76,47
Kota Banjar	0,58	100,80
Kota Bekasi	0,70	67,79
Kota Bogor	0,77	54,59
Kota Cimahi	0,78	57,61
Kota Cirebon	0,79	93,31
Kota Depok	0,56	59,97
Kota Sukabumi	0,60	61,11
Kota Tasikmalaya	0,62	90,78
Kuningan	0,67	93,66
Majalengka	0,64	100,63
Pangandaran	0,69	118,18
Purwakarta	0,61	102,68
Subang	0,55	165,51
Sukabumi	0,51	198,86
Sumedang	0,53	102,91
Tasikmalaya	0,64	156,20

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Pada tahun 2025, Indeks Resiko Bencana Kota Sukabumi mendapatkan hasil positif dengan meraih 61,11 poin dari target 75,66 poin atau dengan kata lain realiasinya mencapai 119,12 persen. Angka 61,11 lebih rendah dibandingkan target 75,66. Hal

ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Kota Sukabumi berhasil ditekan jauh melampaui ekspektasi awal. Dengan angka 61,11, Kota Sukabumi berada pada kategori Risiko Sedang (mendekati batas bawah risiko rendah), yang menunjukkan peningkatan ketangguhan wilayah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian realisasi sebesar 119,12% mencerminkan efektivitas program mitigasi. Karena target IRB bersifat "target penurunan" (menurunkan angka risiko), maka realisasi yang lebih rendah dari target dihitung sebagai pencapaian di atas 100%.

Keberhasilan di Sukabumi didorong oleh perbaikan pada beberapa indikator. Indikator Ketahanan Fisik dan Lingkungan, penguatan infrastruktur pengendali banjir (drainase) dan perkuatan lereng di area rawan longsor (seperti di wilayah Gunungpuyuh atau Citamiang). Indikator Kapasitas Kelembagaan, kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi dalam menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Indikator Ketahanan Sosial, tingkat partisipasi masyarakat dalam program mitigasi dan evakuasi mandiri. Kapasitas Pemulihan, kecepatan respon darurat dan ketersediaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan pasca-bencana.

Melampauinya target penurunan risiko ini dipicu oleh beberapa faktor strategis, diantaranya :

1. Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana)

Masifnya pembentukan Keltana di 33 kelurahan di Kota Sukabumi meningkatkan kapasitas mitigasi di level akar rumput. Warga kini lebih paham cara membaca tanda-tanda alam dan jalur evakuasi

2. Integrasi Sistem Peringatan Dini (EWS)

BPBD Kota Sukabumi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang berfokus pada penguatan

mitigasi bencana, termasuk potensi pemasangan/pemeliharaan alat-alat peringatan dini (PB)

3. Kolaborasi Lintas Sektor (Pentahelix)

Keberhasilan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk sinkronisasi program mitigasi antar dinas (seperti pembersihan saluran drainase oleh PUPR dan pemangkasan pohon oleh DLH). Selain itu sinergi antara BPBD, TNI/Polri, relawan (seperti PMI dan Tagana), serta dunia usaha dalam simulasi bencana secara rutin. Hal ini memperkuat aspek "Kapasitas" dalam rumus IRB.

Adapun 3 program yang menjadi pendukung pencapaian indeks risiko bencana yaitu:

1. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana memiliki indikator Persentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana merupakan ukuran tingkat pemenuhan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perhitungan indikator ini dilakukan dengan rumus:

“Jumlah penerima layanan sesuai standar dibagi jumlah sasaran wajib pelayanan dikalikan 100 persen”

Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan, capaian yang diperoleh juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Adapun rincian faktor ketercapaian angka 100% sebagai berikut:

Tabel 3.7

Capaian Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana

Indikator	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	100%	100%	100%
Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana x 100% Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana	100%	100%	100%
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah warga negara yang mendapatkan	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Korban Bencana	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana $\times 100\%$ Jumlah warga yang menjadi korban bencana			
-------------------	---	--	--	--

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

2. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Capaian indikator Kinerja Presentase Waktu Tanggap Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Strandar ≤ 15 Menit Pada Lokasi Kebakaran diseluruh Wilayah Kota

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Presentase Waktu Tanggap Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Strandar ≤ 15 Menit Pada Lokasi Kebakaran diseluruh Wilayah Kota	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	100%	96.27%	96.27%

Kejadian kebakaran pada tahun 2025 di kota sukabumi sebanyak 46 kejadian dengan total rata-rata waktu respon 15.56 Menit. Hal ini tentu merupakan capaian kinerja yang harus ditingkatkan karena waktu tiba di lokasi kejadian kebakaran tidak boleh melebihi dari 15 menit.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai bagian dari upaya

untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup selalu terjaga dan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengujian Air Sungai

Kegiatan pengujian kualitas air sungai di Kota Sukabumi tahun 2025 dilaksanakan pada 29 titik lokasi DAS, Sub DAS, dan sub-sub DAS yang terletak di daerah hulu, tengah dan hilir Kota Sukabumi.

b. Kegiatan Pengujian Air Limbah

Kegiatan/usaha yang diuji kualitasnya selama tahun 2025 terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu klinik & rumah sakit, hotel, Industri makanan & minuman, industri tahu, dan supermarket.

c. Kegiatan Proklamasi & Indeks Gas Rumah Kaca

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim. Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional, Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim.S

d. Kegiatan Uji Emisi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat akan pentingnya menciptakan udara bersih melalui kegiatan uji emisi kendaraan bermotor untuk memantau kualitas gas buang kendaraan bermotor

roda empat khususnya kendaraan pribadi dan kendaraan dinas, memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna/pemakai dalam bentuk informasi kualitas gas buang kendaraannya, memberikan rekomendasi tindak lanjut pemeliharaan kendaraan.

Hasil Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tahun 2025 di Kota Sukabumi

Jenis Bahan Bakar Keterangan	Tidak Melebihi Baku Mutu (Lulus)	Melebihi Baku Mutu (Tidak Lulus)	Jumlah Keseluruhan
Bahan Bakar Bensin	234	23	257
Bahan Bakar Solar	102	25	127
Jumlah Keseluruhan	336	48	384

e. Kegiatan Pengujian Udara Ambien

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Dalam keadaan normal, udara ambien ini akan terdiri dari Gas Nitrogen (78%), Oksigen (20%), Argon (0,93%) dan Gas Karbondioksida (0,03%).

Parameter	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Rerata SO ₂ dan NO ₂ di Kota Sukabumi (µg/m ³)	Referensi EU (µg/m ³)	Indeks	Rerata SO ₂ dan NO ₂ di Kota Sukabumi (µg/m ³)	Referensi EU (µg/m ³)	Indeks
NO ₂	8,96	20	0,448	8,84	50	0,1929
SO ₂	8,48	40	0,212	8,68	45	0,1768
	Index Annual Mode EU (Ieu)		0,330	Index Annual Mode EU (Ieu)		0,5563
	Indeks Kualitas Udara (IKU)		87,22	Indeks Kualitas Udara (IKU)		72,98

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Sukabumi adalah 72,98 masuk dalam kategori **Baik**.

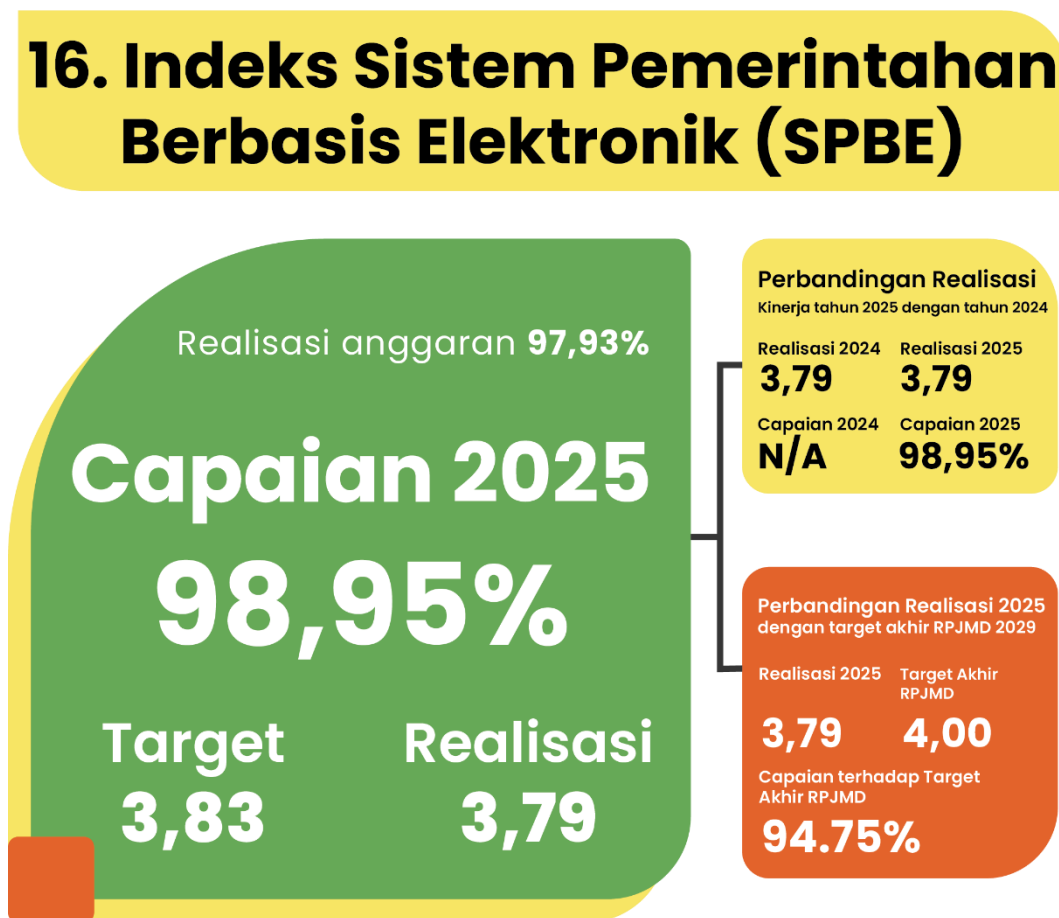
f. Kegiatan Prokasih

Kegiatan ini bertujuan untuk a. Tercapainya kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang

berkelanjutan; b. Terciptanya system kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien; dan c. Terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalaian pencemaran air. Lokasi kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) 2025 dilaksanakan di belakang Pemandian Air Panas Cikundul, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.



3.2.5.13 Penjelasan Pencapaian IKU 16 : Indeks SPBE



Gambar 3.17
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 16 :
Indeks SPBE Kota Sukabumi Tahun 2025**

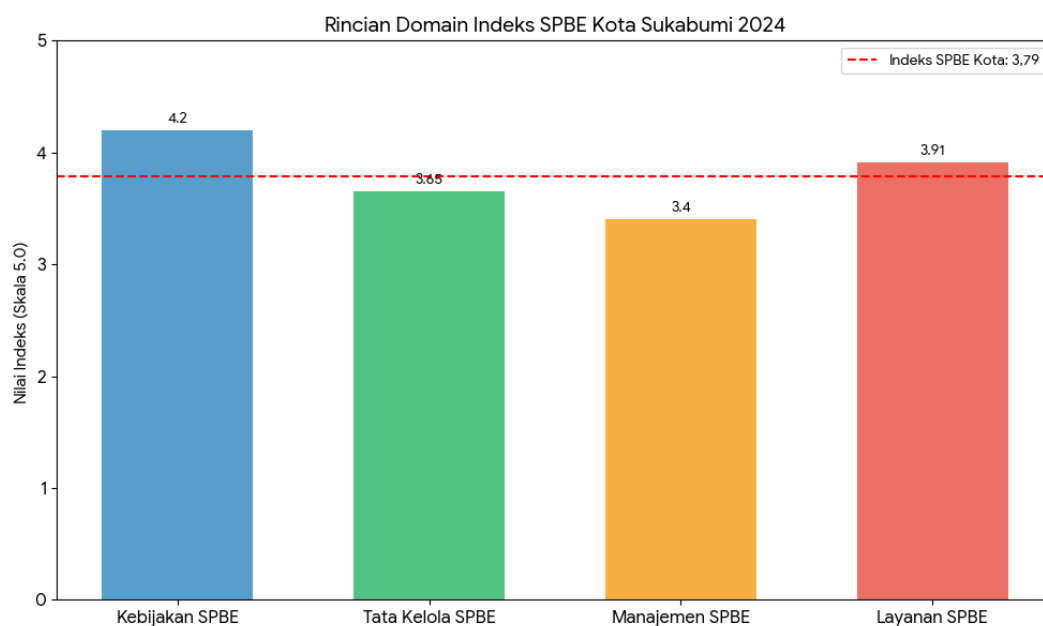
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi sebagai pengampu utama (leading sector). Keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital dilihat dari pencapaian indikatornya yaitu Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses

dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Indeks SPBE berfungsi sebagai alat ukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan pemerintahan digital, mengevaluasi kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis TIK di instansi pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, integrasi layanan, dan kualitas pelayanan publik. Evaluasi indeks SPBE dilakukan melalui empat domain utama, yaitu kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE, yang mencakup delapan aspek penilaian.



Gambar 3.18

**Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Sukabumi yang Dirinci
Berdasarkan Domain dan Aspek Penilaian Indeks SPBE**

(Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024)

Pada tahun 2025 Kota Sukabumi tidak menjadi lokus untuk evaluasi indeks SPBE. Hal ini dikarenakan Kota Sukabumi mengacu kepada hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2024 sudah masuk pada kategori **Sangat Baik** dengan nilai 3,79. Evaluasi KemenPAN-RB ditekankan bukan untuk pemeringkatan, melainkan untuk perbaikan, sehingga lokus bisa bervariasi setiap tahun. Daerah yang sudah mencapai nilai tinggi mungkin difokuskan pada pemantauan keberlanjutan. Selain itu tahun 2025 merupakan periode transisi kebijakan dari SPBE menuju Pemerintahan Digital (PEMDI) berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2025. Fokus evaluasi mungkin bergeser pada integrasi layanan, bukan sekadar pemenuhan dokumen.

Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Sukabumi pada tahun 2025 (berdasarkan evaluasi tahun 2024) sebesar 3,79 merupakan prestasi yang sangat signifikan. Skor ini menempatkan Kota Sukabumi pada kategori "**Sangat Baik**", melonjak drastis dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,98 (Kategori Baik). Skor 3,79 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah berhasil melewati fase "Inisiasi" dan "Terkelola" menuju fase "Terukur" dan "Teroptimasi" dalam transformasi digitalnya. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar layanan publik di Sukabumi sudah terintegrasi, mudah diakses, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Keberhasilan mencapai angka 3,79 didorong oleh beberapa faktor kunci yang saling berinteraksi:

1. Komitmen Kepemimpinan

Keterlibatan aktif Wali Kota dan jajaran pimpinan tinggi dalam mengawal evaluasi SPBE memastikan bahwa digitalisasi menjadi prioritas di seluruh SKPD, bukan hanya tugas Dinas Kominfo

2. Kolaborasi Lintas Sektor & Integrasi Sistem

Pemerintah Kota Sukabumi menerapkan sistem SIMPONI (Sistem Informasi Pemerintahan Online) sebagai wadah integrasi berbagai aplikasi layanan. Hal ini mengurangi ego sektoral antar perangkat daerah.

3. Penguatan Dasar Hukum dan Arsitektur

Penyusunan dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang selaras dengan standar nasional memberikan arah yang jelas dalam pembangunan infrastruktur digital sehingga tidak terjadi tumpang tindih aplikasi.

4. Manajemen Data dan Keamanan

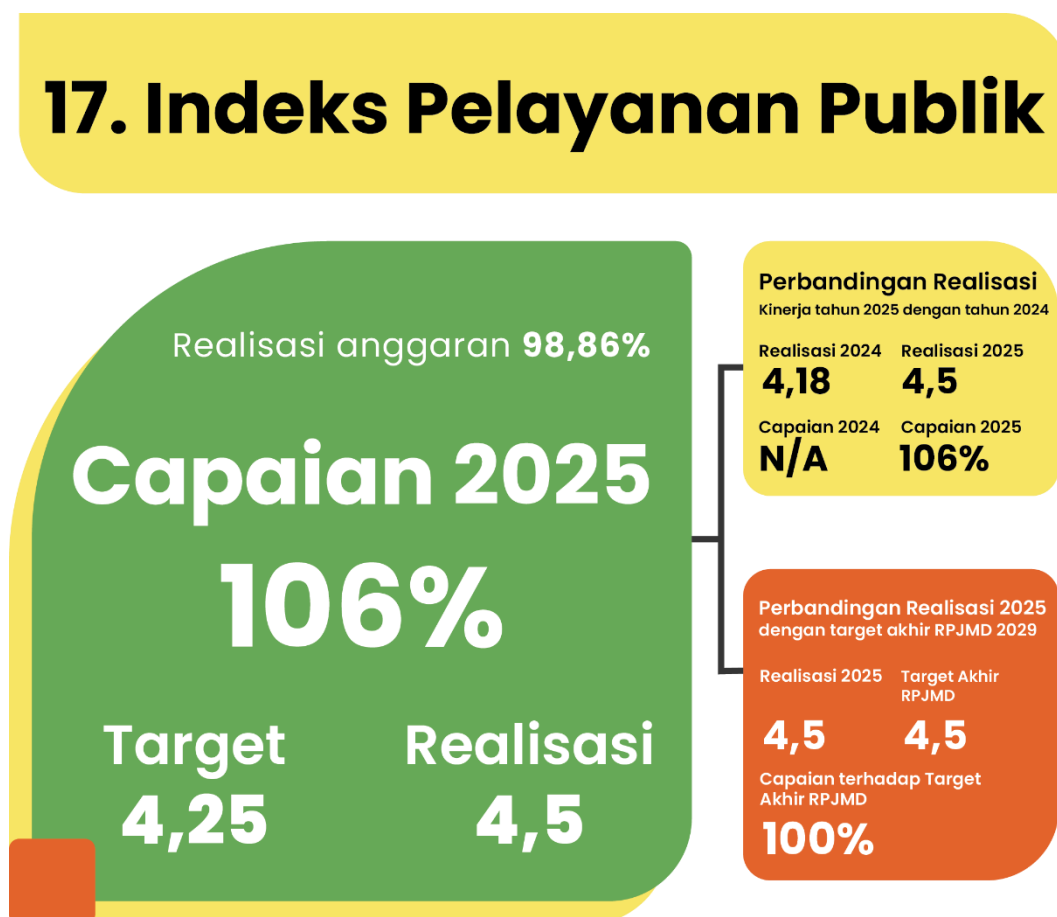
Optimalisasi fungsi Forum Satu Data dan penguatan aspek keamanan informasi (Cyber Security) melalui kolaborasi dengan BSSN untuk memastikan data masyarakat terlindungi.

Berdasarkan *logical framework* terkait capaian indeks SPBE ditunjang oleh dua program yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator persentase aplikasi pemerintah yang online dan terintegrasi yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dan terintegrasi dan Program Pengelolaan Arsip dengan indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat yang sah dan pertanggungjawaban nasional yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi.

Program pengelolaan aplikasi informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi untuk mencapai indikator persentase aplikasi pemerintah yang online dan terintegrasi ditunjang oleh Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana capaian indikator tersebut sebesar 61,33 dari target 24,4 atau dengan kata lain realisasinya sebesar 286,6 persen, Hal ini

mencerminkan akselerasi integrasi layanan digital dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Sementara itu program pengelolaan arsip yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi untuk mencapai indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat yang sah dan pertanggungjawaban nasional memiliki capaian 64,92.

3.2.5.14 Penjelasan Pencapaian IKU 17 & 18 : Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar 3.19
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 :
Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi Tahun 2025**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah merupakan perwujudan fungsi aparatur pemerintah kepada masyarakat. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan publik untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai keperluan dan kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan urusan birokrasi harus dipenuhi dengan baik sehingga pelayanan prima menjadi hal yang harus dikedepankan dalam melayani masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dilihat dari pencapaian indikatornya yaitu Indeks Pelayanan Publik.

Kualitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari nilai Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 BAB III Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Pengukuran Indeks Pelayanan Publik dilakukan guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Setelah diperoleh nilai indeks, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data. Penyimpulan data

dilakukan untuk mengetahui kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai indeks yang diperoleh dari hasil penyimpulan data diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori sebagaimana Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8

Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Sukabumi, diperoleh Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi Tahun 2025 sebesar 4,5 poin melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 4,25 poin atau dengan kata lain capaian indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 adalah 106 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi tidak hanya memenuhi standar, tetapi sudah berada pada level "**Sangat Baik**". Keberhasilan mencapai angka 4,5 didorong oleh penguatan pada enam aspek utama, yakni :

1. Kebijakan Pelayanan

Adanya standar pelayanan (SP) yang jelas dan maklumat pelayanan yang dipublikasikan secara terbuka

2. Profesionalisme SDM

Petugas memiliki kompetensi yang mumpuni, responsive dan menerapkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)

3. Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas ruang tunggu nyaman, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (jalur pemandu, toilet khusus), dan ruang laktasi

4. Sistem Informasi

Integrasi layanan melalui portal digital yang memudahkan warga mengakses informasi tanpa harus datang fisik

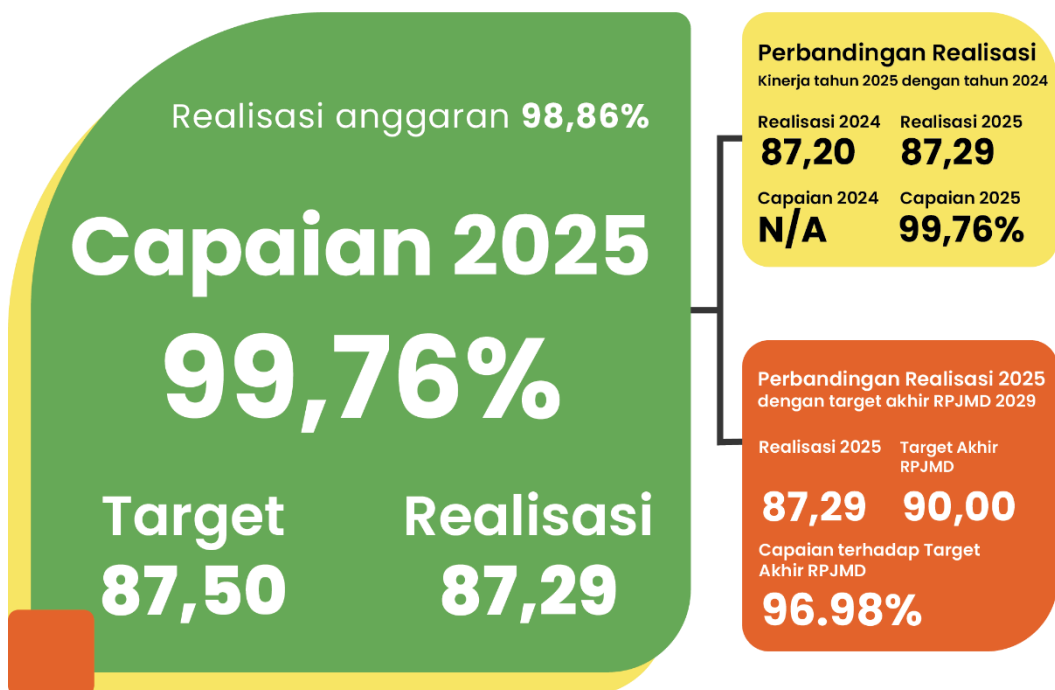
5. Konsultasi dan Pengaduan

Efektivitas pengelolaan pengaduan (SP4N-LAPOR) yang direspon dengan cept dan solutif

6. Inovasi

Tersedianya aplikasi atau metode baru yang memangkas waktu dan biaya birokrasi.

18. Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar 3.20
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 18 :
Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2025

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota untuk mengukur ketercapaiannya memiliki dua indikator, yaitu Indeks Pelayanan Publik (telah dijelaskan pada capaian IKU 17) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja dan kualitas pelayanan publik secara berkala, membandingkan harapan masyarakat dengan layanan riil, serta mengidentifikasi kelemahan unit layanan. Hasilnya menjadi bahan perbaikan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pelayanan yang lebih baik. IKM juga berfungsi sebagai alat ukur objektif dan berkala untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik, mengevaluasi kinerja

aparatur, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan. IKM membantu mengidentifikasi kelemahan, memacu persaingan positif antarunit, dan menjamin transparansi.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menilai pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan 9 unsur (persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, perilaku, sarana, dan pengaduan). Metode ini menggunakan skala Likert (skor 1-4) dan data kualitatif/kuantitatif untuk membandingkan harapan dengan kinerja nyata pelayanan. Pada tahun 2025 IKM Kota Sukabumi yaitu 87,29 dari target 87,50 atau dengan kata lain realisasinya mencapai 99,76 persen. Berdasarkan data tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Sukabumi tahun 2025 berada pada level yang sangat tinggi, meskipun secara administratif belum menyentuh target 100%. Meskipun secara angka statistik ini adalah pencapaian yang sangat tinggi, selisih 0,21 poin ini memberikan ruang evaluasi yang penting.

Realisasi sebesar 99,76% menunjukkan bahwa secara operasional, pelayanan sudah berjalan hampir sempurna sesuai rencana, namun ada ekspektasi masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi secara presisi. Secara teknis (IPP), sistem mungkin sudah sangat baik (skor 4,5), namun IKM mengukur persepsi. Selisih 0,24% ini menandakan adanya "celah persepsi" antara kualitas layanan yang diberikan pemerintah dengan apa yang dirasakan langsung oleh warga. Angka 87,29 masih menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang solid. Masyarakat Sukabumi mayoritas merasa puas, namun ada titik-titik jenuh atau keluhan spesifik yang menahan angka tersebut mencapai target 87,50.

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kota diukur oleh dua indikator seperti yang telah dijelaskan diatas. Dua indikator tersebut ditunjang oleh 5 (lima) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Capaian indikator kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu sebesar 99,69, angka tersebut menggunakan capaian tahun sebelumnya dikarenakan untuk nilai tahun 2025 capaiannya belum diketahui.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Persentase Prolegda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Indikator Persentase Prolegda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja berada pada angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Raperda yang masuk dalam target Prolegda dapat diselesaikan dan ditetapkan sesuai dengan rencana. Keberhasilan ini juga menunjukkan sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah. Program ini dicapai dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 - b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
 - c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;

- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
 - f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
 - g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Indeks tata kelola pengadaan. Capaian indeks tata kelola pengadaan 66,49 (94,99 persen), Upaya yang akan dilakukan kedepan dalam rangka pencapaian indikator ini adalah menyusun strategi untuk peningkatan nilai ITKP dimaksud, antara lain:
- a. mendorong Perangkat Daerah untuk taat melaksanakan pengadaan secara elektronik;
 - b. memastikan semua PD mengumunkan RUP di Sirup LKPP tepat waktu;
 - c. menyelesaikan paket pada SPSE dan katalog elektronik sampai dengan tuntas;
 - d. bimtek/rodshow/pendampingan penyelesaian paket, input Sirup, dan pencatatan di LPSE;
 - e. memaksimalkan pengadaan melalui toko daring.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan. Capaian indikator persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebesar 159,99, adapun kegiatan yang menunjang indikator tersebut yaitu:
- a. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (AGREGAT);



- b. Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (PEMANFAATAN DATA);
- c. Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SOSIALISASI);



- d. Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (PROFIL)
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan bekerja sama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. Pengukuran kepuasan masyarakat ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang diterima. Survey ini dilaksanakan untuk mengukur secara komprehensif untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Capaian kepuasan masyarakat di kecamatan dari tujuh kecamatan di kota Sukabumi didapat sebesar 94,67.

3.2.5.15 Penjelasan Pencapaian IKU 19 : Indeks Inovasi Daerah



Gambar 3.21
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 19 :
Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Indeks Inovasi Daerah yang merupakan Indikator Kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Sukabumi 2025-2029 yang dipenuhi melalui pelaporan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025. Merujuk pada surat Perintah Tugas Wali Kota Sukabumi tentang Pelaporan Inovasi dengan melakukan pengisian/input data indikator Indeks Inovasi Daerah ke dalam sistem Kemendagri <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id>.

Diketahui pada Tahun 2025, skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Sukabumi adalah 76,85, skor ini merupakan skor tertinggi capaian indeks inovasi daerah yang didapat dibandingkan tahun 2021-2023, hal ini menandakan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas inovasi yang telah dilaporkan. Berdasarkan capaian IID tersebut di tahun 2025 ini Kota Sukabumi kembali mendapat Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan Predikat “Kota Sangat Inovatif”, sehingga target capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen RPJMD telah terpenuhi.



Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Sukabumi telah menyampaikan

laporan inovasi daerah tahun 2025 kepada Kementerian Dalam Negeri melalui pengisian data indeks inovasi pada aplikasi <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id> untuk dilakukan penilaian, dengan jumlah inovasi daerah yang dilaporkan sebanyak 305 inovasi. Inovasi tersebut berasal dari Perangkat Daerah 35 inovasi, RSUD 28 inovasi, UPTD Labkesda dan Puskesmas 149 inovasi, Kecamatan 20 inovasi, Kelurahan 63 inovasi, Sekolah 8 inovasi dan BUMD 2 inovasi. Sedangkan inovasi yang melalui proses kirim ke Kemendagri sebanyak 238 inovasi (inovasi yang memiliki nilai kematangan minimal 70), dimana Inovasi daerah yang dilaporkan tersebut merupakan inovasi yang diterapkan minimal 1 tahun yaitu di tahun 2022 dan 2023.

Bidang Litbang Bappeda Kota Sukabumi sebagai fasilitator dan admin inovasi dalam pelaporan inovasi Kota Sukabumi Ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan optimalisasi pelaporan inovasi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan

Melakukan Pendataan Inovasi lingkup Perangkat Daerah, Instansi, BUMD dan Sekolah di lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi, dengan dasar surat Nomor : PP.03/454/IV/1/Bappeda/Litbang/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Permohonan Data Inovasi, penyampaian data inovasi melalui <https://bit.ly/pendataaninovasikotsi>, sebagai langkah awal pengajuan Surat Keputusan Walikota tentang Daftar Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

2. Roadshow

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Sukabumi melakukan kegiatan Roadshow persiapan pelaporan inovasi daerah Kota Sukabumi Tahun 2025, dengan dasar surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi,

nomor : PP.03/1365/IV/1/Bappeda/Litbang/2025 pada tanggal 21 April 2025 perihal Roadshow Persiapan Pelaporan Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 lingkup Kecamatan dan Kelurahan, dimana kegiatan dilakukan ke setiap Kecamatan dengan melibatkan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mensosialisasikan regulasi pelaporan inovasi daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan membahas 20 indikator data dukung inovasi serta memberikan informasi terkait capaian hasil pelaporan inovasi tahun sebelumnya. Kegiatan roadshow pada lingkup Kecamatan, meliputi:

- 1) Kecamatan Baros beserta Kelurahan Sudajaya Hilir, Kelurahan Baros, Kelurahan Jaya Mekar, Kelurahan Jaya Raksa
- 2) Kecamatan Citamiang beserta Kelurahan Cikondang, Kelurahan Gedongpanjang, Kelurahan Kelurahan Tipar, Kelurahan Nanggaleng
- 3) Kecamatan Lembursitu beserta Kelurahan Situmekar, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Sindangsari, Kelurahan Lembursitu, Kelurahan Cikundul;
- 4) Kecamatan Gunung Puyuh beserta Kelurahan Sriwidari, Kelurahan Karamat, Kelurahan Gunung Puyuh, Kelurahan Karang Tengah;
- 5) Kecamatan Cikole beserta Kelurahan Kebonjati, Kelurahan Subangjaya, Kelurahan Cikole, Kelurahan Selabatu, Kelurahan Cisarua, Kelurahan Gunung Parang;
- 6) Kecamatan Warudoyong beserta Kelurahan Dayeuh Luhur, Kelurahan Nyomplong, Kelurahan Warudoyong, Kelurahan Sukakarya, Kelurahan Benteng;
- 7) Kecamatan Cibeureum beserta Kelurahan Sindang Palay, Kelurahan Limusnunggal, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kelurahan Babakan.

3. Penginputan

Pada tanggal 26 Juni 2025 Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Sukabumi menyusun Surat Perintah Tugas Wali Kota Sukabumi, Nomor : KP.06.01/1159/IV/I/BAPPEDA/LITBANG/2025 ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, untuk Melaksanakan Pelaporan Inovasi dengan melakukan pengisian/input data indikator Indeks Inovasi Daerah ke dalam sistem Kementerian Dalam Negeri <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id> ditandatangani Wali Kota Sukabumi pada tanggal 30 Juni 2025. Bidang Litbang Bappeda juga melaksanakan Bimbingan Teknis Penginputan Inovasi Daerah Pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 sesi pertama berdasarkan pada surat Kepala Bappeda Kota Sukabumi nomor : PP.03/2219/IV/1/BAPPEDA/Litbang/2025 pada tanggal 26 Juni 2025 perihal Bimbingan Teknis Penginputan Inovasi Daerah Pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 lingkup Perangkat Daerah dan Puskesmas. Bimbingan Teknis ini merupakan strategi Bidang Litbang Bappeda dalam rangka memberikan pemahaman teknis terkait tata cara pengisian indikator data dukung inovasi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025. Serta dilakukan pendampingan penginputan data inovasi oleh Tim Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Sukabumi terhadap PIC inovasi pada aplikasi <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id>.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Sukabumi tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat solid. Keberhasilan mencapai realisasi 100% dengan predikat "Sangat Inovatif" menandakan bahwa ekosistem kreativitas di birokrasi Kota Sukabumi telah

berjalan secara sistematis, bukan sekadar insidental. Kota Sukabumi telah berhasil membangun pondasi Kota Inovatif. Untuk mempertahankan predikat ini di tahun 2026, fokus harus bergeser dari sekadar jumlah inovasi menjadi kualitas dampak dan keberlanjutan jangka panjang.

Adapun program yang mendukung ketercapaian indeks inovasi daerah yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang diampu oleh BAPPEDA Kota Sukabumi yang memiliki capaian sebesar 100 persen. Capaian 100% menunjukkan seluruh perangkat daerah telah mengimplementasikan inovasi.

3.2.5.16 Penjelasan Pencapaian IKU 20 : Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)



Gambar 3.22
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 20 :
Indeks Reformasi Birokrasi General**
Kota Sukabumi Tahun 2025

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2025

Reformasi birokrasi adalah upaya terencana, sistematis, dan komprehensif untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, melayani, bersih dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberhasilan Reformasi birokrasi diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), yaitu indikator kuantitatif yang menilai tingkat kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan di instansi pusat maupun daerah. IRB mengevaluasi efektivitas, efisiensi, kebersihan dari KKN, serta kualitas pelayanan publik. Nilai IRB yang tinggi menunjukkan birokrasi yang semakin lincah, profesional, dan akuntabel. Nilai IRB terdiri dari dua komponen yaitu IRB General (fokus penyelesaian isu hulu) dan IRB Tematik (fokus penyelesaian isu hilir).

Pencapaian sasaran Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel dapat dilihat dari indikatornya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General). IRB General adalah instrumen pengukuran yang berfokus pada perbaikan tata kelola internal di seluruh instansi pemerintah. Indeks ini menjadi tolok ukur utama bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi mendukung pembangunan nasional.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Indikator Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai Minimal Baik	Capaian 2023	Bobot	Nilai IRB 2023	Capaian 2024	Bobot	Nilai IRB 2024	Capaian 2025	Bobot	Nilai IRB 2025	% Capaian Minimal Baik	Progres Capaian	Progres Capaian Indeks
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,40	1,83	3	1,83	2,67	3	2,67	2,63	3	2,63	109,58	-0,04	-0,04
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	100	80,00	0,39	7	0,03	99,00	7	6,37	100,00	7	8,14	125,00	1,00	-0,03
Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	80,00	98,12	2	1,96									
Tingkat Implementasi Sistem Kerja dengan Model Fleksibel Pegawai ASN	5	4,00	4	2	1,6	5,00	3	3,00	5,00	3	3,00	125,00	0,00	0,00
Tingkat Maturitas SPII	5	3,00	3,344	4	2,68	3,01	4	2,41	3,02	4	2,42	100,67	0,01	0,01
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3,5	2,50	0,75	3,5	0,75	0,75	3,5	0,75	0,75	3,5	0,75	30,00	0,00	0,00
Nilai SAKIP	100	60,01	77,73	4	3,11	76,36	4	3,05	76,62	4	3,06	127,35	0,06	0,00
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	5	3,00	0	2,5	0	0,00	2,5	0,00	3	2,5	1,50	100,00	3,00	1,50
Tingkat Digitalisasi Arsip	100	60,01	89,59	2,5	2,24	96,66	2,5	2,37	86,82	2,5	2,17	146,68	-7,84	-0,20
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	5	4,00	4	2,5	2	4,00	2,5	2,00	5	2,5	2,50	125,00	1,00	0,50
Indeks Kualitas Kebijakan	100	65,00	65	2,5	1,62	85,00	2,5	1,63	76,10	2,5	1,90	117,08	11,10	0,28
Indeks Reformasi Hukum	100	70,01	86,11	2,5	2,15	87,72	2,5	2,19	86,66	2,5	2,17	123,75	-1,08	-0,03
Indeks Pembangunan Statistik	5	2,60	2,76	2,5	1,38	2,85	2,5	1,43	2,85	2,5	1,43	109,62	0,00	0,00
Indeks Tata Kelola Pengadaan	100	70,01	68,75	2,5	1,72	66,69	2,5	1,66	73,29	2,5	1,83	106,69	6,80	0,77
Indeks Sistem Merit	410	250,00	291	4	2,84	310,50	4	3,03	310,50	4	3,03	124,20	0,00	0,00
Indeks Pelayanan Publik	5	3,51	4,28	1,5	1,28	4,62	2	1,85	4,50	2	1,80	128,21	-0,12	-0,05
Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Publik	100	78,00	93,35	1,5	1,4	93,54	2	1,87	93,54	2	1,87	119,92	0,00	0,00
Indeks SPBE	5	2,60	2,98	9	5,36	3,79	9	3,79	3,79	9	6,82	145,77	0,00	3,03
Capaian IKU Makro	100	90,00	83	2	1,66	87,97	4	3,52	91,60	4	3,66	101,78	3,63	0,15
Capaian IKU Non Makro (IKU Kepala Daerah)	100	90,00	94,73	8	5,89	100,00	6	4,58	100,00	6	4,59	111,11	0,00	0,00
Opini BPK	3	3,00	5	5	5	3,00	5	5,00	3,00	5	5,00	100,00	0,00	0,00
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	100	75,00	75,7	4	3,03	73,94	4	2,96	78,63	4	3,14	104,97	4,49	0,18
Indeks Berakhlak	100	50,00	61,7	4	2,47	67,75	4	2,71	67,75	4	2,71	135,50	0,00	0,00
Survei Penilaian Integritas	100	78,00	72,6	10	7,26	72,47	10	7,25	72,05	10	7,21	92,37	-0,42	-0,04
Survei Kepuasan Masyarakat	100	76,61	85,75	8	6,86	85,81	8	6,86	87,52	8	7,00	114,24	1,71	0,14
Nilai RB General	100			100	63,28		100	72,74		100	78,31	113,34		5,57

Gambar 3.23
Nilai Sementara Indeks RB General
Kota Sukabumi Tahun 2025

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa barat, 2026

Nilai IRB General kota Sukabumi pada tahun 2025 sebesar 78,31 (nilai sementara). Nilai tersebut secara realisasi sudah melebihi target yang telah diteapkan yaitu 78 atau dengan kata lain persentase capaiannya sebesar 100,4 persen. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) General Kota Sukabumi tahun 2025 sebesar 78,31 dari target 78 (Realisasi 100,4%) menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan di Sukabumi sudah berada pada jalur yang benar.

Secara substansial, melampaui target (100,4%) dalam Indeks RB adalah tantangan berat karena indikator ini melibatkan perubahan "budaya kerja" dan "struktur organisasi" secara masif. Angka 78,31 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi berhasil menyelaraskan antara perencanaan anggaran dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Dalam pencapaian indeks reformasi birokrasi ditunjang oleh 4 (lima) program yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator nilai saki komponen perencanaan. Untuk nilai capaian komponen pengukuran sebesar 96,37 yang menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang penguatan pada aspek kualitas substansi, khususnya dalam pendalaman indikator berbasis outcome dan konsistensi cascading kinerja.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai rata-rata IRB Perangkat Daerah. Nilai rata-rata IRB Perangkat Daerah di lingkungan kota Sukabumi pada tahun 2025 mencapai 73,21 atau realisasinya 107,66. Pengukuran IRB Perangkat Daerah dilakukan melalui aplikasi SURABI 3.0 yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat.



3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang memperoleh realisasi sebesar 101,1 persen. Capaian tersebut didukung oleh kegiatan :
 - a. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;
 - b. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memperoleh realisasi 100 persen. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Sukabumi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Tangga; 30 Desember 2025 menyimpulkan bahwa penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada tingkat Kota Sukabumi Tahun 2025 tingkat maturitas berada pada level “terdefinisi” atau menunjukan nilai penurunan pada Skor 3,025. Pengukuran terhadap 25 fokus. penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP dengan nilai unsur sebagai table berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Kategori, Uraian, dan Suburaian	Bobot	Skor	Skor
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot	Skor	Skor
Penetapan Tujuan			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3	1,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3	1,500
Sub Jumlah Penetapan Tujuan	100.00%		3,000
Bobot Penetapan Tujuan	40.00%		1,200
Struktur dan Proses			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,839	0,852
Penilaian Risiko	20.00%	2,950	0,590
Kegiatan Pengendalian	25.00%	2,818	0,705
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,000	0,300
Pemantauan	15.00%	2,917	0,438
Sub Jumlah Struktur dan Proses	100.00%		2,884
Bobot Struktur dan Proses	30.00%		0,865
Pencapaian Tujuan			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan			
Organisasi			
Capaian Outcome	20.00%	3	0,600
Capaian Output	10.00%	3	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25.00%	3	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	3	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	4	0,600
Sub Jumlah Pencapaian Tujuan	100.00%		3,200
Bobot Pencapaian Tujuan	30.00%		0,960
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			3,025

3.2.5.17 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 serta Solusi yang Telah dilakukan

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis dan mengevaluasi keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta menghasilkan solusi yang telah dilakukan yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Daerah. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Dengan demikian Daerah harus bisa memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan visi dan misi perusahaan serta tujuan organisasi. Sehingga analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi organisasi, sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha- usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang- peluang serta mengatasi ancaman. Sehingga dari matriks SWOT tersebut akan memperoleh empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Berikut ini

kami sajikan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang
dipilih :

Tabel 3.9
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 serta Solusi yang Telah dilakukan

INTERNAL	
STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
1. Komitmen Kepala Daerah bersama kepala perangkat daerah yang tinggi dibuktikan dengan adanya dukungan kebijakan dan administrasi publik yang baik; 2. Terbangunnya komunikasi yang efektif sehingga memudahkan proses kolaborasi & koordinasi; 3. Terdapatnya sistem teknologi informasi yang mendukung pencapaian kinerja yang mempermudah proses pengendalian dan monev kinerja;	1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM (terutama JF teknis) dalam menjalankan tugas & fungsi; 2. Kota Sukabumi termasuk kedalam kota dengan kategori fiskal yang lemah, sehingga pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan belum optimal; 3. Belum meratanya pemahaman budaya kerja yang baik di aparaturnya pemerintahan;
EKSTERNAL	
OPPORTUNITIES (PELUANG)	TREATH (TANTANGAN)
1. Adanya pola kemitraan <i>Pentahelix</i> yang tinggi dalam proses Pembangunan di Kota Sukabumi; 2. Kota Sukabumi yang strategis sebagai <i>Hub</i> & menjadi kota jasa sektor Pendidikan, Kesehatan dan perdagangan bagi daerah sekitar; 3. Persepsi publik yang baik terhadap pemerintahan;	1. Adanya kebijakan yang berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah; 2. Adanya tuntutan dari Masyarakat terhadap pelayanan publik dan kinerja pemerintahan yang lebih baik; 3. Dinamisasi ekologi administrasi yang tinggi sehingga berdampak terhadap kualitas kegiatan yang diberikan;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

DSA	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	<u>SO : Use/Build S to take Advantege O</u> 1. Mengoptimalkan kebijakan kepala daerah dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan unsur <i>pentahelix</i>; 2. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam mempromosikan Kota Sukabumi sebagai pusat jasa untuk meningkatkan persepsi publik terhadap pemerintahan;	<u>WO : Take Advantege of O by Overcoming W</u> 1. Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM; 2. Meningkatkan PADS Kota Sukabumi melalui optimalisasi sektor jasa; 3. Mensosialisasikan Budaya Kerja BerAKHLAK kepada seluruh aparat & Masyarakat;
TREATH (TANTANGAN)	<u>ST : Use S to take Avoid/Block T</u> 1. Mengajukan usulan CASN berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan kelembagaan; 2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan, penganggaran dan pengendalian;	<u>WT : Minimize W to Avoid/Block T</u> 1. Meningkatkan fungsi kolaboratif dengan pemerintah provinsi dan pusat; 2. Mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam perbaikan pelayanan publik;
STRATEGIC ACTION /POLICY	1. Meningkatkan tata Kelola reformasi birokrasi yang berdampak di setiap sektor pemerintahan; 2. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam perbaikan perencanaan, penganggaran, pengendalian pada setiap sektor pemerintahan;	1. Mengoptimalkan adaptabilitas pemerintah daerah terhadap peluang Kerjasama dan kemitraan dengan sektor <i>pentahelix</i>; 2. Meningkatkan PADS Kota Sukabumi melalui optimalisasi sektor jasa dengan mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam perbaikan pelayanan publik;

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2025

Tabel 3.10
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2025 (%)	Program/Kegiatan - Pengampu	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Menunjang/ Tidak
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1.	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Indeks Pendidikan	98,45	Program Pengelolaan Pendidikan – Disdik	Indeks Pencapaian Spm Pendidikan	85,20	Menunjang
				Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	87,55	Menunjang
2.	Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup	100,19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat - Dinkes	Angka Kematian Ibu & Angka Kematian Anak	727,92 130,51	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Dinkes	Angka Kematian Ibu & Angka Kematian Anak	727,92 130,51	Menunjang
3.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Tingkat Kemiskinan	101,15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Dinsos	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial bermutu	96,58	Menunjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	106,06	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Disnaker	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Belum dapat dihitung	Menunjang
				Program Penempatan Tenaga Kerja - Disnaker	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	46,05	Menunjang
5.	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat – Setda	Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi	100	Menunjang
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial - Bakesbangpol	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama yang diantisipasi	100	Menunjang
6.	Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	90,17	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum – Satpol PP & Damkar	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	Menunjang
7.	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya	84	Program Pengembangan Kebudayaan - Disdik	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	92,97	Menunjang
8.	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	92,34	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera – DP2KBP3A	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	N/A	Menunjang
				Program Pengarusutamaan	Indeks Pembangunan	105	Menunjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

				Gender dan Pemberdayaan Perempuan - DP2KBP3A	Gender (IPG)		
				Program Pemenuhan Hak Anak - DP2KBP3A	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	N/A	Menunjang
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Disporapar	Angka Partisipasi dan Kepimpinan Pemuda	100	Menunjang
9.	Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Indeks Kota Kreatif	100,15	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - Disporapar	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	100	Menunjang
				Program Pengembangan UMKM - Diskumindag	Persentase UMKM Naik Kelas	74	Menunjang
10	Berkembangnya industri pariwisata MICE	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Disporapar	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	100	Menunjang
11	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan	97,41	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat – DKP3	Skor Pola Pangan Harapan	102,6	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan – DKP3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (post market dan pre market)	96,97	Menunjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

12	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	-	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - DPMPTSP	Jumlah perkada fasilitas Penanaman modal	0	Menunjang
13	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	124,7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah - BPKPD	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	100,01	Menunjang
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	100	Program Penyelenggaraan Jalan - DPUTR	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	97,83	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dishub	Persentase ruas jalan kota yang memenuhi standar PJU	98,55	Menunjang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - DPUTR	Indeks kualitas Layanan Infrastruktur air Minum	98,61	Menunjang
				Program Pengembangan Permukiman - DPUTR	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	0	Menunjang
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - DPUTR	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Ruang Publik	98,62	Menunjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - DPUTR	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur SDA	98,50	Menunjang
				Program Pengelolaan Persampahan - DLH	Cakupan pengelolaan sampah	100	Menunjang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - DPUTR	Indeks kualitas Layanan Infrastruktur air limbah	98,12	Menunjang
15	Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	119,12	Program Penanggulangan Bencana - BPBD	Persentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana	100	Menunjang
				Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanggulangan kebakaran dan non kebakaran sesuai standar pelayanan	96,27	Menunjang
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - DLH	Indeks Kenyamanan	89,92	Menunjang
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Diskominfo	Persentase Aplikasi Pemerintah yang Online dan Terintegrasi	286,6	Menunjang
				Program Pengelolaan Arsip - Dispusipda	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai	64,92	Menunjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

					Akuntabilitas Kinerja, Alat yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional		
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Indeks Pelayanan Publik	106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Setda	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	99,76	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD – Sekretariat DPRD	Persentase Prolegda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	100	Menunjang
				Program Perekonomian dan Pembangunan - Setda	Indeks tata kelola pengadaan	94,99	Menunjang
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Disdukcapil	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	159,99	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	106,22	Menunjang
18	Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah - BAPPEDA	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	100	Menunjang
19	Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah –	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	96,37	Menunjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	dan akuntabel			BAPPEDA			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Setda & Semua PD	Nilai rata-rata RB Perangkat Daerah yang melakukan pengukuran IRB-PD	107,66	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah - BPKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	98,96	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pengawasan - Inspektorat	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	Menunjang
20	Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi			Program Kepegawaian Daerah - BKPSDM	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100	Menunjang

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2025

3.2.6 Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2025

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2025 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Suatu kinerja dikatakan **efektif** apabila **target kinerjanya tercapai**, sedangkan sumber daya dikatakan efisien apabila masih terdapat **siswa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif**.

Analisis efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja Wali Kota Sukabumi Tahun 2025 :

1. **Tujuan 1** : Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter menunjukkan **kinerja efektif** dikarenakan kinerja keempat IKUnya telah mencapai target yang ditetapkan (98,45%, 100,19%, 100% dan 100%) dengan **efisiensi anggaran mencapai 4,37 Milyar**.
2. **Tujuan 2** : Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif walaupun satu IKUnya belum menunjukkan kinerja efektif dikarenakan kinerja ketiga IKUnya belum mencapai target yang ditetapkan (90,17%, 84% dan 92,34%) dan satu IKUnya yang belum diperoleh angka realisasinya (Indeks Kerukunan Umat Beragama) dengan **efisiensi anggaran mencapai 741 Juta**.
3. **Tujuan 3** : Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif menunjukkan **kinerja efektif** dikarenakan kinerja keempat IKUnya telah mencapai target yang ditetapkan (100,15%, 100%, 124,7%) dan satu IKUnya yang belum diperoleh angka realisasinya (Rasio PDRB

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan **efisiensi anggaran mencapai 75,9 Juta**

4. **Tujuan 4** : Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan menunjukkan **kinerja efektif** dikarenakan kinerja kedua IKUnya telah mencapai target yang ditetapkan (100%, 123%) dengan **efisiensi anggaran mencapai 3,48 Milyar**
5. **Tujuan 5** : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif menunjukkan **kinerja efektif** dikarenakan kinerja kelima IKUnya telah mencapai target yang ditetapkan (100%, 106%, 99,76%, 100% dan 100,40%) dan satu IKUnya yang belum diperoleh angka realisasinya (Indeks Sistem Merit) dengan **efisiensi anggaran mencapai 29,08 Milyar**

Tabel 3.11
Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN IKU (%)	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	Pagu Perubahan TA 2025	Realisasi Anggaran TA 2025	Persentase Capaian (%)	EFISIEN/ TIDAK EFISIEN	% Efisiensi	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
TUJUAN 1 : TERWUJUDNYA SDM KOTA SUKABUMI YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER								
SASARAN 1 : Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata								
IKU 1 : Indeks Pendidikan	99,14	Tidak Efektif	80.404.019.020	79.512.325.660	96,67	Tidak Efisien	3,33	Disdik - Dispuspda
SASARAN 2: Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas								
IKU 2 : Usia Harapan Hidup	100,19	Efektif	89.430.141.578	86.017.305.060	97,91	Efisien	2,09	Dinkes – DP2KBP3A
SASARAN 3: Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota								
IKU 3 : Tingkat Kemiskinan	100	Efektif	418.092.450	357.587.700	85,53	Efisien	14,47	Dinsos
SASARAN 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota								
IKU 4 : Tingkat Pengangguran Terbuka	100	Efektif	458.348.500	450.711.500	96,53	Efisien	3,47	Disnaker – Diskumindag - Dpmptsp
TUJUAN 2 : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA SUKABUMI YANG AGAMIS, TOLERAN, TENTRAM, BERBUDAYA, DAN INKLUSIF								
SASARAN 6 : Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib								
IKU 6 : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	90,17	Tidak Efektif	1.817.703.000	1.739.991.041	95,72	Tidak Efisien	4,28	Satpol PP Damkar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

SASARAN 7 : Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya								
IKU 6 : Indeks Warisan Budaya	84	Tidak Efektif	210.489.000	195.682.500	92.97	Tidak Efisien	7,03	Disdik
SASARAN 8 : Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif								
IKU 8 : Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	92,34	Tidak Efektif	3.618.867.100	3.605.313.657	99.61	Tidak Efisien	0,39	Dp2kbp3a - Disporapar
TUJUAN 3 : TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI KOTA SUKABUMI YANG INKLUSIF								
SASARAN 9 : Meningkatnya ekonomi kreatif kota								
IKU 9 : Indeks Kota Kreatif	100,15	Efektif	463.521.100	458.936.100	98.28	Efisien	1,72	Disporapar - Diskumindag
SASARAN 11 : Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota								
IKU 11 : Indeks Ketahanan Pangan	97,41	Tidak Efektif	630.082.050	628.225.150	99.80	Tidak Efisien	0,20	Dkp3
SASARAN 12 : Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota								
IKU 12 : Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	100	Efektif	75.000.000	74.478.500	99,30	Efisien	0,70	Dpmpstsp – Dputr – Bpkpd
SASARAN 13 : Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan								
IKU 13: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	124,7	Efektif	4.759.166.300	4.692.338.767	99,60	Efisien	0,40	Bpkpd
TUJUAN 4 : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA SUKABUMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN								

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

SASARAN 14 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota								
IKU 14 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	100	Efektif	45.664.660.194	42.188.034.570	94,03	Efisien	5,97	Dputr – Dlh - Dishub
SASARAN 15 : Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim								
IKU 15 : Indeks Risiko Bencana	123	Efektif	992.645.250	979.419.211	98,75	1,25	Efisien	Bpbd – Satpol PP damkar – Dlh
TUJUAN 5 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI YANG ADAPTIF DAN INOVATIF								
SASARAN 16 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital								
IKU 16: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100	Efektif	388.204.780	380.184.680	97,45	2,55	Efisien	Diskominfo – Dispusipda
SASARAN 17 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota								
IKU 17 & 18: Indeks Pelayanan Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat	102,66	Efektif	77.519.996.931	76.636.079.420	98,82	1,18	Efisien	Setda – Seluruh PD
SASARAN 18 : Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan								
IKU 19: Indeks Inovasi Daerah	100	Efektif	1.007.715.800	1.003.981.453	99,63	0,37	Efisien	Bappeda – Seluruh PD
SASARAN 19 : Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel								
IKU 20: Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	100,40	Efektif	1.000.878.464.344	972.699.658.057	98,40	1,60	Efisien	Setda – Seluruh PD
KESIMPULAN	100,96	Efektif			93,90	6,10	Efisien	

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2025

3.2.7 Realisasi Anggaran Pemerintah Sukabumi Tahun 2025

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Berdasarkan capaian kinerja pendapatan Daerah Tahun 2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Berikut ini adalah rincian realisasi anggaran dalam pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi tahun 2025 (unauditted) :

Tabel 3.12
Analisis Realisasi Anggaran dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN TAHUN 2025		
		PAGU	REALISASI	%
a	b	d	e	f
Tujuan : Terwujudnya Sdm Kota Sukabumi Yang Unggul Dan Berkarakter		170,710,601,548	166,337,929,920	97.44
Sasaran :		80,404,019,020	79,512,325,660	96.67
Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Program Pengelolaan Pendidikan	78,930,898,200	78,122,229,665	98.98
	Program Pembinaan Perpustakaan	1,473,120,820	1,390,095,995	94.36
Sasaran :		89,430,141,578	86,017,305,060	97.91
Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	85,557,849,078	82,152,865,810	96.02
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,872,292,500	3,864,439,250	99.80
Sasaran :		418,092,450	357,587,700	85.53
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	418,092,450	357,587,700	85.53
Sasaran :		458,348,500	450,711,500	96.53
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	402,321,000	397,966,000	98.92

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	Program Penempatan Tenaga Kerja	56,027,500	52,745,500	94.14
Tujuan : Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif		22,214,370,868	21,469,209,003	96.65
Sasaran :		16,567,311,768	15,928,221,805	94.76
Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	13,635,976,268	13,213,009,430	96.90
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2,931,335,500	2,715,212,375	92.63
Sasaran :		1,817,703,000	1,739,991,041	95.72
Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,817,703,000	1,739,991,041	95.72
Sasaran :		210,489,000	195,682,500	92.97
Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Program Pengembangan Kebudayaan	210,489,000	195,682,500	92.97
Sasaran :		3,618,867,100	3,605,313,657	99.61
Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2,088,394,200	2,082,447,800	99.72
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	41,215,500	40,889,000	99.21
	Program Pemenuhan Hak Anak	11,498,250	11,498,250	100.00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	1,477,759,150	1,470,478,607	99.51

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	Kepemudaan			
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif		6,534,434,925	6,458,529,653	98.84
Sasaran :		43,815,231,768	42,859,969,347	97.82
Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50,963,000	49,613,000	97.35
	Program Pengembangan UMKM	412,558,100	409,323,100	99.22
Sasaran :		606,665,475	604,551,136	99.65
Berkembangnya industri pariwisata MICE	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	606,665,475	604,551,136	99.65
Sasaran :		630,082,050	628,225,150	99.80
Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	570,966,200	569,159,300	99.68
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	59,115,850	59,065,850	99.92
Sasaran :		75,000,000	74,478,500	99.30
Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75,000,000	74,478,500	99.30
Sasaran :		4,759,166,300	4,692,338,767	98.60
Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,759,166,300	4,692,338,767	98.60

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Tujuan : Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan		46,657,305,444	43,167,453,781	92.52
Sasaran :		45,664,660,194	42,188,034,570	94.03
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Program Penyelenggaraan Jalan	19,759,821,335	19,058,475,808	96.45
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3,127,027,984	3,078,606,735	98.45
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3,766,897,677	3,684,599,560	97.82
	Program Pengembangan Permukiman	413,936,150	413,631,900	99.93
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7,233,796,845	4,837,940,966	66.88
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3,268,411,983	3,245,694,057	99.30
	Program Pengelolaan Persampahan	4,783,301,820	4,755,567,730	99.42
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,311,466,400	3,113,517,814	94.02
Sasaran :		992,645,250	979,419,211	98.75
Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	Program Penanggulangan Bencana	341,186,250	340,120,850	99.69
	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	253,864,200	251,268,500	98.98

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	397,594,800	388,029,861	97.59
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan		1,080,685,565,655	1,051,596,317,950	97.31
Sasaran :		388,204,780	380,184,680	97.45
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	239,799,500	238,637,000	99.52
	Program Pengelolaan Arsip	148,405,280	141,547,680	95.38
Sasaran :		77,519,996,931	76,636,079,420	98.82
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	46,021,836,322	45,360,240,192	98.56
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	20,018,360,650	19,863,811,660	99.23
	Program Perekonomian dan Pembangunan	499,147,300	487,572,468	97.68
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	61,111,100	60,592,000	99.15
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10,919,541,559	10,863,863,100	99.49
Sasaran :		1,007,715,800	1,003,981,453	99.63
Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,007,715,800	1,003,981,453	99.63
Sasaran :		1,000,878,464,344	972,699,658,057	98.40
Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,885,229,050	2,815,009,806	97.57
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	990,156,925,377	962,120,570,230	97.17

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

	Kabupaten/Kota			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6,843,795,917	6,772,403,476	98.96
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	992,514,000	991,674,545	99.92
Sasaran :		891,183,800	876,414,340	98.34
Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Program Kepegawaian Daerah	891,183,800	876,414,340	98.34
JUMLAH		1,326,802,278,440	1,289,029,440,307	97.15

Sumber : BAPPEDA Kota Sukabumi, 2025



BAB IV

Penutup

KONTEN

4.1. KESIMPULAN	202
4.2. RENCANA TIDAK LANJUT	203

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Wali Kota Sukabumi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil **evaluasi kinerja** dan analisis dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis dan capaian Misi RPJMD.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ Pada Tahun 2025 dengan adanya RPJMD tahun 2025-2029, dimana terjadi perubahan tujuan, sasaran dan indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Sukabumi maka terdapat perubahan 12 (dua belas) IKU dan bertambah menjadi **21 (dua puluh satu) IKU** pada Tahun 2025 yang **menembak 5 (lima) Tujuan**;
- ❖ Secara keseluruhan, rata-rata kinerja pembangunan (capaian per misi/tujuan) Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah **100,73%** dengan total efisiensi anggaran sebesar **Rp. 37,7 Milyar,-**
- ❖ Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2025 berhasil mencapai kinerja dengan kategori **SANGAT TINGGI**. Rata-rata capaian



kinerja sasaran RPJMD Sebesar **100,73%**. Sebanyak 11 IKU telah tercapai/melampaui target dan seluruh IKU memiliki tingkat capaian kinerja $91\% \leq$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh satu persen) dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi.

- ❖ Untuk pencapaian IKU pada seluruh misi yang ada dalam RPJMD Tahun 2025, ditembak oleh 46 Program menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja **SANGAT TINGGI**.

Uraian diatas memperlihatkan bahwa perkembangan penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pencapaian empat tujuan RPJMD menunjukkan tingkat ketercapaian kinerja dan efisiensi anggaran yang sangat baik. Hal ini memberikan optimisme pencapaian tujuan dan sasaran Kota Sukabumi yang menjadi pertanggungjawaban terhadap harapan dan kepercayaan masyarakat Kota Sukabumi. Dukungan komitmen yang tinggi, terbangunnya komunikasi efektif antar implementator, terdapatnya sistem teknologi informasi dalam memantau kinerja dan inovasi serta budaya organisasi yang berintegrasi menjadi faktor-faktor pendorong yang kuat dalam terwujudnya kondisi ini.

4.2. RENCANA TIDAK LANJUT

Meskipun secara rata-rata IKU memiliki tingkat capaian $\geq 91\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh satu persen) atau dengan kata lain memiliki kinerja SANGAT BAIK. Masih terdapat 5 (lima) IKU yang belum mencapai target yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Indeks Warisan Budaya, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Indeks Ketahanan Pangan. Dan Indeks Kepuasan



Masyarakat. Sebagai tindak lanjut terhadap indikator yang belum mencapai target 100% (seratus persen) dan me maintainance pencapaian IKU yang sudah mencapai target, maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2025, maka Pemerintah Kota Sukabumi akan mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Segera melengkapi dokumen PK Perangkat Daerah khususnya penjenjangan kinerja dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi untuk kemudian disampaikan melalui esr.menpan.go.id;
 - b. Segera melengkapi dokumen RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025-2029 melalui esr.menpan.go.id;
 - c. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan terutama reviu indikator kinerja Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria SMART;
 - d. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
 - e. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;



- f. Mereviu rencana aksi Perangkat Daerah sehingga selaras dengan yang telah ditetapkan dalam PK dan dapat terukur setiap triwulan;
- g. Mengintruksikan untuk penyusunan Renstra Periode 2025-2029, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk menambahkan Definisi Operasional dan Formulasi Penghitungan;
- h. Memastikan monitoring dan evaluasi tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- i. Memastikan seluruh PD Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala dan menyampaikan hasil monev ke esr.menpan.go.id;
- j. Mensosialisasikan kepada seluruh PD untuk menyampaikan LKIP PD melalui berbagai media dan website Kota Sukabumi;
- k. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;
- l. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja baik level Pemerintah Kota maupun PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- m. Memastikan evauasi internal AKIP PD dengan menggunakan dokumen terbaru yang digunakan oleh PD, sehingga hasil evaluasi internal dapat memberikan gambaran terbaru atas pelaksanaan AKIP PD;
- n. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD,



sehingga hasil evaluasi internal dapat memberikan gambaran terbaru atas pelaksanaan AKIP PD.

- n. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward* and *punishment* kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP.

2. Menjaga pencapaian target pada indikator-indikator yang telah melampaui target dengan terus melakukan koordinasi kolaborasi, pemantauan dan pengendalian secara terstruktur dimulai dari sistem perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja agar tetap terpantau keberhasilannya.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis, langkah-langkah inovatif dan sinergis seluruh sektor. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi semakin meningkat sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan reformasi birokrasi yang mendukung terwujudnya *Good Governance* di Kota Sukabumi.

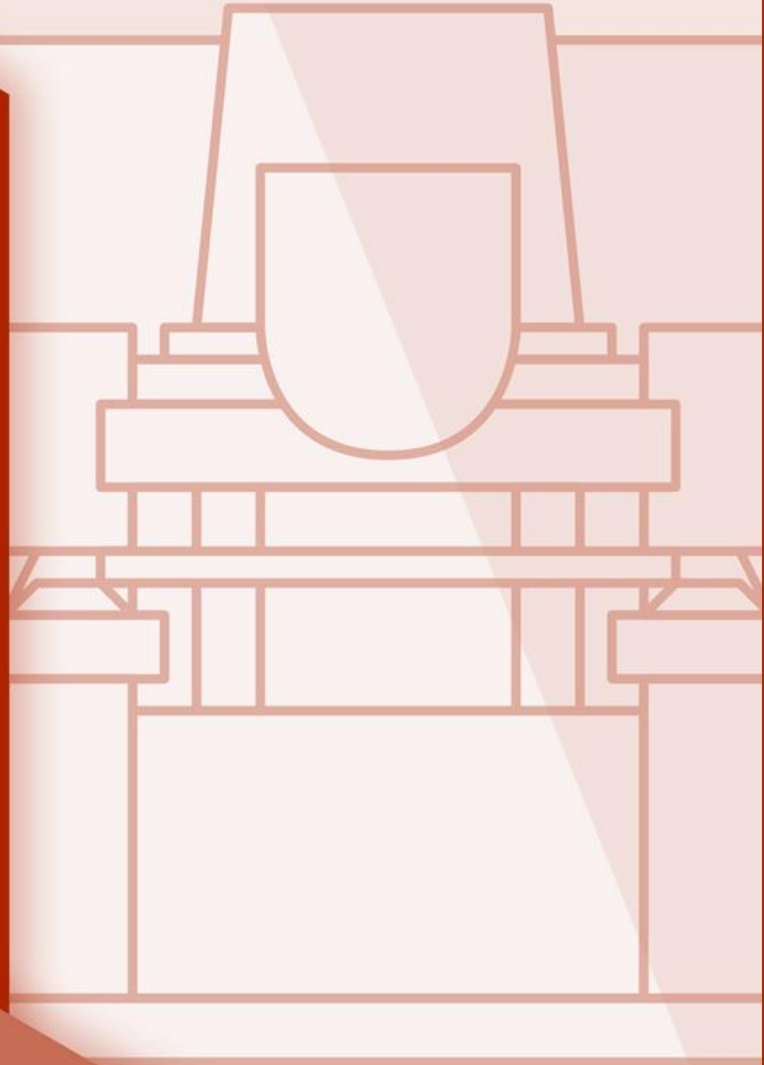
Sukabumi, 25 Maret 2025

WALIKOTA SUKABUMI,





DAFTAR PENGHARGAAN Tahun 2025



PENGHARGAAN YANG DIRAIH KOTA SUKABUMI





Penghargaan Kota Terinovatif pada IGA 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Rabu, (10/12/2025) Di Kempinski, Jakarta.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025



Kota Sukabumi raih Peringkat ke-6 secara nasional kota paling toleran di Indonesia Versi SETARA Institute. Selasa, 27/05/2025, Hotel Bidakara, Jakarta



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2025



Penghargaan "SWASTI SABA PADAPA" (Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2025), Jakarta 28 November 2025.





Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 untuk Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bertempat di Aula lantai 1 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, pada hari Selasa, 23 Mei 2025).





Piagam Penghargaan Kota Layak Anak 2025 Peringkat Madya, dari
Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

